

Prof. Dr. Aman, M.Pd.

INDONESIA *dari* KOLONIALISME *Sampai* NASIONALISME



INDONESIA: DARI KOLONIALISME SAMPAI NASIONALISME

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

INDONESIA: DARI KOLONIALISME SAMPAI NASIONALISME

Prof. Dr. AMAN, M.Pd.



INDONESIA: DARI KOLONIALISME SAMPAI NASIONALISME

Oleh:

Prof. Dr. AMAN, M.Pd.

Editor: Rhoma Dwi Arya Yuliantri

ISBN: 978-602-498-495-3

Edisi Pertama, Januari 2023

Diterbitkan dan dicetak oleh:

UNY Press

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY

Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274 – 589346

Mail: unypenerbitan@uny.ac.id

© 2023

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI — v

PENGANTAR PENULIS — vii

BAB I PENDAHULUAN —1

BAB II KEDATANGAN BANGSA-BARAT DI INDONESIA —7

- A. Latar Belakang Kedatangan Bangsa-bangsa Barat ke Indonesia —7
- B. Kedatangan Bangsa-bangsa Barat ke Indonesia —9
- C. Peta Kedatangan Bangsa-bangsa Barat di Indonesia —10
- D. Perjuangan Rakyat di Berbagai Daerah dalam Menentang Imperialisme dan Kolonialisme —14
- E. Bubarnya VOC sebagai Imperium Pertama (1602–1799) —17

BAB III PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA —21

- A. Ketentuan-Ketentuan Tanam Paksa —21
- B. Pelaksanaan Tanam Paksa —23
- C. Tanam Paksa di Luar Jawa —33
- D. Kritik Terhadap Tanam Paksa —37

BAB IV DAMPAK PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA BAGI MASYARAKAT —41

- A. Selayang Pandang Dampak Tanam Paksa —41
- B. *Cultuur Stelsel* Kaitannya dengan Masyarakat —42
- C. Penulisan Sejarah Sistem Tanam Paksa —44
- D. Pembentukan Modal: Sisi Lain Sistem Tanam Paksa —53
- E. Tenaga Buruh Murah dalam Sistem Tanam Paksa —58
- F. Perubahan Ekonomi Pedesaan —64

**BAB V DIMENSI-DIMENSI KOLONIALISME DI HINDIA
BELANDA — 73**

- A. Pengaruh Kolonial di Berbagai Daerah —73
- B. Perlawanan bangsa Indonesia Terhadap Hindia Belanda
Abad XIX —75
- C. Perkembangan Agama-agama pada Masa Kolonial —80

**BAB VI KONSEP NASIONALISME DALAM MASYARAKAT
PRIMITIF —87**

- A. Kepemimpinan Masyarakat Kesukuan —87
- B. Tribe Communities dan Feodal Society —89
- C. Patronase dan Paternalistik Masyarakat Kesukuan di Afrika —91
- D. Patront-Client —93
- E. Tumbuhnya Nasionalisme dan Negara Bangsa —95
- F. Bentuk dan Unsur Negara —103

BAB VII TUMBUHNYA NASIONALISME MODERN —105

- A. Kajian Nasionalisme —105
- B. Pembentukan Kesadaran Sejarah —109
- C. Substansi Nasionalisme —111
- D. Hubungan Nasionalisme dan *Nation State* —115
- E. Perkembangan Nasionalisme —117

BAB VIII PENUTUP —121

KEPUSTAKAAN —127

TENTANG PENULIS —131

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga atas segala anugrahnya penulis berhasil menyelesaikan buku ini. Kehadiran buku ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sejarah dan pendidikan sejarah, dalam merajut historisitas dan substansi pembelajaran sejarah yang berlandaskan pada undang-undang sistem pendidikan nasional dan kurikulum sejarah, yang berlaku di berbagai jenjang pendidikan. Sejarah sebagai dinamika kehidupan manusia yang kompleks, tidak pernah lepas dari dimensi waktu, manusia, dan kejadiannya. Sejarah bukan hanya cerita masa lampau yang tanpa makna kemudian ditinggalkan, ditutup rapat-rapat dan tak diingat lagi kemudian menjadi antiquart.

Lebih dari itu, sejarah merupakan rentetan peristiwa yang penuh makna, berkesinambungan dan mempengaruhi dinamika kehidupan manusia. Menurut E.H. Carr dalam bukunya *What is History*, sejarah adalah proses interaksi tanpa henti antara sejarawan dan fakta-faktanya, dan dialog yang tak berujung antara masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dimensi masa lampau yang dipelajari dalam sejarah memiliki keterkaitan dengan masa kini, dan sebagai petunjuk ke masa yang akan datang. Indonesia sebagai negara kesatuan juga tidak luput dari sejarah bagaimana dan mengapa muncul dan tumbuhnya negara bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah yang cukup panjang telah melewati berpuluh-puluh dekade diwarnai oleh beraneka peristiwa yang kecil namun krusial dan peristiwa-peristiwa yang berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Manusia sebagai makhluk pembelajar berperan sebagai lakon dan nahkoda kemana selanjutnya langkah akan dibawa. Manusia merupakan *man of action* dalam membawa dinamika negara bangsa ini dari dekade ke dekade ke arah yang lebih dinamis.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sudah banyak dibukukan dalam berbagai literatur dewasa ini. Sudah banyak juga dikisahkan dalam drama-drama yang dipentaskan di setiap event dan kesempatan. Semuanya menarik dan berusaha menyuguhkan makna yang terkandung dari penggalan kerja keras para kusuma bangsa. Tentu memang banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat peduli sejarah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih luas tentang sejarah bangsanya. Bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal dan memahami sejarah bangsanya. Hal ini karena sejarah merupakan salah satu materi yang menjembatani masyarakat untuk mengenal bangsa dan negaranya lebih dekat. Melalui pembelajaran sejarah, guru dapat menanamkan nilai-nilai dan makna yang nantinya berguna bagi kehidupan generasi selanjutnya.

Sejarah Indonesia memang sangat kompleks karena memuat seluruh aspek kehidupan yang dialami oleh bangsa Indonesia dari masa ke masa. Perjalanan panjang tersebut dipperiodisasikan dalam beberapa pembabakan waktu. Adapun tujuan periodisasi tersebut adalah untuk memudahkan para sejarawan dan masyarakat yang belajar tentang sejarah. Setiap pembabakan dalam sejarah memiliki ciri khas yang membedakan dengan masa-masa yang lainnya. Salah satu pembabakan dalam sejarah Indonesia adalah sejarah Indonesia masa kolonial. Adapun pengertian kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Masa kolonialisme identik dengan penjajahan dan eksploitasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Bangsa Indonesia mengalami masa tersebut berabad-abad tahun lamanya. Rentang waktu yang lama tersebut diwarnai dengan berbagai peristiwa dan pergolakan baik dari segi sosial, politik, ekonomi, maupun agama.

Kolonialisme yang dibawakan oleh bangsa Eropa di Indonesia mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan kaum pribumi. Kaum pribumi yang buta ilmu menjadi lahan eksploitasi habis-habisan demi memperkaya negeri sang koloni. Meskipun pribumi lemah, tapi banyak perjuangan yang dilakukan untuk menuntut perbaikan bagi hidup mereka. Kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda sebagai koloni yang memiliki waktu paling lama di Indonesia begitu memberatkan dan menambah penderitaan bangsa Indonesia. Kaum pribumi justru menjadi budak dan terasing di negerinya sendiri yang teramat kaya.

Perlakuan pemerintah kolonial yang kejam dan sangat memberatkan kaum pribumi menjadi pemandangan sehari-hari yang tak bisa terelakkan. Sebagian pribumi hanya diam, tapi tak sedikit pula yang berusaha melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Selain itu, ada juga pribumi yang berusaha mencari aman dengan mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan ikut serta memeras saudara pribuminya.

Sebagai contoh penerapan sistem tanam paksa yang menjadi fokus awal bahasan dalam buku ini, mengkaji secara komprehensif permasalahan-permasalahan seputar dilaksanakannya sistem ini. Sistem tanam paksa diterapkan atas dasar motif ekonomi pemerintah kolonial untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Penerapan sistem ini tidak terlepas dari kemenangan kelompok konservatif di Parlemen Belanda yang menghendaki pemerintah secara langsung terlibat dalam masalah ekonomi tanah jajahan. Krisis keuangan Belanda sebagai dampak adanya Perang Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgium, mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan sistem eksploitasi tanah jajahan untuk memulihkan keuangan negeri induk.

Dampaknya, sistem tanam paksa telah menjadi lahan eksploitasi besar-besaran penduduk Jawa, yang secara ekonomis-sosiologis telah menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan yang mendalam. Eksploitasi brutal terhadap penduduk Jawa ini, masih ditambah lagi oleh pola-pola tradisional yang selama sistem tanam paksa semakin mencekik leher petani, sebagai akibat perlakuan para atasan-atasan tradisional yang dengan otoritasnya dapat sesuka hati memaksa penduduk untuk bekerja wajib dalam proses tanam wajib ekspor. Sementara yang menikmati adalah pemerintah kolonial dan raja-raja lokal atau pemimpin-pemimpin lokal yang dengan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah kolonial kekuasaannya semakin besar. Akibatnya, rakyat menjadi sumber eksploitasi dari dua sistem kolonial dan tradisional. Memang sebenarnya sistem tanam paksa juga diberlakukan di luar Jawa, namun dampaknya tidak se-destruktif seperti halnya yang berlaku di Jawa. Hal demikian terjadi karena tanam paksa di luar Jawa lebih banyak dilaksanakan di tanah-tanah yang tidak produktif atau tidak digarap oleh penduduk, sedangkan di Jawa tanam paksa dijalankan di tanah-tanah penduduk yang menjadi lahan kehidupan penduduk. Bahkan tidak jarang hampir seluruh tanah penduduk yang subur digunakan untuk kepentingan tanam paksa. Lebih terasa lagi bagi penduduk yang tidak memiliki tanah, di mana mereka harus bekerja wajib di lahan untuk tanaman ekspor.

Tidak jarang mereka bekerja dengan upah yang sangat tidak manusiawi, atau karena adanya ikatan tradisional mereka terkadang tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Itulah gambaran singkat pelaksanaan sistem tanam paksa yang dibahas dalam buku ini.

Hal-hal terkait dengan kolonialisme dan perjuangan pribumi di Indonesia dirangkum dalam buku ini dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi kalangan pendidik, peserta didik, maupun masyarakat pada umumnya. Buku ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi bagi pembaca yang ingin belajar sejarah kolonialisme di Indonesia. Penulis berharap dengan ditulisnya buku ini dapat menambah pemahaman bagi para pembaca dari berbagai kalangan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca untuk lebih mendalami sejarah Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan baik teori maupun metodologi, ini dikarenakan kekurangan dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tulisan sederhana ini.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat dibutuhkan di negeri Belanda dan Eropa secara umum yakni rempah-rempah. Belanda dapat membeli rempah-rempah di Indonesia dengan harga murah, kemudian mereka jual di Eropa dengan harga tinggi. Belanda mendapatkan keuntungan luar biasa dari perdagangan ini, sehingga berduyun-duyunlah bangsa Belanda yang lain, juga bangsa-bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Keinginan bangsa Belanda untuk terus memperoleh keuntungan tinggi dari perdagangan menyebabkan mereka berusaha memonopoli perdagangan di Indonesia. Hal inilah yang mendorong terjadinya perselisihan antara Belanda dengan rakyat Indonesia. Dalam perjalanan sejarah kemudian Belanda tidak hanya berhasil melakukan monopoli perdagangan di Indonesia, tetapi juga menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Belanda kemudian melakukan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Tidak hanya Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Portugis dan Inggris adalah bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia. Bagaimana proses penjajahan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan, mari kita pelajari dan diskusi melalui uraian materi di bawah ini.

Pada tahun 1799 VOC sebagai imperium kolonialisme dan imperialisme Belanda pertama di Indonesia bubar. Korupsi sebagai penyebab utama kehancuran VOC. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Indonesia mulai 1 Januari 1800. Dengan demikian secara langsung pemerintah Hindia Belanda melakukan pemerintahan terhadap bangsa Indonesia. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Apa saja pengaruh perluasan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda.

Selepas Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB) menjadi muflis pada akhir abad ke-18 dan selepas penguasaan United Kingdom yang singkat di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih pemilikan SHTB pada tahun 1816. Belanda berjaya menumpaskan sebuah pemberontakan di Jawa dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenali sebagai *cultuurstelsel* dalam bahasa Belanda mula diamalkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu, seperti teh, kopi, dan sebagainya. Hasil-hasil tanaman itu kemudian dieksport ke luar negara.

Pada tahun 1901, pihak Belanda mengamalkan apa yang dipanggil mereka sebagai Politik Beretika (bahasa Belanda: *Ethische Politiek*) yang termasuk perbelanjaan yang lebih besar untuk mendidik orang-orang pribumi serta sedikit perubahan politik. Di bawah Gubernur Jeneral J.B. van Heutsz, pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang tempo penjajahan mereka secara langsung di seluruh Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan asas untuk negara Indonesia pada saat ini.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1830 sampai pertengahan abad ke-19 mereka menamakannya dengan *cultuurstelsel*. Dalam historiografi Indonesia yang tradisional istilah itu diganti menjadi “Tanam Paksa” yang menonjolkan aspek normatif dari sistem tersebut yakni kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh penerapan sistem tersebut. Istilah yang dipergunakan oleh Belanda tersebut selain terbatas pada aspek ekonominya, sehingga makna padanan kata *cultuurstelsel* tersebut dalam bahasa Indonesia sesungguhnya adalah “sistem pembudidayaan”, atau juga dapat disebut budidaya tanam. Namun demikian praktik di lapangan terutama dari segi pengelolaannya dapatlah diamati bahwa aspek politik kolonial sangat menonjol.

Usaha produksi sesungguhnya dilaksanakan oleh rakyat atau petani dengan pengawasan para penguasa daerah dari tingkat bupati sampai ke tingkat desa. Pada waktu itu hubungan politik antara Belanda dan Mataram yang telah menjadi saling tergantung sejak tahun 1755, dan terutama pasca Perang Diponegoro di mana Belanda membantu pihak keraton, merupakan format politik yang mendorong dan memunculkan terselenggaranya sistem tanam paksa. Dalam aspek tersebut, kasus di Jawa dan kasus-kasus di

Kepulauan Ambon dan di Priangan tidak begitu berbeda. Sistem tersebut memang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali sistem VOC.

Pada saat Thomas Stanford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, Belanda sedang mengalami kesulitan ekonomi yang lebih banyak diakibatkan oleh Perang Napoleon dan isolasi ekonomi yang disebabkan *Stelsel Kontinental*. Oleh sebab itu, Belanda kehilangan sebagian besar perdagangannya dan pelayarannya. Peranannya sebagai pasar penimbun barang mundur dan dunia perdagangan melahirkan pusat-pusat perdagangan baru. Pedagang-pedagang Belanda tidak dapat bersaing dengan pedagang-pedagang Inggris karena para pedagang Inggris dapat memasarkan kain-kain *Lancashire* dengan harga yang relatif murah. Untuk mengatasi kondisi tersebut Belanda melaksanakan sistem merkantilisme yakni memungut biaya yang tinggi terhadap barang-barang yang masuk, dan memungut pajak yang tinggi pula bagi barang-barang buatan negeri induik yang akan dipasarkan di daerah koloni serta memonopoli perdagangan pemerintah.

Dalam kondisi yang demikian, di Parlemen Belanda terjadi perbedaan pandangan antara golongan konservatif dengan golongan liberal. Golongan konservatif menganggap bahwa eksploitasi yang dijalankan di tanah koloni sudah sesuai dengan tuntutan situasi, sementara sistem eksploitasi yang dikonsepsikan oleh golongan liberal belum sepenuhnya meyakinkan pemerintah. Dalam situasi perbedaan pandangan ini, golongan liberal terpecah menjadi dua, yakni golongan liberal yang masih mempertahankan prinsip-prinsip liberal seperti kebebasan berusaha dan campur tangan yang minimal dari pihak pemerintah dalam urusan-urusan perseorangan.

Di lain sisi, terdapat sekelompok dari golongan liberal yang menekankan pada prinsip-prinsip humaniter dan menginterpretasikan prinsip liberal sebagai prinsip memberi keadilan dan perlindungan bagi semua kepentingan. Dalam menghadapi golongan liberal yang terpecah tersebut, golongan konservatif dapat meyakinkan pemerintah bahwa sistem kumpeni terbukti dapat dilaksanakan dan lebih efektif, sementara sistem liberal tidak dapat dilaksanakan di negeri jajahan karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi lokal. Namun demikian, walaupun terdapat perbedaan pandangan di antara golongan konservatif dan golongan liberal, tetapi mereka pada prinsipnya sama bahwa tanah koloni tetap merupakan daerah eksploitasi yang harus mendatangkan keuntungan kepada negeri induk, meskipun strategi eksploitasi berbeda-beda.

Perang kemerdekaan Belgia dan Perang Diponegoro memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga untuk menutup biaya perang tersebut, Belanda terdorong untuk melakukan kembali politik konservatif dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Konsekuensi dari sistem konservatisme adalah diberlakukannya Sistem Tanam Paksa atau *cultuurstelsel* pada tahun 1830. Sistem Tanam Paksa diberlakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari tanah koloni dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk mengusahakan penanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Sementara jenis tanaman yang diusahakan harus mengikuti ketentuan-ketentuan pemerintah kolonial. Sikap konservatif ini mereka pertahankan dengan mempertahankan pola-pola tradisional yang berlaku di tanah jajahan. Dengan demikian, mereka tidak secara langsung berhadapan dengan rakyat, melainkan melalui para penguasa lokal dari tingkat bupati sampai ke tingkat kepala desa. Peranan penguasa pribumi sangat besar baik sebagai pengelola kebijakan maupun dalam mendapatkan tenaga kerja buruh penduduk pribumi, sehingga Sistem Tanam Paksa dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lama.

Suatu bangsa sebagai kolektivitas seperti halnya individu memiliki kepribadian yang terdiri atas serumpun ciri-ciri menjadi suatu watak. Kepribadian nasional lazimnya bersumber pada pengalaman bersama bangsa itu atau sejarahnya. Identitas seseorang pribadi dikembalikan kepada riwayatnya, maka identitas suatu bangsa berakar pada sejarah bangsa itu. Dalam hal ini, sejarah nasional fungsinya sangat fundamental untuk menciptakan kesadaran nasional yang pada gilirannya memperkokoh solidaritas nasional. Sehubungan dengan itu pelajaran sejarah nasional amat strategis fungsinya bagi pendidikan nasional.

Sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolektif suatu komunitas atau *nasion* di masa lampau. Pada pribadi pengalaman membentuk kepribadian seseorang dan sekaligus menentukan identitasnya. Proses serupa terjadi pada kolektivitas, yakni pengalaman kolektifnya atau sejarahnya yang membentuk kepribadian nasional dan sekaligus identitas nasionalnya. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan seorang individu yang telah kehilangan memorinya, ialah orang yang pikun atau sakit jiwa, maka dia kehilangan kepribadian atau identitasnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil beberapa butir kesimpulan antara lain: 1) untuk mengenal identitas bangsa diperlukan pengetahuan sejarah pada umumnya, dan sejarah nasional khususnya. Sejarah nasional mencakup secara komprehensif segala aspek kehidupan bangsa, yang terwujud sebagai tindakan, perilaku, prestasi hasil usaha atau kerjanya mempertahankan kebebasan atau kedaulatannya, meningkatkan taraf hidupnya, menyelenggarakan kegiatan ekonomi, sosial, politik, religius, lagi pula menghayati kebudayaan politik beserta ideologi nasionalnya, kelangsungan masyarakat dan budayanya; 2) sejarah nasional mencakup segala lapisan sosial beserta bidang kepentingannya, subbudayanya. Sejarah nasional mengungkapkan perkembangan multietnisnya, sistem hukum adatnya, bahasa, sistem kekerabatan, kepercayaan, dan sebagainya.

Menemukan kekuatan nasionalisme dalam negara kebangsaan didasari oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: kesatuan (*unity*), dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan *policy* kebudayaan; kebebasan (*liberty, freedom, independence*), dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; kesamaan (*equality*), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban; kepribadian (*personality*) dan identitas (*identity*), yaitu memiliki harga diri (*self esteem*), rasa bangga (*pride*) dan rasa sayang (*deposition*) terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan budayanya dan; prestasi (*achievement*), yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) serta kebesaran dan kemanusiaan (*the greatness and the glorification*) dari bangsanya.

Suatu bangsa sebagai kolektivitas seperti halnya individu memiliki kepribadian yang terdiri atas serumpun ciri-ciri menjadi suatu watak. Kepribadian nasional lazimnya bersumber pada pengalaman bersama bangsa itu atau sejarahnya. Identitas seseorang pribadi dikembalikan kepada riwayatnya, maka identitas suatu bangsa berakar pada sejarah bangsa itu. Dalam hal ini, sejarah nasional fungsinya sangat fundamental untuk menciptakan kesadaran nasional yang pada gilirannya memperkokoh solidaritas nasional. Sehubungan dengan itu pelajaran sejarah nasional amat strategis fungsinya bagi pendidikan nasional.

Sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolektif suatu komunitas atau nasion di masa lampau. Pada pribadi pengalaman membentuk kepribadian seseorang dan sekaligus menentukan identitasnya. Proses serupa

terjadi pada kolektivitas, yakni pengalaman kolektifnya atau sejarahnya yang membentuk kepribadian nasional dan sekaligus identitas nasionalnya. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan seorang individu yang telah kehilangan memorinya, ialah orang yang pikun atau sakit jiwa, maka dia kehilangan kepribadian atau identitasnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil beberapa butir kesimpulan antara lain: 1) untuk mengenal identitas bangsa diperlukan pengetahuan sejarah pada umumnya, dan sejarah nasional khususnya. Sejarah nasional mencakup secara komprehensif segala aspek kehidupan bangsa, yang terwujud sebagai tindakan, perilaku, prestasi hasil usaha atau kerjanya mempertahankan kebebasan atau kedaulatannya, meningkatkan taraf hidupnya, menyelenggarakan kegiatan ekonomi, sosial, politik, religius, lagi pula menghayati kebudayaan politik beserta ideologi nasionalnya, kelangsungan masyarakat dan budayanya; 2) sejarah nasional mencakup segala lapisan sosial beserta bidang kepentingannya, subbudayanya. Sejarah nasional mengungkap perkembangan multietnisnya, sistem hukum adatnya, bahasa, sistem kekerabatan, kepercayaan, dan sebagainya.

Pelajaran sejarah bertujuan menciptakan *wawasan historis* atau perspektif sejarah. Wawasan historis lebih menonjolkan kontinuitas segala sesuatu. *Being* adalah hasil proses *becoming*, dan *being* itu sendiri ada dalam titik proses *becoming*. Sementara itu yang bersifat sosio-budaya di lingkungan kita adalah produk sejarah, antara lain wilayah RI, negara nasional, kebudayaan nasional. Sejarah nasional multidimensional berfungsi antara lain: mencegah timbulnya determinisme, memperluas cakrawala intelektual, mencegah terjadinya *sinkronisme*, yang mengabaikan *determinisme*.

Di samping itu, pelajaran sejarah juga mempunyai fungsi sosio-kultural, membangkitkan *kesadaran historis*. Berdasarkan kesadaran historis dibentuk kesadaran nasional. Hal ini membangkitkan inspirasi dan aspirasi kepada generasi muda bagi pengabdian kepada negara dengan penuh dedikasi dan kesediaan berkorban. Sejarah nasional perlu menimbulkan kebanggaan nasional (*national pride*), harga diri, dan rasa swadaya. Dengan demikian sangat jelas bahwa pelajaran sejarah tidak semata-mata memberi *pengetahuan, fakta*, dan *kronologi*. Dalam pelajaran sejarah perlu dimasukkan biografi pahlawan mencakup soal kepribadian, perwatakan semangat berkorban, perlu ditanam *historical-mindedness*, perbedaan antara sejarah dan mitos, legenda, dan novel histories.

BAB II

KEDATANGAN BANGSA BARAT DI INDONESIA

A. Latar Belakang Kedatangan Bangsa-bangsa Barat ke Indonesia

Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia didorong oleh berbagai hal seperti disebut di bawah ini.

1. Perkembangan Merkantilisme, Revolusi Industri, dan Kapitalisme

Merkantilisme, yakni suatu faham kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan memupuk hasil kekayaan (berupa emas) sebanyak-banyaknya sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan untuk negara itu sendiri. Untuk mencapai tujuan itu muncullah semangat dari beberapa Negara Eropa untuk mencari daerah jajahan. Beberapa negara merkantilisme di Eropa misalnya; *Prancis, Inggris, Jerman, Belanda*. Seiring berkembangnya waktu, kekayaan berupa emas di Eropa tidak hanya dimaknai sebagai logam mulia semata melainkan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan besar bagi negara (Magnusson, 2022: 167). Salah satunya adalah rempah-rempah. Revolusi industri bermula di Inggris pada tahun 1760 dan kemudian berkembang hingga seluruh Eropa. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikejakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Perubahan tersebut menandakan pergeseran perekonomian Eropa yang bermula agraris menjadi industrialisasi (Fajariah dan Suryo, 2020:77). Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, dan barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya.

Kapitalisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa dalam perekonomian, untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus mempunyai modal sebesar-besarnya. Pemilikan modal yang besar dengan sendirinya akan menguasai berbagai sektor produksi, bahan baku, dan pemasaran. Menurut kapitalisme seseorang bebas memupuk kekayaannya. Menurut beberapa ahli, kapitalisme merupakan dampak dari merkantilisme dan Revolusi Industri dari Inggris. Merkantilisme menggerakkan beberapa negara untuk mencari keuntungan dengan cara apapun, termasuk melakukan industrialisasi. Dua hal ini mengakibatkan beberapa negara di Eropa mencari daerah jajahan untuk memanfaatkan sumber dayanya dan memasarkan hasil industri di daerah jajahan sehingga menimbulkan kesenjangan antara negara penjajah (majikan) dan daerah jajahan (buruh) (Hasan dan Mahyudi, 2020: 81).

2. Jatuhnya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Usmani tahun 1453

Penguasa Turki Islam dari dinasti Utsmani berhasil merebut Konstantinopel (Istanbul) pada tahun 1453. Pada saat itu Konstantinopel merupakan pusat pemerintahan Romawi Timur. Konstantinopel merupakan pelabuhan batas Asia-Eropa yang menjadi bandar dagang terbesar pada waktu itu. Masyarakat Eropa memperoleh berbagai kebutuhan seperti rempah-rempah dari Konstantinopel. Rempah-rempah digunakan masyarakat Eropa sebagai bahan pengawet daging dan makanan lainnya (Pora *et. al.*, 2020: 135). Dengan jatuhnya Konstantinopel, maka perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Hal inilah yang mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain untuk mencapai penghasil rempah-rempah (Asia).

3. Dorongan Semangat Tiga G

Kedatangan bangsa-bangsa Barat juga didorong oleh semangat 3G. Tiga G adalah semboyan *gold* (emas), *gospel* (agama), dan *glory* (petualangan serta kemuliaan). Gold berkaitan dengan upaya mencari kekayaan, *gospel* merupakan tuntutan menyebarkan agama Kristen, dan *Glory* merupakan tekad untuk mencapai kejayaan bangsa-bangsa Barat. Tiga semboyan itulah yang mendorong bangsa-bangsa Barat mencapai dunia timur. Semangat 3G diidentikkan dengan nasionalisme kuno ala Eropa dan semangat balas dendam (*reconquista*) terhadap Turki Utsmani atas penguasaan Konstantinopel (Jalil, 2020: 27-28). Bangsa Eropa kemudian berkembang dalam bidang politik dan ekonomi sehingga melahirkan kolonialisme-imperialisme.

4. Tantangan teori Heliosentris

Nicolaus Copernicus seorang ilmuwan Polandia memperkenalkan teori Heliosentris tahun 1543. Menurut teori Heliosentris bahwa pusat tata surya adalah matahari. Bumi berbentuk bulat seperti bola. Teori ini bertentangan dengan teori Geosentris yang menyatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Galileo, seorang ilmuwan Italia sebagai salah satu penyokong semangat pelayaran, karena ia menemukan teropong (teleskop) yang mampu melihat benda-benda yang letaknya sangat jauh. Penjelasan bahwa bumi itu bulat menjadikan tantangan tersendiri bagi bangsa Eropa untuk membuktikannya. Hal tersebut kemudian didukung dengan berbagai penemuan alat navigasi seperti kompas dan mesin kapal modern. Penggunaan dua teknologi tersebut berdampak pada anggapan bahwa apabila bumi itu bulat, maka seseorang yang berlayar dari satu titik akan kembali ke titik yang sama (Zara, 2020: 41-43). Teori tersebut tentu bertentangan dengan konsep Geosentris yang dianut oleh gereja Eropa. Lahirnya Heliosentrisme mengakibatkan pergeseran paradigma kebenaran berpusat pada gereja (teosentrisme) ke pemikiran manusia yang seutuhnya (antroposentrisme renaissance) (Sellars, 2020: 228-229).

B. Kedatangan Bangsa-bangsa Barat ke Indonesia

Bagaimana proses perjalanan bangsa-bangsa Barat ke timur? Mereka melalui berbagai rintangan yang amat berat. Lautan luas dengan ombak besar dan ancaman angin menjadi halangan utama. Ancaman bajak laut juga sering mereka temui. Tetapi dengan semangat tiga G mereka akhirnya mampu mencapai dunia timur. Mereka adalah petualang yang tangguh. Sayangnya petualangan mereka kemudian menjadikan mereka sombong dan karena hawa nafsunya, mereka kemudian menjadi penjajah. Bagaimana kronologi atau urutan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia?

1. Ekspedisi Bangsa Portugis

Pelaut Portugis *Bartolomeo Diaz* pada tahun 1486 melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Ekspedisinya hanya berhasil sampai di ujung selatan Afrika. Selanjutnya orang Portugis menyebutnya sebagai Tanjung Harapan Baik (*Cape of Good Hope*).

Vasco da Gama melanjutkan ekspedisi Bartolomeo Diaz tahun 1498. Akhirnya Vasco da Gama berhasil mencapai Kalikut, India. Dengan demikian,

ia telah menemukan jalan baru menuju pusat rempah-rempah. Dalam perjalanan selanjutnya akhirnya Portugis mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka, dan selanjutnya memasuki wilayah Nusantara.

2. Ekspedisi Bangsa Spanyol

Teori Heliosentris salah satu pendorong Christophorus Columbus mencapai Hindia timur melalui jalur barat Eropa. Pada tahun 1492, dengan dukungan Ratu Isabella Columbus memulai pelayaran melalui Samudra Atlantik. Columbus berhasil mencapai kepulauan Bahama di Karibia Amerika. Columbus mengira dirinya telah sampai di Hindia, sehingga menamai penduduk setempat sebagai orang Indian. Akibatnya benua Amerika oleh orang Eropa disebut sebagai Hindia Barat. Columbus menjadi pioner menuju Hindia Timur melalui jalur barat. Penerusnya bernama Ferdinand Magellan melakukan pelayaran tahun 1519. Satu tahun kemudian Magellan sampai di Filipina. Di Filipina ia wafat karena terlibat konflik dengan kerajaan setempat. *Sebastian d'Elcano*, penerus Magellan berhasil mencapai kepulauan **Maluku tahun 1521**. Di Maluku bangsa Portugis telah sampai terlebih dahulu.

Portugis dan Spanyol terlibat dalam konflik antar kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Pada saat itu Ternate dan Tidore sebagai kerajaan berpengaruh di Maluku sedang dalam situasi persaingan yang menjurus ke permusuhan. Spanyol memanfaatkan situasi tersebut dengan memberikan dukungan kepada Tidore. Sedangkan Portugis memberikan dukungan kepada Ternate. Dalam persetujuan tersebut Ternate dan Spanyol dalam pihak yang mengalami kekalahan. Untuk menghindari persaingan antar bangsa Eropa yang bisa merugikan mereka, maka perjanjian **Tordesillas** memutuskan bahwa Spanyol tidak diijinkan melakukan perdagangan di Maluku. Salah satu hal terpenting dari perjalanan pelayaran bangsa Portugis dan Spanyol adalah bukti bumi berbentuk bulat semakin kuat (Hummel dan Lopes, 2020: 157).

C. Peta Kedatangan Bangsa-bangsa Barat di Indonesia

1. Ekspedisi Bangsa Inggris

Inggris merupakan salah satu negara yang sangat maju di Eropa. Pola perdagangannya berbeda dengan para pedagang Eropa lainnya. Perdagangannya Inggris di Asia tidak disponsori oleh pemerintah, melainkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Persekutuan dagang **EIC** (*East Indian Company*) merupakan gabungan dari para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris

tiba di kepulauan Nusantara, namun pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India/Asia Selatan dan Asia Timur. Tentang kekuasaan Inggris di Indonesia akan kita bahas di bagian lain.

2. Ekspedisi Bangsa Belanda

Pada tahun 1568–1648 terjadi perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. Pemerintah Spanyol melarang pelabuhan Lisabon bagi kapal-kapal Belanda untuk melakukan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Belanda tidak surut langkah dalam menghadapi tantangan tersebut untuk mencapai Hindia Timur. Seorang pelaut Belanda **Cornelis de Houtman**, memimpin ekspedisi ke Hindia Timur. Pada tahun 1595 armada mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. **Tahun 1596** armada Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Malaka. Mengapa Belanda tidak melewati Selat Malaka yang lebih ramai? Hal ini disebabkan Portugis telah menguasai Malaka, sementara mereka bermusuhan.

Cornellis de Houtman merupakan pioner perusahaan-perusahaan dagang Belanda lainnya. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Secara prinsip ekonomi, bahwa banyaknya pedagang maka harga akan naik, karena banyak permintaan, penawaran cenderung tetap. Akibat di Eropa adalah sebaliknya. Karena banyak pedagang yang membawa dagangan sama, sehingga harga rempah-rempah di Eropa cenderung turun. Akibatnya keuntungan pedagang Eropa juga turun. Keadaan ini sebenarnya merupakan prinsip ekonomi yang sehat.

3. Berdirinya Kongsi Dagang Belanda VOC

Persaingan antar para pedagang barat muncul dengan semakin banyaknya pedagang Barat di Indonesia. Hal tersebut sebagai hal kurang positif bagi perkembangan para pedagang Eropa. Untuk itulah maka bangsa-bangsa Barat kemudian mendirikan persekutuan atau organisasi perdagangan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar bangsa Barat, khususnya yang satu negara. Para pedagang Belanda kemudian mendirikan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Bagaimana proses terbentuknya VOC? Apa saja keistimewaan VOC? Mari kita kaji melalui uraian di bawah ini!

4. Terbentuknya VOC tahun 1602

Persaingan tidak hanya antar pedagang Belanda, tetapi juga dengan para pedagang Eropa, dan Asia lainnya. Saingan utama Belanda adalah Portugis yang lebih dahulu menanamkan pengaruh perdagangan di Nusantara. Masalah ini dianggap merugikan kepentingan Belanda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan dukungan pemerintah Belanda, pada tanggal **20 Maret 1602** dibentuklah *Veredigde Oost-Indische Compagnie* atau disingkat VOC (Persekutuan Perusahaan Dagang Hindia Timur). Ide pembentukan VOC berasal dari seorang anggota Parlemen Belanda bernama Johan van Oldebarnevelt. VOC merupakan merger (penggabungan) dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Apa istimewanya VOC? Beberapa keistimewaan yang diberikan kepada VOC? Selain VOC dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal, VOC mempunyai hak monopoli dan kedaulatan. Hak-hak istimewa yang tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tanggal 20 Maret 1602 meliputi berikut ini.

- a. **Hak monopoli** untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri;
- b. **Hak kedaulatan** (*soeveriniteit*) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk:
 - 1) memelihara angkatan perang,
 - 2) memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian,
 - 3) merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Belanda,
 - 4) memerintah daerah-daerah tersebut,
 - 5) menetapkan/mengeluarkan mata-uang sendiri, dan
 - 6) memungut pajak

5. Perluasan Politik Ekonomi VOC

Sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC adalah *Pieter Both*, kemudian menentukan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta (Jakarta) karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu-lintas perdagangan. Selain itu, bahwa kedudukan saingan utama Belanda, Portugis di Malaka, merupakan ambisi Belanda untuk menyingkirkannya.

Pangeran Jayakarta (penguasa bagian wilayah Banten) memberikan ijin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan ijin kepada VOC, Pangeran Jayakarta juga memberikan ijin

pendirian kantor dagang kepada EIC (Inggris). Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak suka kepada Pangeran Jayakarta.

Gubernur Jendral VOC **Jan Pieterszoon Coen** membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta, dan sekaligus memohon agar ijin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619 keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC mempunyai keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia, sekaligus VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya beberapa hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya.

Dalam menanamkan perluasan kekuasaan ekonomi di Indonesia, terdapat strategi yang sangat terkenal. *Pertama*, VOC menerapkan politik *divide et impera* (adu domba) apabila ada persengketaan politik kerajaan. Hal tersebut sangat menguntungkan, karena kekuatan bangsa Indonesia akan melemah. *Kedua*, VOC berhasil memiliki hak **ekstirpasi**, yakni hak untuk menghancurkan tanaman rempah-rempah agar produksinya tidak berlebihan. Sebab apabila produksi berlebihan, maka harga akan menurun. *Ketiga*, seperti yang terjadi di Maluku, VOC berhak melakukan pelayaran Hongi. **Pelayaran hong**i adalah pelayaran menggunakan perahu bercadik dengan menggunakan senjata lengkap, untuk patroli mengawasi pohon rempah-rempah yang ditanam rakyat, dan mencegah pedagang atau masyarakat lokal berhubungan dagang dengan bangsa lain selain bangsa Belanda.

Eksistensi VOC di Batavia telah berhasil merongrong kekuasaan kerajaan Banten. Campur tangan Belanda terlihat saat VOC menekan penguasa Banten Ranamenggala agar menyingkirkan Pangeran Jayakarta. Keberadaan VOC di Jayakarta merupakan ancaman serius bagi raja-raja lain khususnya di Jawa dan Nusantara. Pada masa itu terdapat kerajaan yang masih kuat, seperti Mataram di Jawa Tengah. Pada awalnya, hubungan antara Mataram dengan VOC bersifat saling menguntungkan. Dalam periode berikutnya, terjadi konflik antara Mataram-VOC, yang akan dibahas dalam bab tersendiri.

Dari uraian tersebut. menunjukkan bahwa Belanda dengan VOC-nya telah berhasil menguasai daerah Indonesia bagian barat, tengah, maupun

timur. Kepulauan Indonesia telah menjadi sasaran perluasan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa, salah satunya adalah Belanda (Nessel, 2021: 328).

C. Perjuangan Rakyat di Berbagai Daerah dalam Menentang Imperialisme dan Kolonialisme

Kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia menimbulkan berbagai konflik dengan rakyat Indonesia. Hampir di setiap daerah di Indonesia muncul perlawanan menentang VOC. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mencintai persahabatan tetapi lebih mengutamakan kemerdekaan. Perlawanan muncul di berbagai daerah seperti yang akan kita kaji pada uraian di bawah ini. Perlawanan tidak hanya ditujukan kepada bangsa Belanda, tetapi juga bangsa barat yang lain. Bagaimana sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa-bangsa Barat? Mari kita simak bersama!

1. Perlawanan terhadap Portugis

a. Perlawanan Ternate

Perlawanan di Maluku diawali oleh perlawanan **Dajalo** dari Ternate dengan bantuan kerajaan Ternate dan Bacan. Ternate dan Tidore yang awalnya bersaing, namun kemudian menyadari bahwa keberadaan Portugis sangat membahayakan mereka. Dajalo belum berhasil mengusir Portugis. Perlawanan berikutnya dilanjutkan oleh Sultan Khairun, dan pada tanggal 27 Februari 1570 terjalin kesepakatan damai dengan Portugis. Selanjutnya Portugis mengingkari kesepakatan damai, bahkan Sultan Khairun dibunuh. Sultan Baabullah Daud Syah segera melanjutkan perlawanan, dan berhasil mengusir Portugis dari Maluku tahun 1575. Selanjutnya Portugis berpindah ke Timor Leste (Timor-Timur) dan Flores (Meng dan Silva, 2022: 94–95).

b. Perlawanan Demak

Akibat dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Oleh karena itu, Sultan Demak R. Patah mengirim pasukannya di bawah Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Pati Unus melancarkan serangannya pada tahun 1512 dan 1513. Serangan ini belum berhasil. Kemudian pada tahun 1527, tentara Demak kembali melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanarkan pengaruhnya di Sunda Kelapa. Di bawah pimpinan Fatahillah tentara Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta.

c. Perlawanan Aceh

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1639) armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu wilayah Kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629 Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Namun demikian Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka.

2. Perlawanan terhadap VOC

Tindakan VOC yang sombong dan sewenang-wenang menyebabkan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Walaupun beberapa upaya mengusir Belanda dari Indonesia belum berhasil, namun perjuangan ini akan menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam masa selanjutnya dalam mengusir penjajah. Berikut ini kita kaji beberapa perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam mengusir VOC.

a. Maluku

Kakiali dan Talukabesi dari kerajaan hitu memimpin perjuangan mengusir Belanda di Maluku tahun 1635–1646. Walaupun perjuangan tersebut belum berhasil, tetapi telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak menyukai penjajahan. Pada tahun 1667 Tidore, sebagai kerajaan terkuat di Maluku juga mengakui kekuasaan VOC. Kekuasaan Belanda di Indonesia timur semakin tegas dengan dikuasainya Maluku.

b. Makassar

Setelah Maluku jatuh, ancaman VOC di Indonesia Timur tinggal kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Gowa adalah kerajaan yang kuat dan mempunyai armada sangat besar. Terjadi sebuah perselisihan antara Arung Palaka dari kerajaan Bone dengan raja Gowa. VOC memanfaatkan perselisihan tersebut dengan memberikan dukungan kepada Arung Palaka. berhasil memanfaatkan Arung Palaka untuk menyerang Gowa tahun 1666. Pihak Belanda dengan bantuan Arung Palaka memenangkan pertempuran, dan Sultan Hassanuddin dari kerajaan Gowa dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya 18 November tahun 1667.

Perjanjian Bongaya baru terlaksana tahun 1669, karena Sultan Hassanuddin masih melakukan perlawanan kembali. Akhirnya Makassar harus merelakan benteng di Ujungpandang kepada VOC. Sejak masa itu tidak ada

lagi kekuatan besar yang mengancam kekuasaan VOC di Indonesia timur. Gorontalo, Limboto, dan negara-negara kecil Minahasa lainnya telah takluk pada VOC. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, yang isinya: VOC mendapatkan wilayah yang direbut selama perang, Bima diserahkan kepada VOC, Kegiatan pelayaran para pedagang Makasar dibatasi di bawah pengawasan VOC, Penutupan Makasar sebagai Bandar perdagangan dengan bangsa Eropa, selain VOC, dan monopoli oleh VOC, Alat tukar/mata uang yang digunakan di Makasar adalah mata uang Belanda, Pembebasan cukai dan penyerahan 1500 budak kepada VOC. Perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Gowa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC (de Zwart, 2022: 177).

b. Mataram

Mataram merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di pulau Jawa. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Belanda telah mendirikan kantor dagang di Jakarta (Batavia). Keberadaan VOC di Belanda, sangat membahayakan Mataram. Selanjutnya terjadi perselisihan antara Mataram-Belanda karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618 Gubernur Jendral VOC *Jan Pieterzoon Coen* memerintahkan *Van der Marct* menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut yang memperuncing perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan *pertama* dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin *Tumenggung Baurekso* tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Kemudian disusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul, dan kedua bersaudara yakni Kiai Dipati Mandurejo dan Upa Santa.

Serangan pertama gagal, pasukan ditarik ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Tidak kurang 1000 prajurit Mataram gugur dalam perlawanan tersebut. Mataram segera mempersiapkan serangan *kedua*, dengan pimpinan ***Kyai Adipati Juminah, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya***. Persiapan dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat. Persiapan pengepungan secara total terhadap Batavia dilakukan. Serangan dimulai tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Serangan kedua inipun gagal. Selain karena faktor kelemahan pada serangan pertama, lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda.

c. Banten

Banten mencapai jaman keemasan pada maasa **Sultan Ageng Tirtayasa**. Beliau sangat bersimpati dengan perjuangan untuk mengusir Belanda yang ditunjukkan dengan pemberian bantuan amunisi senjata kepada Trunojoyo yang melawan Belanda di Mataram. Perlawanan Banten terhadap Belanda terjadi sejak awal Belanda menginjakkan kaki di Banten. Perlawanan terbesar adalah yang dilakukan **Sultan Ageng Tirtayasa** tahun 1656. Kerajaan Banten berhasil menguasai sejumlah kapal VOC, dan beberapa pos penting. Perlawanan ini diakhiri perjanjian damai tahun 1669.

Pada tahun 1680 Sultan Ageng kembali mengumumkan perang setelah terjadi penganiayaan terhadap para pedagang Banten oleh VOC. Sayang sekali di Banten terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dengan putra mahkota Sultan Haji. Belanda memanfaatkan perselisihan antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Belanda mendukung Sultan Haji, karena lebih mudah dipengaruhi untuk membantu kepentingan dagang Belanda. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa digulingkan, dan Sultan Haji menjadi Raja Banten.

Pada tahun 1682 Sultan Haji terpaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda yang isinya: VOC berhak atas monopoli perdagangan, orang-orang Eropa saingan VOC harus diusir, Banten menanggung semua ganti rugi perang, Banten merelakan Cirebon kepada VOC, VOC berhak turut campur dalam setiap urusan kerajaan Banten. Tahun 1695 kemerdekaan kerajaan Banten telah diambil oleh VOC. Sultan Haji baru sadar, bahwa tindakannya sangat merugikan kepentingan rakyatnya sendiri. Kerajaan Banten-pun semakin lemah, dan kedudukan Belanda di Jawa semakin kuat.

D. Bubarnya VOC Sebagai Imperium Pertama (1602–1799)

Sejak tahun 1602, VOC merupakan pengaruh besar perdagangan di Indonesia. Hingga akhir abad XVIII, VOC berhasil menanamkan kekuasaan di berbagai wilayah. Usaha-usaha VOC bukanlah tanpa menghadapi tantangan dan perlawanan. Kekuasaan kerajaan-kerajaan besar dan kecil masih merupakan ancaman serius VOC. Untuk meluaskan hegemoni, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang (militer). Beberapa gubernur jendral seperti Antonio van Diemen (1635–1645), Johan Maatsuyeker (1653–1678), Rijklof van Goens (1678–1681), Cornelis Janzoon Speelman (1681–1684), merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC.

Selama abad XVII, VOC memusatkan perhatian pada dua tempat. *Pertama*, Maluku tempat kekuasaan Belanda yang semakin kokoh. *Kedua*, Jawa tempat dimana terjadi peristiwa-peristiwa yang juga akan membuka jalan bagi dijalankannya intervensi ke beberapa kerajaan. Hingga akhir abad XVIII VOC masih menghadapi kerajaan-kerajaan Jawa, terutama Mataram.

Keberadaan VOC di Indonesia ternyata tidak serta-merta membawa keuntungan besar bagi pemerintah Belanda. Eksploitasi/pengurusan kekayaan bangsa Indonesia lebih banyak masuk dalam pribadi dan kelompok. Hal inilah sebagai salah satu pemicu VOC gulung tikar (Gelman Taylor, 2020: 300).

Beberapa penyebab kebangkrutan VOC:

1. Skandal korupsi yang merajalela para pegawai VOC.
2. Lemahnya manajemen/pengelolaan sehingga terjadi pemborosan keuangan.
3. Perlawanan dari berbagai kerajaan di Indonesia, ancaman Inggris (EIC) dan Perancis menguras perhatian dan keuangan VOC.
4. Perang Inggris IV (1780–1784) di Eropa membuat VOC terpisah dari induknya (pemerintah Belanda). VOC banyak mengeluarkan biaya untuk memperkuat armada militer guna menghadapi Inggris. Karena inilah VOC banyak menanggung hutang.
5. Di Eropa, pada bulan Desember 1794/Januari 1795 Perancis mengalahkan Belanda, dan berhasil membentuk pemerintahan boneka Perancis. Peristiwa ini yang menandai berubahnya kerajaan Belanda menjadi Republik Bataaf (Bataafse Republiek).

Komisi yang menyelidiki kebangkrutan VOC akhirnya menyimpulkan bahwa VOC sudah sulit untuk dipertahankan. Akhirnya pada pergantian tahun 1799 ke 1800 VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan Pemerintah Belanda, berdasarkan pasal 247 Konstitusi 1798. Status Republik Bataaf hanya sampai tahun 1806. Napoleon Bonaparte (Kaisar Perancis) mengembalikan Republik Bataaf ke bentuk kerajaan Belanda. Indonesia merupakan bagian pemerintahan kerajaan Belanda yang dipimpin seorang Gubernur Jendral. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia terutama didorong oleh kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Mereka sangat membutuhkan komoditi perdagangan berupa rempah-rempah yang sangat mahal di Eropa. Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia menyebabkan terjadinya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia.

Perjalanan bangsa-bangsa barat juga didorong merkantilisme, kapitalisme, dan revolusi industri di Eropa. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan penguasa Turki Islam tahun 1453 memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalan lain mendapatkan rempah-rempah.

Didukung oleh semangat Tiga G (Gold, Glory, dan Gospel) bangsa-bangsa Barat berhasil mencapai dunia timur termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan mereka karena awalnya hanya untuk berdagang. Tetapi perdagangan tersebut kemudian bergeser terhadap usaha bangsa-bangsa Barat menguasai wilayah Indonesia di berbagai daerah. Dampaknya adalah munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah.

Politik adu domba *divide et impera* menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah. Satu demi satu kerajaan di Indonesia jatuh dalam cengkeraman bangsa Barat. VOC adalah persekutuan dagang Belanda yang paling besar menanamkan pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Persekutuan dagang ini akhirnya hancur pada akhir abad XVIII. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda langsung memerintah bangsa Indonesia. Kondisi ini semakin memperjelas keadaan bangsa Indonesia di bawah penjajahan Belanda.

BAB III

PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA

A. Ketentuan-Ketentuan Tanam Paksa

Tanam paksa atau **cultuur stelsel** adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Pada praktiknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian.

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar *Graaf* oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839.

Culturstelsel di Jawa dimulai pada tahun 1836 atas inisiatif seseorang yang berpengalaman dalam urusan tersebut yaitu Van Den Bosch yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola perkebunan di wilayah kekuasaan Belanda di Kepulauan Karibia. Tujuan Van Den Bosch yang dijadikan Gubernur Jenderal adalah “mentransformasikan pulau Jawa menjadi eksportir besar-besaran dari produk-produk agraria, dengan keuntungan dari penjualannya terutama mengalir ke keuangan Belanda. Tujuan Van Den Bosch dengan sistem *cultuurstelsel* di Jawa itu adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang menjadi permintaan di pasaran dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut Bosch menganjurkan pembudidayaan berbagai produk seperti kopi, gula, indigo (nila), tembakau, teh, lada, kayumanis, jarak, dan lain sebagainya. Persamaan dari semua produk itu adalah bahwa petani dipaksakan oleh pemerintah kolonial untuk memproduksinya dan sebab itu tidak dilakukan secara voluter (Fasseur, 1992: 239).

Sedangkan ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam paksa sebagaimana tercantum dalam *staatsblad* tahun 1834 Nomor 22 yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekurangrajinan atau ketekunan pada pihak rakyat.
7. Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanaman tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka, sedangkan

pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya (Sutjipto, 1977: 76–77).

Jika diamati dari segi isi *staatsblad* tersebut, maka Sistem Tanam Paksa tidak begitu memberatkan pada penduduk. Namun demikian dalam pelaksanaannya ternyata telah mengakibatkan kesengsaraan yang berkepanjangan kepada rakyat. Dampaknya cukup destruktif menjadikan rakyat miskin dan tidak teratur hidupnya. Penduduk selalu terbebani oleh perilaku-perilaku pemimpin-pemimpin mereka yang memaksakan rakyat untuk taat terhadap peraturan yang ditetapkannya. Fenomena ini diakibatkan noleh adanya penyimpangan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *staatsblad* yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Penduduk lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman berkualitas ekspor, sehingga tidak dapat mengerjakan sawahnya dengan baik, bahkan dalam suatu waktu tidak dapat mengerjakan sawahnya sama sekali. Bahkan penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Penduduk menyediakan tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima dari lahan garapan, bahkan sampai $\frac{1}{2}$ atau seluruhnya digunakan untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Tanah juga dipilih pada lahan yang subur, sementara padi hanya bisa ditanam di sisa lahan yang kurang subur. Apabila penduduk gagal panen tanaman wajib, tetap menjadi tanggung jawab penduduk. Demikian pula lahan yang disediakan untuk tanaman wajib itu masih tetap dikenakan wajib pajak. Sedangkan setelah panen, apabila penduduk menyerahkan hasil panennya melebihi dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dikembalikan kepada rakyat.

B. Pelaksanaan Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825–1830), dan Perang Padri di Sumatera Barat (1821–1837), Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan.

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke

Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar dunia sedang membubung, dibudidayakan.

Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini berhasil luar biasa. Karena antara 1831–1871 Batavia tidak hanya bisa membangun sendiri, melainkan punya hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di Kerajaan Belanda. Umumnya, lebih dari 30 persen anggaran belanja kerajaan berasal kiriman dari Batavia. Pada 1860-an, 72% penerimaan Kerajaan Belanda disumbang dari *Oost Indische* atau Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung, Batavia menjadi sumber modal. Misalnya, membiayai kereta api nasional Belanda yang serba mewah. Kas kerajaan Belanda pun mengalami surplus. Badan operasi sistem tanam paksa *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) merupakan reinkarnasi VOC yang telah bangkrut.

Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakin berkurang, dan harganya pun melambung. Pada tahun 1843, muncul bencana kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah, tahun 1850. Sistem tanam paksa yang kejam ini, setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi diluar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915.

Menurut penelitian Prof. Fasseur dari Universitas Leiden, pada tahun 1884 sekitar 75.5 % penduduk Jawa dikerahkan dalam *cultuurstelsel* atau tanam paksa. Penduduk di Karesidenan Batavia dan daerah kesultanan di Jawa Tengah atau *Vortsenlanden* tidak mengambil bagian dalam sistem tersebut. Jumlah tersebut kemudian berfluktuasi tetapi tidak turun secara drastis karena pemerintah Hindia Belanda berusaha mempertahankan eksistensi tanah untuk tanaman komoditi ekspor. Kemudian pada tahun 1850, umpamanya jumlah

tersebut telah menurun menjadi 46%, tetapi ditahun 1860 naik lagi menjadi 54.5%. Kendatipun demografi belum muncul pada masa ini, dan data kependudukan yang diperoleh dari laporan-laporan para pejabat Belanda sering simpang siur, namun dapat dikatakan bahwa sistem *cultuurstelsel* ini jelas-jelas telah mengakibatkan dampak yang destruktif bagi penduduk Jawa. Luas tanah garapan yang digunakan untuk sistem itu menurut perhitungan, pada tahun 1840 hanya 6% saja. Pada tahun 1850 menurun menjadi 4%, dan pada tahun 1860 naik lagi sedikit menjadi 4.5%.

Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda untuk masing-masing tanaman. Tebu (untuk gula) memerlukan tanah persawahan yang baik, karena tebu membutuhkan irigasi yang lancar. Tetapi kopi justru memerlukan tanah yang agak tandus (*woeste gronden*). Yang tidak dapat digunakan untuk persawahan, terutama dilereng-lereng gunung. Indigo membutuhkan daerah yang padat penduduknya. Pada dasarnya sistem ini membawa perubahan pada sistem kepemilikan tanah. Karena penyelenggaraannya dilakukan per desa, maka tanah-tanah juga dianggap milik desa, bukan milik perorangan (Fasseur 1992: 28,29).

Prof. Fasseur berhasil membuat kalkulasi mengenai berbagai komoditi yang ditanam tahun 1830 dan membawa hasil sekitar tahun 1840 (Fasseur 1993: 34). Dalam waktu sepuluh tahun (1830–1840) semua karesidenan (18 buah) di Jawa telah terserap dalam sistem ini (kecuali karesidenan Batavia). Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki. Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki di Jawa Timur. Tetapi produksi kopi terbesar berasal dari karesidenan-karesidenan Priangan (Jawa Barat), Kedu (Jawa Tengah), Pasuruan dan Basuki (Jawa Timur).

Dalam jangka waktu yang sama gula telah berhasil diusahakan di 13 karesidenan. Pusatnya terutama di Jawa Timur, yaitu karesidenan-karesidenan Surabaya, Pasuruan, dan Basuki (dalam tahun 1840 produksi dari wilayah ini mencapai hampir 65%). Selain itu terdapat gula pula dikaresidenan-karesidenan Japara, Semarang, Pekalongan, dan Tegal (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat). Dalam jangka waktu yang sama pula Indigo berhasil diusahakan di 11 karesidenan, Tetapi produksi utama berasal dari dua karesidenan di Jawa Tengah, yaitu Bagelan dan Banyumas, yang menghasilkan 51%. Juga di Cirebon dan Pekalongan ada diusahakan sedikit indigo. Tembakau yang diusahakan melalui *cultuurstelsel* dilakukan di Karesidenan

Rembang dan sekitar Pacitan (Jawa Tengah). Sedangkan kayumanis diselenggarakan di Karawang (Jawa Barat).

Dalam penyelenggaraan *cultuurstelsel* pihak Belanda berusaha agar sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengan petani. Sebab itu penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupati dengan para kepala desa, dan masyarakat desa sendiri. Kepentingan pemerintah hanya pada hasilnya, yang dihitung dalam *pikol* (± 62 kg) yang diterima oleh gudang-gudang pemerintah. Selain itu penyelenggaraannya juga bervariasi dari satu tempat ketempat lain karena pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan penguasaannya kepada para pejabat Belanda setempat (para kontrolir) yang mempunyai motivasi untuk meningkatkan produksi karena mereka memperoleh “*cultuurprocent*” prosentase tertentu dari hasil panen. Untuk itu sampai tahun 1860 dikerahkan tidak kurang 90 orang kontrolir dan sekitar orang pengawas berkebangsaan Belanda.

Mobilisasi penduduk dilakukan sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam tatanan politik Mataram, yaitu apa yang oleh Belanda dinamakan “*beerdiensten*” (Djuliati Suryo, 1993). Yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan bayaran. Hak ini kemudian beralih pada Belanda yang sejak Perang Diponegoro dianggap sebagai penguasa, kecuali di Vortsenlanden. “Kapan saja pemerintahan membutuhkan tenaga rakyat, maka para bupati, sesuai dengan instruksi yang diberikan pada mereka, harus mengupayakan agar setiap desa menyediakan tenaga kerja secara adil.” Beberapa jumlah penduduk yang harus dikerahkan disetiap desa itu diserahkan sepenuhnya pada para bupati. Tetapi sesuai kebiasaan pula, hanya mereka yang memiliki hak atas penggarapan tanah (*sikep*) yang wajib memenuhi panggilan bupati tersebut. Ini pula sebabnya selama dilaksanakannya *cultuurstelsel*, diadakan pembagian tanah bagi penduduk yang tidak memiliki (numpang), sehingga kemudian muncul sikap-sikap baru yang wajib melaksanakannya “*beerdiensten*” pula (Fasseur, 1992: 30).

Tugas petani bukan sekedar menanam, tetapi juga memproses hasil panennya untuk diserahkan di gudang-gudang pemerintah. Pengangkutannya ke gudang-gudang tersebut adalah tugas petani pula. Terutama produksi kopi seluruhnya dalam tangan petani, dalam hal gula muncul pula pabrik-pabrik gula yang dikelola secara modern dengan modal asing (Fasseur, 1993: 33).

Penduduk mendapat bayaran untuk hasil kerjanya. Tetapi para ahli sejarah belum bisa memastikan bagaimana pemerintah menentukan tinggi

rendahnya upah itu. Maksud semula Van den Bosch adalah agar upah disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar, namun hal ini dianggap tidak praktis. Mungkin karena para petani belum memahami kaitan pekerjaan mereka dengan mekanisme pasar. Menurut penelitian Prof. R. Van Niel dari Universitas Hawaii, jumlah upah disesuaikan dengan jumlah pajak tanah (*land rent*) yang harus dibayar petani. Tetapi sejak semula Van den Bosch menginginkan agar upah yang diterima petani harus memungkinkan mereka “menikmatinya” dan itu berarti harus lebih banyak dari hasil pesawahan. Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain turut menentukan tinggi rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanah (sawah untuk tebu) tentu diperkirakan lebih tinggi pembayaran pajak tanahnya dibandingkan dengan tanah gersang untuk kopi. Masalah iklim, teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya, turut menentukan tinggi rendahnya upah. Dengan demikian upah bervariasi, bukan saja untuk masing-masing komoditi tetapi juga dari karesidenan-karesidenan (Fasseur, 1992: 42). Contoh yang diberikan oleh Prof. Fasseur mengenai masalah upah ini diambil dari dua komoditi yang berbeda, yaitu gula dan indigo (nila). Dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2 dibuat kalkulasi mengenai upah yang diterima per bulan dan upah yang diterima per keluarga (secara perkiraan).

Tabel 2.1. Upah Indigo (Nilai) Tahun 1840 dalam Gulden

Karesidenan	Per Bahu Perkiraan	Per Keluarga Perkiraan
Bagelen	65.13	12.73
Banten	11.20	0.117
Banyumas	75	17
Besuki	59.08	16.20
Cerebon	65.48	15.63
Jepara	26.40	4.75
Kediri	33.40	6.75
Madiun	43.30	8.95
Pekalongan	42.60	15.10
Priangan	16.80	3.45
Tegal	37.50	7.76
Jawa	60.97	12.69

Fasseur, 1992: 36.

Dengan demikian, salah satu dampak dari *cultuurstelsel* adalah masuknya ekonomi uang di pedesaan. Penduduk membayar pajak tanah (*land rent*) yang diintroduksi oleh Raffles dengan uang. Kenyataan ini saja sudah menunjuk adalah perubahan dalam kehidupan pedesaan. Suatu masalah yang penting pula adalah apa yang dinamakan “*cultuur procent*” (Fasseur, 1993: 46–50), yaitu jumlah persentase yang diterima para pejabat Belanda maupun sesuai dengan produksi yang diserahkan pada gudang-gudang pemerintah. Jumlah itu tidak jarang jauh lebih besar dari gaji yang diterima. Van den Bosch sengaja menambah hal ini untuk mendorong para pejabat tersebut bekerja keras. Lagi pula cara itu juga sudah dipakai dalam *Preangerstelsel*. Dengan demikian, cara ini sesungguhnya bukan ciptaan Van den Bosch.

“*Cultuur procenten*” ternyata membawa dampak yang kurang baik dalam korps kepegawaian Belanda karena menimbulkan perbedaan pendapatan yang mencolok antara mereka yang terlibat dengan *cultuurstelsel* dan yang tidak dan antara mereka yang bekerja di daerah “kurus”. Ketidakpuasan pada pihak pejabat Belanda nampak dari permintaan untuk di pindahkan ke daerah lain. Contoh yang diberikan Fasseur untuk menjelaskan sistem *cultuur procent* ini diambil dari beberapa karesidenan untuk tahun 1850–1860 (dalam gilders).

Tabel 2.2. Kultur Persen yang Diterima Para Residen

Residen	Cultuur Procent
Bagelen	10.401
Banten	1.301
Banyumas	6.297
Besuki	7.152
Cirebon	7.543
Jepara	5.714
Kediri	4.905
Kedu	4.293
Madiun	4.165
Pasuruan	25.064
Pekalongan	3.123
Priangan	5.994
Probolinggo	10.599
Rembang	2.737
Semarang	5.977
Surabaya	14.213
Tegal	5.274

Fasseur, 1992: 47.

Perbedaan pendapatan dari *cultuur procent* dengan sendirinya juga berlaku di kalangan para bupati. Tetapi tidak mudah membuat suatu tabel lengkap mengenai hal ini. Contoh diberi Prof. Fasseur adalah untuk keempat Bupati Banten antara tahun-tahun 1858 hingga 1860 sebesar f2500 setiap tahun: sedangkan lima Bupati Priangan dalam jangka waktu yang lama menerima f90.000 setiap tahun. Pada jangka waktu itu juga para bupati di Pekalongan menerima f38.000 setiap tahun, dan keempat bupati di Rembang menerima f3.600 saja setiap tahun (Fasseur, 1992: 49). Berbeda dengan para residen, para bupati tidak bisa menuntut mutasi ke tempat lain, dan pemecatan bupati sangat jarang terjadi.

Suatu kenyataan bahwa secara keseluruhan para bupati menerima lebih banyak dari para residen. Untuk tahun 1858 hingga 1860 saja seluruh *cultuur procent* untuk para bupati adalah f800.000, sedangkan untuk jangka waktu tertentu yang sama disediakan untuk para residen hanya f250.000. Pertanyaan lain adalah berapa keuntungan diterima oleh pemerintah dari sistem pertanian tersebut. Sekali olahi perhitungan Prof. Fasseur bisa membantu memberi gambaran yang agak baik. Dengan mengambil tahun-tahun 1840 hingga 1849, ia sampai pada kesimpulan sebagai berikut.

Tabel 2.3. Keuntungan Pemerintah

Tahun	Kopi	Gula	Indigo	Batig Slot
1840—1844	40.227.637	8.217.907	7.835.77	20.421
1845—1849	24.549.042	4.136.060	7.726.362	519.661

Tahun	Kayumanis	Lada	Teh	Batig Slot
1840 —1844	151.310	132.744	514.394	39.341.651
1845 —1849	171.798	56.548	1.666.496	35.056.820

Dengan demikian bagi pemerintah Belanda keuntungan paling besar datangnnya dari kopi. Antara tahun 1840—1849 saja mereka memperoleh sekitar 65 juta gulder dari penjualan komoditi yang paling banyak diproduksi di Priangan itu. Sedangkan dalam jangka waktu yang sama indigo hanya membawa keuntungan sebesar 15 juta gulder. Menurut Fasseur keuntungan yang demikian besar dari kopi disebabkan harga jualnya memang tinggi tetapi harga belinya sangat rendah (Fasseur 19921: 36). Kemudian gula juga menjadi komoditi ekspor yang besar setelah kopi. Tetapi gula baru menjadi primadona setelah tahun 1870 berdasarkan Undang-Undang Gula (1870) modal swasta

diperkenankan memasuki perkebunan tebu. Indigo atau Nila yang dalam masa *cultuurstelsel* tidak terlalu jauh berbeda dari gula itu, kemudian mengalami kemerosotan sehingga tidak berarti. Demikian pun komoditi-komoditi lainnya terdesak sama sekali setelah tahun 1870.

Sebab itu menunggu perhitungan-perhitungan yang lebih lengkap, dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari Van den Bosch telah tercapai. Keruntuhan keuangan Belanda disebabkan berbagai macam peperangan yang harus dibiayai (terutama dalam perang Napoleon), telah dapat diatasi melalui *cultuur stelsel*. Maka ungkapan yang kemudian muncul bahwa “*Java is de kuruk waarop Nederland drift*” (Jawa adalah gabus yang membuat Belanda bisa mengembang)” tidak terlalu meleset.

Maka tidak mengherankan pula kalau kemudian setelah krisis keuangan negara Belanda dapat diatasi, muncul suara-suara sejak pertengahan abad ke-19, terutama dari kalangan liberal, yang menuntun dihapusnya sistem itu dan menggantikannya dengan model swasta dan kerja bebas (*free labor*). Salah seorang intelektual yang paling terkemuka dari kalangan ini adalah Pendeta Van Baron Heoveel yang paling mendesak di *Tweede Kamer* (DPR) agar dikeluarkan undang-undang penghapusan *cultuurstelsel*. Dalam tahun-tahun 1860-an desakan itu makin kuat. Perubahan nyata muncul ketika pemerintah konservatif yang mendukung sistem *cultuurstelsel* itu jatuh pada tahun 1860. Pemerintah baru yang dibentuk oleh kaum liberal sejak tahun 1862 mulai mengadakan perubahan-perubahan mendasar sehingga akhirnya menjelang abad ke-20 seluruh sistem itu lenyap samasekali digantikan oleh sistem yang lain.

Dalam gambaran yang komprehensif, pelaksanaan Sistem Tanam Paksa mengalami banyak penyimpangan-penyimpangan yang serius. Penyimpangan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa tersebut lebih banyak diakibatkan oleh adanya *cultuur-procenten*, sehingga para pengawas tanam paksa yang menyetorkan tanaman wajib akan mendapatkan imbalan. Dampaknya, semua pengawas berusaha menyetorkan hasil produksi sebanyak-banyaknya dengan memeras rakyat. Akhirnya yang menjadi sapi perahan adalah rakyat yang tidak memiliki otoritas dalam menetapkan hasil panen tanamannya. Ditambah lagi dengan sikap-sikap para kepala desa yang lebih sering menjadi kaki tangan pemerintah kolonial, sehingga kebijakannya seenaknya dalam menetapkan luas lahan penduduk yang akan digunakan untuk areal penanaman wajib, berapa penduduk yang harus bekerja sebagai buruh,

termasuk menetapkan berapa hasil produksi yang harus dibayar oleh penduduk.

Ketimpangan yang diwujudkan oleh pelaksanaan politik tanam paksa ini mulai mendapat perhatian di Belanda, dimana hal ini berhubungan dengan kemunculan gerakan liberal di negeri induk tersebut. Secara umum mereka dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu golongan humanis dan golongan kapitalis. Golongan humanis mengatakan bahwa Sistem Tanam Paksa harus segera dihapuskan karena telah banyak menindas dan menyengsarakan penduduk di tanah jajahan. Dalam terminologinya, padahal tanah jajahan telah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Dengan demikian, perlu diupayakan perbaikan-perbaikan nasib rakyat tanah jajahan. Sementara golongan kapitalis beranggapan bahwa Sistem Tanam Paksa tidak menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat. Sistem Tanam Paksa memperlakukan rakyat tanah jajahan sebagai objek bukannya melibatkannya dalam kegiatan ekonomi yang menambah ruwetnya sistem perekonomian Hindia Belanda.

Cultuur stelsel menekankan bahwa penduduk wajib menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah. Adapun hasil bumi yang dimaksudkan berupa hasil bumi untuk ekspor sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. Penduduk diwajibkan menyerahkan 1/5 dari hasil panen utamanya atau sebagai penggantinya 1/5 dari waktu kerjanya dalam satu tahun. Ketentuan tersebut sangat memberatkan rakyat sehubungan dengan pengaturan waktu kerja dan penyerahan hasil panen yang ditentukan oleh atasan-atasan mereka, sementara mereka tidak berhak untuk membantahnya.

Sementara itu dengan dijalankannya *cultuur stelsel* berarti bahwa kaum bangsawan feodal harus dikembalikan kepada posisinya yang lama, sehingga otoritas dan pengaruh mereka dapat dipergunakan untuk menggerakkan rakyat, memperbesar produksi dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diminta oleh pemerintah. Meskipun kekuasaannya selalu diawasi oleh pemerintah dan ditempatkan di bawah kekuasaan pegawai-pegawai Belanda, namun secara umum yang paling mudah berhubungan langsung dengan penduduk adalah mereka para pemimpin desa. Dengan demikian, pada sistem ini diterapkan sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu sistem pemerintahan dimana pemerintah kolonial Belanda tidak berhubungan langsung dengan rakyat, melainkan melalui perpanjangan tangan pribumi yakni mereka para penguasa pribumi atau pemimpin-pemimpin lokal. Kepala-kepala pribumi itu adalah

pelaksana-pelaksana yang diperintahkan dari atas. Tugas mereka kebanyakan menjadi pengawas-pengawas perkebunan.

Dalam rangka mengikat para penguasa lokal ini, pemerintah Belanda tidak hanya mengembalikan kekuasaan mereka saja, melainkan juga meningkatkan prestise mereka dengan gaji berupa tanah yang akan memberi mereka tenaga kerja dan penghasilan lain yang dihasilkannya. Di samping itu, Van Den Bosch menerapkan sistem persentase yakni hadiah bagi petugas yang berhasil menyerahkan hasil tanaman yang melebihi dari yang ditentukan. Namun yang menjadi permasalahan lanjut adalah bahwa kebijakan tersebut menjadi sumber dan ladang korupsi serta penyelewengan-penyelewengan yang merugikan rakyat. Sistem persentase dianggap sebagai legalisasi pemerintah kolonial terhadap segala bentuk pemerasan seperti luas tanah yang diusahakan pemerintah tidak terbatas, wajib kerja penduduk melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, tanaman wajib, pajak-pajak, dan kerja wajib tidak dihapus. Sementara hasil dari kebijakan *cultuur stelsel* sangat memuaskan dan menguntungkan pemerintah Belanda. Antara tahun 1831 dan 1877, pemerintah induk menerima dari daerah-daerah jajahan sebesar 823 juta Gulden. Sistem tersebut di samping mendatangkan keuntungan finansial terhadap keuangan negeri induk, juga telah mendorong memajukan perdagangan dan pelayaran Belanda (Kartodirdjo, 1990: 15).

Pada tahun 1848, Sistem Tanam Paksa mendapat kritikan melalui perdebatan di Parlemen Belanda. Perdebatan terjadi antara golongan liberal dengan golongan konservatif, seputar evaluasi penerapan sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila masalah-masalah perekonomian diserahkan kepada pihak swasta. Dengan demikian, pemerintah kolonial hanya memungut pajan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam urusan perdagangan hasil bumi di tanah jajahan. Berbeda dengan kaum liberal, kaum konservatif tetap berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi ditangani langsung oleh pemerintah. Pemerintah harus campur tangan dalam pemungutan hasil bumi di tanah jajahan. Bagi kaum konservatif, Hindia Belanda dianggap belum siap untuk menerima kebijakan politik liberal. Dari perdebatan kedua golongan tersebut, golongan liberal menang dan dapat meluruskan sistem pemerintahan di tanah koloni. Dua orang sebagai pembela nasib penduduk koloni adalah Douwes

Dekker dan Baron Van Hoevell. Dalam mkaryanya yang berjudul “Max Havelar”, Douwes Dekker membentangkan kekejaman sisten tanam paksa. Sementara Fransen Van Der Putte juga menulis *Zuker Contracten*, yang juga banyak mengkritik ketidakadilan dalam sistem tanam paksa.

Berkat kecaman dan kegigihan kaum liberal tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda menghapuskan sistem tanam paksa, melainkan tidak sekaligus melainkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Proses penghapusan sistem tanam paksa secara bertahap yakni: pertama kali penghapusan sistem tanam paksa lada pada tahun 1860. Penghapusan tanam paksa untuk teh dan nila pada tahun 1865, dan pada tahun 1870 hampir semua jenis tanaman paksa sudah dihapuskan, kecuali tanaman paksa kopi di priangan.

C. Tanam Paksa di Luar Jawa

Selain di Jawa, *cultuur stelsel* juga dijalankan di luar Pulau Jawa meskipun dalam skala yang tidak sebanding dengan di pulau Jawa. Sejak tahun 1822 di Minahasa telah dilaksanakan *cultuur stelsel* untuk tanaman kopi. Sistem tanam paksa di daerah ini berlangsung cukup lama, sampai dihapuskannya pada tahun 1899. Sementara di Sumatera Barat pada tahun 1847 pasca Perang Padri, juga diselenggarakan *cultuur stelsell* untuk tanaman kopi yang baru dihapus pada tahun 1908. Sedangkan di Madura juga dijalankan *cultuur stelsel* untuk tanaman tembakau. Di samping itu, di Maluku juga sistem ini dijalankan bahkan sejak masa VOC, yakni untuk tanaman cengkeh di Kepulauan Ambon, dan pala di kepulauan Banda. Sistem tanam paksa di kepulauan Maluku ini baru dihapuskan pada tahun 1860. Dengan demikian, meskipun secara umum dikatakan bahwa sistem tanam paksa berlangsung dari tahun 1830-1870, tetapi dalam praktik yang sesungguhnya bahwa sistem tersebut telah berlangsung jauh sebelum tahun 1830, dan berakhir secara total pada awal abad ke-20. Ini dapat dijadikan referensi baru bahwa melihat sejarah tanam paksa harus ditampilkan secara utuh mengingat kompleksnya kajian sistem ini baik secara makro maupun mikro.

Pada masa VOC, Minahasa telah terkait dengan pola-pola pelayaran niaga VOC yakni sebagai daerah pemasok beras. Kewajiban sebagai pemasok beras ini beru dihentikan pada tahun 1852. Sementara itu di daerah ini pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan sistem tanam paksa semenjak tahun 1822. Daerah yang paling cocok untuk budi daya kopi waktu itu adalah di Dataran Tinggi Tondano yang sesuai dengan ekologi kopi. Wilayah tersebut

merupakan bagian dari Minahasa yang penduduknya tergolong padat. Dengan potensi tenaga kerja yang banyak di wilayah ini, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan mobilisasi tenaga kerja secara tradisional baik yang diperlukan untuk penanaman kopi itu sendiri, maupun untuk membangun prasarannya. Tanaman kopi lebih banyak dibudidayakan di distrik Romboken dan meluas ke distrik-distrik sekitarnya seperti Tomohon, Kawanokoan, dan Sonder (Schouten, 1993: 51-72).

Untuk pembudidayaan kopi, lahan-lahan yang dimanfaatkan adalah tanah *kalekeran*, yaitu suatu tanah milik distrik yang kosong dan tidak digarap oleh penduduk karena keadaan tanahnya kurang baik untuk kebun atau persawahan. Pembukaan lahan-lahan *kalekeran* ini sangat memberatkan penduduk karena letaknya yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Dalam hal lain upah yang diberikan juga tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Setiap *pikol* pemerintah Belanda hanya membayar f 10, padahal setiap keluarga hanya dapat menghasilkan satu *pikol* belum lagi dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dijalankan oleh para petugas lapangan dalam menimbang kopi. Dalam hal lain, penduduk juga dibebani oleh biaya pengangkutan, dimana pengangkutan kopi ke gudang-gudang pemerintah yang berada di wilayah pantai cukup jauh, padahal mereka harus dengan memikulnya. Baru sejak tahun 1851 pemerintah membuka gudang-gudang di daerah pegunungan, sehingga pekerjaan penduduk menjadi lebih ringan. Sedangkan pengangkutan dari gudang-gudang pegunungan ke gudang-gudang di daerah pantai dilakukan oleh para pekerja yang diberi upah (Leirissa, 1996: 62).

Namun demikian, dalam rangka memperlancar proses pengangkutan kopi, penduduk tetap terbebani untuk membangun prasarana yang terkikat secara tradisional. Maka semenjak tahun 1851 jalan-jalan dan jembatan penghubung daerah pegunungan dengan daerah pantai mulai dibangun. Dalam pelaksanaannya, penduduk diharuskan bekerja secara bergiliran dan sukarela tanpa upah. Sehingga sewaktu-waktu, mereka harus siap dipanggil untuk bekerja dalam pembuatan sarana dan prasarana. Pada umumnya mereka dipimpin oleh pemimpin tradisional mereka yaitu para *kepala walak* yang memiliki otoritas tradisional untuk memerintah setiap warga yang berada di bawah pimpinannya. Pekerjaan tersebut seringkali membawa kesengsaraan kepada rakyat karena letak proyek-proyek tersebut jauh dari desa tempat tinggal mereka, atau dapat pula pada lokasi-lokasi yang sangat sulit, sehingga mengancam keselamatannya. Pekerjaan unum tersebut juga sangat

membebankan dan memberatkan karena pada suatu ketika penduduk harus memanen tanaman untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, mereka dapat panggilan untuk kerja bakti membangun sarana umum tersebut.

Jika dibandingkan dengan kopi Jawa, baik dari segi ekonomi maupun kualitas, hasilnya tidak terlalu rendah. Bahkan banyak para pejabat Belanda yang secara langsung mengakui bahwa Kopi Menado jauh lebih baik ketimbang Kopi Padang. Malahan pada bagian kedua abad ke-19 Kopi Menado sempat mengungguli Kopi Jawa. Namun demikian dari segi kuantitas, produksi Minahasa jauh lebih rendah dibanding Kopi Padang yang rata-rata menghasilkan 191.000 pikul setiap tahun. Sedangkan Kopi Jawa lebih banyak lagi yakni dapat mencapai 2 juta pikul setiap tahunnya. Namun demikian, Minahasa telah memiliki sejarah sosial yang cukup berperan dalam pengayaan sejarah nasional, terutama masa diterapkannya sistem tanam paksa.

Semenjak tahun 1820 hingga tahun 1840, di Minangkabau kopi telah dibudidaya secara perorangan sebelum diberlakukannya *cultuur stelsel*. Sebagaimana halnya di Minahasa, di Minangkabau juga penanaman kopi dilakukan di daerah-daerah pegunungan. Lahan-lahan yang dipakai juga dalam kategori lahan tidur yang kurang produktif untuk pertanian lain. Karena sebagian besar kopi ditanam di daerah daerah pegunungan terutama lahan-lahan yang berada dalam kawasan hutan, maka kopi Minangkabau lebih sering dikenal sebagai “kopi hutan”. Seperti halnya di Minahasa, di Minangkabau juga penduduk dibebani dengan kerja tanpa upah untuk membangun sarana-sarana terutama jalan-jalan dan jembatan untuk keperluan pengangkutan kopi dari daerah pegunungan ke Padang. Sementara para pemimpin tradisional yang bertugas menggerakkan penduduk adalah para penghulu, sehingga dengan ikatan tradisional tersebut penduduk patuh pada atasannya.

Dalam penelitian Prof. Kenneth Young, disimpulkan beberapa penyebab atau faktor pendorong keberhasilan budi daya tanam kopi di Minangkabau. *Pertama* adalah kebijakan mengenai pemberian upah yang tidak membingungkan para petani, karena telah diatur dengan jelas. Harga per pikul ditetapkan f 20 atau sekitar 32 sen per kg, dan setelah dipotong berbagai ongkos yang harus dibayar, petani menerima f 4 per pikul atau 5 sen per kg. *Kedua* tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak yang dapat dikerahkan untuk keperluan penerapan budidaya tanam kopi tersebut. *Ketiga* adalah adanya tradisi dagang yang telah tertanam dan menjiwai masyarakat

Minangkabau yang menyebabkan orang terdorong untuk menjalankan pekerjaan yang menghasilkan uang (Young, 1988: 136–164).

Young dalam penelitiannya juga menyimpulkan sebab-sebab kegagalan dari penerapan sistem ini. *Pertama* adalah habisnya lahan pertanian yang cocok untuk budi daya kopi sehingga tidak dapat dilakukan ekspansi secara terus menerus. *Kedua* adalah munculnya penyakit tanaman kopi yang sulit untuk di atasi, sehingga produksi semakin berkurang. *Ketiga* Perang Aceh yang berlangsung relatif lama sehingga banyak menguras perhatian pemerintah Belanda untuk menanganinya, sementara budidaya kopi menjadi kurang diperhatikan. *Keempat* adalah cara-cara pengelolaan yang kurang baik karena terbiasa dengan pola budidaya perseorangan yang telah berlangsung sebelum *cultuur stelsel* diterapkan.

Berikut ini adalah tabel hasil analisis Young yang menggambarkan eksistensi kopi Minangkabau sejak tahun 1842 hingga 1906. Kalau selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 produksi kopi di Jawa terus meningkat, maka eksistensi kopi Minangkabau justru menunjukkan grafik yang sebaliknya, yakni telah terjadi penurunan sejak tahun 1886. Sementara di Minahasa keberadaannya berfluktuasi dengan beberapa puncak dalam tahun 1865 (sekitar 35.000 pikul) dan 1989 (sekitar 37500 pikul), kemudian sejak 1879 (35000 pikul), dan semenjak itu menurun dalam bentuk fluktuasi hingga pernah mencapai titik terendah pada tahun 1890 (100 pikul), dan pada saat penghapusan hanya mencapai sekitar 6.000 pikul.

Tabel 2.4 Penjualan Kopi dari Minangkabau 1842–1906 dalam jutaan kg.

Tahun	Terjual	Rata-rata Setahun
1842-1846	23.1	3.0
1847-1851	20.0	4.0
1852-1856	40.0	8.0
1857-1861	45.8	9.2
1862-1866	43.7	8.7
1867-1871	49.6	9.9
1872-1876	35.5	7.1
1877-1881	37.0	7.4
1882-1886	30.4	6.1
1887-1891	21.2	4.2
1892-1896	14.4	2.9
1897-1801	11.9	2.4
1902-1906	10.1	2.0

(Young, 1988)

D. Kritik Terhadap Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825–1830), dan Perang Padri di Sumatera Barat (1821–1837), Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan.

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihanannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar dunia sedang membubung, dibudidayakan (Rochadi, 2021: 260).

Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini berhasil luar biasa. Karena antara 1831–1871 Batavia tidak hanya bisa membangun sendiri, melainkan punya hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di Kerajaan Belanda. Umumnya, lebih dari 30 persen anggaran belanja kerajaan berasal kiriman dari Batavia. Pada 1860-an, 72% penerimaan Kerajaan Belanda disumbang dari *Oost Indische* atau Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung, Batavia menjadi sumber modal. Misalnya, membiayai kereta api nasional Belanda yang serba mewah. Kas kerajaan Belanda pun mengalami surplus.

Badan operasi sistem tanam paksa *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) merupakan reinkarnasi VOC yang telah bangkrut. Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakin berkurang, dan harganya pun melambung. Pada tahun 1843, muncul bencana kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan juga

melanda Jawa Tengah, tahun 1850. Sistem tanam paksa yang kejam ini, setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi diluar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915.

Cultuurstelsel ternyata membawa keuntungan yang sangat besar bagi para pemegang saham *Nederlandsche Handel-Maatschappij* dan tentunya juga raja Belanda- di negeri Belanda, Pemerintah Belanda serta pemerintah India Belanda. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan ekspor dari India-Belanda, terutama ke Eropa. Ekspor tahun 1830 hanya berjumlah 13 juta gulden, dan tahun 1840 ekspor meningkat menjadi 74 juta gulden. Penjualan hasil bumi tersebut dilakukan oleh NHM; keuntungan yang masuk ke kas Belanda -antara 1830 sampai 1840- setiap tahun sekitar 18 juta gulden, ini adalah sepertiga dari anggaran belanja Pemerintah Belanda.

Seorang mahasiswi Belanda, Annemare van Bodegom, pada tahun 1996 mengadakan penelitian untuk menyusun skripsinya. Ia menyoroti periode antara 1830 –awal diterapkannya *cultuurstelsel* oleh Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch (1830–1833) sampai tahun 1877. Keuntungan yang diraup Belanda —yang dinamakan *batig slot* atau surplus akhir— mencapai 850 juta gulden, yang antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Belanda seperti jalan kereta api, saluran air dll. Di sisi lain, *cultuurstelsel* ini membawa kesengsaraan dan bahkan kematian rakyat yang dijajah. Antara tahun 1849–1850 saja, tercatat lebih dari 140.000 orang pribumi meninggal sebagai akibat kerja dan tanam paksa. Apabila nilai 850 juta gulden dihitung dengan indeks tahun 1992, maka nilainya setara dengan 15,4 milyar gulden. Tak dapat dibayangkan, berapa keuntungan yang diraup oleh Belanda dari Indonesia antara 1602–1942 apabila dihitung dengan indeks tahun 2002.

Di atas kertas, teori *Cultuurstelsel* memang tidak terlalu membebani rakyat, namun dalam pelaksanaannya, *Cultuurstelsel* yang sangat menguntungkan Belanda, terbukti sangat merugikan petani terutama di Jawa dan mengakibatkan kesengsaraan dan kematian bagi rakyat banyak, sehingga *cultuurstelsel* tersebut lebih dikenal sebagai sistem tanam paksa, karena petani diharuskan menanam komoditi yang sangat diminati dan mahal di pasar Eropa, yang mengakibatkan merosotnya hasil tanaman pangan sehingga di beberapa daerah timbul kelaparan, seperti yang terjadi di Cirebon tahun 1844, di Demak tahun 1848 dan di Grobogan tahun 1849.

Sejak 1840, selama 60 tahun berikutnya nilai ekspor dari India-Belanda ke Belanda meningkat 10 kali lipat, dari 107 juta gulden menjadi 1,16 milyar gulden. Selama kurun waktu itu, juga terjadi perubahan komoditi ekspor; selain kopi, teh, gula dan tembakau, yang masih terus diekspor, kini ekspor bahan baku untuk industri seperti karet, timah dan minyak, menjadi lebih dominan. Seiring dengan perkembangan ekspor dan jenis ekspor, titik berat perkebunan pindah ke Sumatera Timur, di mana didirikan perkebunan-perkebunan besar, terutama untuk tembakau dan karet (de Zwart, 2021: 565-566).

Selain monopoli perdagangan komoditi “normal”, ternyata Belanda juga memperoleh keuntungan besar dari perdagangan opium (candu), yang kemudian juga dimonopoli oleh VOC dan penerusnya, Pemerintah India-Belanda. Semula impor opium dari Bengali pada tahun 1602 hanya sebanyak satu setengah peti, meningkat menjadi 2.000 peti pada tahun 1742. Keuntungan per peti dapat mencapai 1.800 sampai 2.000 gulden, dan agar penjualannya terjamin, Belanda juga mendorong pribumi untuk mengkonsumsi opium. Pada akhir abad 19, Konsulat Belanda di Singapura melaporkan, ekspor candu dari Bengali ke India-Belanda mencapai hampir 3.700 peti.

Ewald van Vugd, seorang wartawan dan penerbit berkebangsaan Belanda, pada 1985 menyoroti politik perdagangan opium Belanda yang dipaparkan dalam bukunya *Wetig Opium*. Menurut van Vugt, candu mulai menjadi sumber penghasilan utama Belanda sejak tahun 1743. Antara tahun 1848-1866, laba perdagangan candu mencapai 155,9 juta gulden, yakni 8,2% pemasukan total dari tanah jajahan, dan kontribusi pemasukan dari jajahan Belanda terhadap seluruh anggaran Belanda sebesar 12,5%! Antara tahun 1860-1915, laba candu meningkat 15 persen per tahun. Laba candu antara 1904-1940 sebesar 465 juta gulden! Tak heran apabila van Vugt tahun 1988 menerbitkan buku dengan judul yang menggemparkan, yaitu *Het dubbele Gezicht van de Koloniaal* (wajah ganda dari penjajahan), yang memuat sisi negatif penjajahan Belanda, seperti perdagangan candu, perdagangan budak, kerja paksa, kekerasan senjata dll.

Demikianlah wajah penjajahan Belanda waktu itu, demi keuntungan materi untuk para tuan besar, mereka mengorbankan rakyat di jajahan mereka, bahkan secara sistematis merusak mental dan kesehatan rakyat dengan menganjurkan untuk mengisap candu. Tidaklah mengherankan apabila

sekarang keluarga kerajaan Belanda termasuk keluarga paling kaya di dunia dan Belanda termasuk salah satu negara termakmur di Eropa Barat, berkat perdagangan budak, perdagangan candu, tanam paksa dan berbagai praktik pelanggaran HAM. Hal-hal yang sangat tidak manusiawi seperti ini, telah menggerakkan hati beberapa orang Belanda yang humanis, seperti Eduard Douwes Dekker, yang kemudian melancarkan kritik terhadap politik Pemerintah India-Belanda melalui berbagai tulisan, juga dalam bentuk roman dengan nama “Max Havelaar”, yang ditulis pada tahun 19860.

Namun kritikan yang dilontarkan tersebut tidak menyurutkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk membuat berbagai peraturan untuk menakut-nakuti rakyat jajahannya yang berniat membangkang. Pada tahun 1880 diberlakukan peraturan yang dinamakan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang memuat ancaman hukuman badan (kurungan dan pukulan) bagi kuli-kuli yang melanggar peraturan kerja. Tujuan utama Poenale Sanctie adalah menjamin tenaga buruh bagi majikan, juga membatasi kemerdekaan buruh untuk meninggalkan perkebunan tempat bekerja. Mohammad Hatta menunjuk buku tulisan H.F. Tillema yang berjudul “Kromo Belanda” yang berisi keluhan dan pengaduan tentang bagaimana Pemerintah Belanda melalaikan kesehatan rakyat. Hatta menunjukkan keadaan buruk di kalangan buruh, misalnya bahwa seorang kuli (buruh) di Sumatera dipaksa bekerja dengan kekerasan dan diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan Belanda. Pukulan-pukulan dengan rotan, penahanan melawan hukum, penelanjangan buruh yang dianggap salah oleh majikan merupakan kebiasaan pada waktu itu.

Poenale Sanctie yang kejam dan tidak berperikemanusiaan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia, dan memperpanjang daftar pelanggaran HAM oleh Belanda, serta meningkatkan kemarahan dan kebencian di kalangan bangsa Indonesia. Pers dan para pemimpin bangsa Indonesia mengecam Poenale Sanctie ini. Setelah gencar kritik dan kecaman di negeri Belanda sendiri, baru pada tahun 1924 Majelis Rendah Belanda mengajukan protes atas Poenale Sanctie tersebut, namun Poenale Sanctie baru dicabut tahun 1941, ketika Perang Dunia di Eropa telah dimulai dan ancaman Jepang di Asia telah di depan mata.

BAB IV

DAMPAK PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA BAGI MASYARAKAT

A. Selayang Pandang Dampak Tanam Paksa

Apakah tetap terjadi perbedaan pada perkembangan ekonomi di Jawa, andaikata Sistem Tanam Paksa tidak pernah diterapkan? Bagaimanakah jika sebagai ganti memperkenalkan rencana Van den Bosch ini pada tahun 1830, pemerintah Hindia-Blanda melanjutkan saja arah yang telah digambarkan oleh Du Bus pada tahun 1827. Tentu saja pertanyaan ini sulit dijawab, karena hal itu akan merupakan pengandaian belaka, tetapi dengan hanya mengajukan pertanyaan itu saja, kita dapat merenungkan kecenderungan jangka panjang dibandingkan dengan kecenderungan jangka pendek.

Waktu melakukan hal ini, kita cenderung mendapatkan segala macam alasan untuk menganggap bahwa Sistem Tanam Paksa secara keseluruhan hanya menyebabkan perbedaan yang sedikit sekali, dan segala-galanya tetap sama walau bagaimanapun juga. Anggapan ini tidak seluruhnya memuaskan, karena Sistem itu mempercepat gaya perubahan. Niscaya kita akan menyimpulkan mengatakan bahwa Sistem Tanam Paksa digunakan dan dibuat berdasarkan pola-pola sosial dan ekonomi yang sudah ada dalam masyarakat Jawa. Sesungguhnya itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Van den Bosch mengenai apa yang sedang ia lakukan. Tetapi, kemudian Van den Bosch berkata tentang banyak hal. Barangkali kita menganggap bahwa dia dan orang-orang Belanda lainnya kurang sekali pengaruhnya —dengan cara apapun juga— atas asas-asas kehidupan orang Jawa sepanjang abad ke-19, dari pada apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan.

Bagaimanapun, sulit beranggapan bahwa yang dipersoalkan itu sudah jelas. Kita tidak bisa mempermasalahakan apakah sistem tanam paksa itu revolusioner dalam apa yang dilakukannya, melainkan akan mengambil tiga perubahan, yang menurut pendapat saya memang mengalami pengaruh

Sistem tanam paksa dalam soal-soal perekonomian dengan akibat-akibat yang penting. Ketiga bidang itu adalah: pembentukan modal, tenaga kerja yang murah, dan ekonomi pedesaan. Sebelum membicarakan hal-hal ini, harus disampaikan beberapa pertimbangan mengenai cara para penulis memandang Sistem Tanam Paksa selama satu seperempat abad yang lalu. Tulisan-tulisan yang terdahulu ini, yang banyak jumlahnya, mencerminkan perasaan dan sikap dari masa yang lain mengenai sistem itu. Walaupun pandangan mereka tidak seragam, para penulis itu merupakan wadah pengetahuan yang mengarahkan pemikiran kita mengenai Sistem Tanam Paksa dan mengenai arah perubahan secara keseluruhan di pulau Jawa pada abad ke-19.

B. *Cultuur Stelsel* Kaitannya dengan Masyarakat

Penerapan suatu sistem, terlebih sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, maka menyisakan banyak permasalahan terutaka bagi masyarakat yang terkena kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan sistem tanam paksa, suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah mengenai dampak diterapkannya sistem tanam paksa pada masyarakat Jawa. Hampir semua peneliti mutakhir bahwa sistem tersebut tidak bermoral, tidak humanis, dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Dalam kaitan dengan masyarakat ini, perlu dibedakan antara sistem itu sendiri yang dianggap tidak dapat dibenarkan, dengan dampaknya yang konkret pada masyarakat. Para peneliti belum menemukan kata sepakat mengenai kedua variabel tersebut. Pada satu pihak ada pendapat yang mengatakan bahwa sistem ini paling kurang bermanfaat karena ekonomi uang telah masuk ke desa, yang kemudian menjadi penggerak ekonomi pedesaan. Sementara penelitian tentang sistem ekonomi masa VOC menunjukkan bahwa proses monetisasi sesungguhnya telah muncul dalam masyarakat Jawa pada masa VOC. Dengan demikian terdapat kemungkinan besar sebelumnya juga sudah beredar berbagai macam uang dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan masuknya ekonomi uang ke pedesaan, Prof. Van Niel dari Universitas Hawaii mengemukakan penyertaan modal dalam *cultuur stelsel* pada awalnya bukan berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga Barat, dimana Belanda pada saat itu malahan sedang dalam keadaan bangkrut sehingga memerlukan sistem tersebut untuk mendatangkan uang dengan cepat. Sementara permodalan yang digunakan untuk pabrik-pabrik gula yang dikelola pihak swasta datangnya justru dari berbagai pihak di Jawa

sendiri, seperti halnya para pensiunan pegawai negeri, perusahaan ekspor-impor, dan sudah barang tentu para saudagar Cina yang telah lebih dulu memiliki modal yang cukup (Vani Niel, 1988). Jika teori tersebut benar, maka dapat disimpulkan bahwa moneterisasi memang telah berlangsung jauh sebelum *cultuur stelsel* diterapkan. Ini berarti bahwa terhadap ekonomi uang masyarakat pedesaan, sistem tanam paksa tidak begitu banyak berdampak (Tampubolono *et. al.*, 2022: 47–49).

Sementara itu M.R. Fernando dan O'Malley melalui penelitiannya tentang perkebunan kopi di Lerebon bahkan menunjukkan adanya segi-segi positif dari penerapan *cultuur stelsel* bagi masyarakat Jawa. Dengan meramu pendapat sejumlah sarjana yang pernah meneliti masalah *cultuur stelsel* seperti Van Niel, Lison R.Knaight, dan Fernando, kedua sejarawan tersebut mengungkapkan bahwa: "... bukti sejarah sudah mulai memperlihatkan bahwa pertumbuhan pertanian komersial sesudah tahun 1830 memiliki efek perangsang pada ekonomi pedesaan, dengan komersialisasi menjurus pada peningkatan taraf kehidupan bagi mayoritas penduduk pedesaan, paling tidak selama dasawarsa pertengahan abad ke-19" (Booth, 1988: 236).

Dalam kesempatan lain, Fernando mengemukakan bahwa dampak *cultuur stelsel* adalah: "cara hidup keluarga subsistensi yang lama yang menghasilkan sendiri kebanyakan dari kebutuhan materilnya berangsur-angsur mulai berganti dengan suatu cara hidup material yang komersial. Dengan sistem tersebut penduduk pedesaan semakin terbiasa untuk membeli berbagai macam kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan uang. Dampak ekonomi dari kebiasaan konsumen dari penduduk pedesaan itu tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi non-agraris (Fernando, 1991: 3). Tesis Fernando tersebut dibenarkan juga oleh Sugiyanto Padmo dari Uuniversitas Gadjah Mada melalui penelitian historisnya. Secara lebih terperinci Fernando juga menjelaskan dalam sebuah tabel yang menunjukkan diversifikasi pekerjaan masyarakat baik agricultuur maupun non-agricultuur.

Tabel 2.5. Komposisi Tenaga Kerja di Jawa Tahun 1880

Provinsi	Tani	Manufaktur	Pedagang	Jasa
Jabar	720.532	27.628	107.855	22.678
Jateng	1103.782	49.851	174.982	34.079
Jatim	741.660	45.271	72.896	26.023
Jumlah	2565.974	122.270	355.733	82.780

Fernando, 1993.

Di samping apa yang dikemukakan Fernando, R.E.Elson juga secara khusus meneliti masalah-masalah kemiskinan dengan mengajukan pertanyaan bahwa apakah *cultuur stelsel* menimbulkan kemiskinan atau tidak bagi masyarakat. Elson juga mengakui bahwa masalah tersebut sangat sulit untuk ditetapkan karena keterbatasan sumber sejarah, terutama mengenai data statistik yang membingungkan. Namun ia sampai pada tesis bahwa tidak dapat dikatakan apakah *cultuur stelsel* menimbulkan kemiskinan pada masyarakat Jawa atau justru sebaliknya mendatangkan kemakmuran. Akhirnya Elson hanya dapat mengemukakan bahwa dengan pasti bahwa: “..sistem itu langsung atau tidak langsung paling tidak dalam jangka pendek, memberi peluang-peluang untuk suatu pengelolaan secara lebih mantap bagi kehidupan ekonomi pangan serta membuka kemungkinan-kemungkinan untuk pertumbuhan masyarakat tani, yang sebelumnya sangat terbatas pilihan-pilihannya” (Elson, 1988).

C. Penulisan Sejarah Sistem Tanam Paksa

Penulisan sejarah ekonomi Indonesia abad ke-19, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh penguasa kolonial Belanda sebagai kebijakan konservatif-kolonialis untuk meningkatkan eksploitasi tanah koloni. Berdasarkan literatur yang sudah tersedia, ditemukan gambaran yang cukup jelas mengenai pelaksanaan tanam paksa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Jika secara mendalam dikaji mengenai pelaksanaan tanam paksa di Jawa dengan luar Jawa, maka terdapat perbedaan yang cukup besar terutama yang berhubungan dengan proses pemiskinan masyarakat pribumi. Di luar Jawa, kebijakan sistem ini tidak begitu terasa berat karena rata-rata penduduknya memiliki lahan pertanian yang luas.

Sementara yang digunakan untuk lahan budidaya tanam, kebanyakan merupakan lahan tidur yang tidak digarap oleh penduduk. Sementara lahan-lahan milik penduduk tidak menjadi bagian dari pelaksanaan tanam paksa. Sementara di Jawa, budidaya tanam tidak hanya dilakukan di lahan-lahan tidur, melainkan di lahan-lahan milik petani yang sedianya digunakan untuk penanaman padi. Dengan begitu, banyak rakyat yang tercerabut hak atas tanahnya yang seharusnya menjadi lahan garapannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, banyak pula masyarakat Jawa yang tidak memiliki tanah garapan untuk keperluan hidupnya. Padahal waktu bekerjanya yang seharusnya dipergunakan secara penuh untuk mencari penghidupan, harus dipergunakan untuk bekerja di lahan-lahan untuk tanaman ekspor.

Penelitian-penelitian pada abad ke-19 tentang sejarah sosial dan sejarah ekonomi di Indonesia, menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di daerah-daerah memperlihatkan dampak dan hasil yang berbeda-beda. Di Pulau Jawa, pelaksanaan sistem tersebut telah mendorong kembali suatu pertumbuhan ekspor yang signifikan, di mana Jawa terlibat praktis dalam perdagangan internasional. Dengan keterlibatan tersebut, maka eksistensi Jawa menjadi semakin penting bagi pemerintah kolonial Belanda. Berperannya Jawa dalam lintas makro, bukan berarti meningkatkan secara signifikan kesejahteraan mikro masyarakat petani Jawa. Meskipun lalu lintas uang menyentuh desa-desa di Jawa yang berdampak merubah sistem subsistensi menjadi sistem ekonomi baru, namun secara komprehensif masyarakat pertanian Jawa tetap miskin. Sementara itu pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di luar Jawa, seperti halnya di Sumatera Barat, telah melahirkan stagnasi ekonomi dalam masyarakat Minangkabau dan kemacetan politik pada dasa warsa terakhir Abad ke-19.

Di antara diskusi-diskusi tentang perubahan sosial dan ekonomi abad ke-19 di Pulau Jawa, sebagai daerah utama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, ada kajian antropologi yang digarap oleh Clifford Geertz dengan judul *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* tahun 1963. Dalam terminologinya, Geertz menegaskan bahwa eksploitasi kolonial melalui Sistem Tanam Paksa di Jawa telah melahirkan apa yang disebut “involusi pertanian”, yang pada gilirannya menciptakan kemiskinan petani di Pulau Jawa secara signifikan. Sistem budidaya tanam ekspor pemerintah kolonial menurut Geertz, membawa dampak perubahan sosial dan ekonomi yang sangat mencolok. Teori Geertz tersebut telah mempengaruhi sebagian besar ilmuwan sosial dalam mengkaji masalah-masalah ekonomi Indonesia abad ke-19 dan ke-20 (Suyatno Kartodirdjo, 2003: ix).

Ditinjau dari aspek pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, abad ke-19 merupakan suatu periode di mana sistem ekonomi uang masuk di desa-desa, terutama pedesaan Jawa. Dengan masuknya sistem ekonomi uang, yang menggantikan sistem subsistensi, maka ketergantungan para petani pada dunia luar menjadi semakin besar. Produksi pertanian ditujukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia yang semakin memiliki peranan penting terutama bagi perbaikan kas pemerintah Belanda. Dengan sistem tersebut, berarti telah menimbulkan dampak terhadap terganggunya sistem ekonomi subsistensi sebagai sistem ekonomi tradisional yang bersifat tertutup dan hanya

memenuhi kebutuhan hidup sendiri sebagai petani. Dengan mengkaji penerapan Sistem Tanam Paksa di berbagai daerah, maka teori dualisme ekonomi Boeke (1942, 1945) yang menyebutkan bahwa sistem ekonomi modern yang dipraktikkan negara kolonial yang hidup berdampingan dengan sistem ekonomi tradisional atau sistem ekonomi subsistensi dan tidak saling mengganggu, tidaklah benar. Kajian sejarah sosial ekonomi Indonesia abad ke-19 menunjukkan bahwa ekonomi subsistensi mengalami gangguan yang serius akibat praktik ekonomi kolonial.

Dalam kajian lain, Pemberontakan Petani Banten 1888, misalnya sebagaimana dibahas secara mendetail oleh Sartono Kartodirdjo tahun 1966, merupakan salah satu contoh akibat gangguan praktik ekonomi kolonial. Kemudian gerakan-gerakan yang berupa resistensi petani Jawa pada abad ke-19 mau tidak mau harus dikembalikan pada praktik kolonial, dengan penerapan Sistem Tanam Paksa yang menyertainya. Dalam kajian sejarah sosial ekonomi selanjutnya, resistensi petani Jawa sudah merupakan tradisi masyarakat Jawa terhadap diterapkannya politik ekonomi kolonial yang menyengsarakan. Hal tersebut sangat relevan dengan teori yang disampaikan oleh Selo Soemardjan bahwa dalam masyarakat yang tertindas, maka akan menimbulkan gejolak sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Apabila teori tersebut dikaji secara historis, maka resistensi dalam masyarakat Indonesia selalu muncul mengingat tekanan dan penindasan dari penguasa yang terus berlanjut sampai sekarang.

Gaya kolonial masih tetap membelenggu mental para penguasa bangsa terutama bangsa Indonesia, sehingga gejolak sosial di mana-mana selalu muncul berbarengan dengan sikap-sikap otoriter penguasa yang tidak banyak berpihak kepada rakyat. Praktik-praktik Sistem Tanam Paksa sampai dewasa ini masih dipraktikkan dengan subur di negeri ini meskipun dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Dampaknya bagi petani Jawa sejak jaman penjajahan sampai sekarang “petani kita miskin di tengah melimpah ruahnya kekayaan alam negeri ini”.

Namun demikian dalam konteks kajian ini, tanpa memahami Sistem Tanam Paksa sebagai kebijakan ekonomi kolonial dan pelaksanaannya di tanah koloni, nampaknya akan sulit memperoleh suatu gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai sejarah ekonomi dan sejarah sosial Indonesia abad ke-19. Tulisan Van Niel tentang Java: Under the Cultivation System tahun 1992 tampaknya dapat menjadi referensi yang cukup berharga untuk membantu

mengkaji sejarah sosial dan ekonomi Indonesia abad ke-19. Meskipun tulisan tersebut merupakan kumpulan karangan, namun berbagai hal masalah Sistem Tanam Paksa di Jawa, isinya secara komprehensif suatu pemikiran relatif utuh tentang kajian Sistem Tanam Paksa di Jawa. Van Niel menyajikan dua hal penting pada bagian awal pembahasan mengenai Sistem Tanam Paksa yakni: pertama, aspek internal dari Sistem Tanam Paksa yang merupakan bagian menyeluruh dari sejarah orang Jawa, bukan bagian yang hanya dimiliki oleh sejarah kolonial. Dengan aspek internal tersebut, dampak dari pelaksanaan Sistem Tanam Paksa terhadap petani Jawa dapat dibahas lebih rinci lagi.

Kedua, pergolakan petani Jawa abad ke-19 yang sebagian besar diakibatkan oleh praktik Sistem Tanam Paksa tidak bersifat holistik melainkan lokal. Dari kedua aspek penting tersebut, tampaknya perlu ditunjukkan beberapa penulisan sejarah tentang pergolakan petani Jawa abad ke-19. Karya terpenting adalah penelitian Profesor Sartono Kartodirdjo mengenai Pemberontakan Petani Banten 1888 yang ditulis pada tahun 1966, dan gerakan protes di pedesaan Jawa pada abad ke-19 yang ditulis pada tahun 1973. Dari dua karya monumental tersebut, dapat dipergunakan untuk memahami keanekaragaman pergolakan petani yang merebak di Jawa pada abad ke-19.

Sementara implikasi dari aspek internal Sistem Tanam Paksa dan variasi lokal pergerakan petani Jawa abad ke-19 adalah bahwa penulisan sejarah ekonomi Indonesia abad ke-19 tidak bisa dilepaskan dari sejarah sosial. Kajian-kajian tema mengenai sejarah sosial abad ke-19 sangat penting artinya untuk menjelaskan praktik dan dampak Sistem Tanam Paksa baik terhadap Jawa maupun luar Jawa. Oleh karena itu kajian mengenai Sistem Tanam Paksa yang digarap oleh Van Niel dapat dijadikan sebagai salah satu pemicu untuk mengembalikan kajian sejarah sosial pedesaan Jawa abad ke-19. Hal tersebut perlu dijadikan perhatian bahwa bahwa nampaknya tidak perlu diragukan lagi bahwa kajian mendalam mengenai Sistem Tanam Paksa di Jawa ini telah mengungkap dua kenyataan sejarah. Pertama, Jawa abad ke-19 menjadi sumber penghasilan komoditas ekspor penting bagi pasar internasional. Kedua, Pulau Jawa memiliki kekayaan sumber daya manusia sangat murah yang dimanfaatkan sebagai tenaga kerja untuk kebutuhan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Van Niel dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 65-70 persen keluarga petani Jawa dipekerjakan di perkebunan-perkebunan milik pemerintah kolonial. Dua kenyataan sejarah itu jelas menunjukkan adanya

eksploitasi kolonial secara besar-besaran di bidang ekonomi dan sosial sejalan dengan politik kolonial subjektifikasi Belanda.

Berdasarkan data-data sejarah yang berhasil dikumpulkan, Van Niel mencoba memberikan interpretasi rinci mengenai peranan para kepala desa di Jawa sebagai kelompok penghubung antara kekuasaan *supradesa* dengan penduduk desa. Peranan baru para kepala desa yang didapatkannya pada masa diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Jawa ini tampaknya telah mengubah struktur sosial ekonomi pedesaan. Mereka terlibat intens dalam pengelolaan dan pengorganisasian produksi tanaman dagang untuk keperluan ekspor.

Di lain pihak, para petani harus memikul beban sosial ekonomi yang semakin berat untuk pengadaan dan penyelenggaraan komoditas ekspor tersebut. Di bawah sistem tradisional, di mana desa yang berada di bawah supra desa dalam hal ini wilayah kekuasaan bupati, maka otoritas tradisional di tingkat desa menciptakan raja-raja di tingkat desa. Selain sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, para kepala desa juga menjadi pemimpin tradisional yang berpola patron-client. Rakyat harus tunduk terhadap segala keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin tradisional mereka. Itulah sebabnya pemerintah kolonial tetap mempertahankan otoritas tradisional untuk mempermudah dalam mengeksploitasi tanah dan tenaga kerja masyarakat desa.

Dalam konteks otoritas tradisional, maka rakyat patuh pada perintah atasan baik yang berkaitan dengan masalah-masalah desa maupun yang berhubungan dengan pemerintah kolonial. Dampak dari pola yang bipolar tersebut adalah eksploitasi yang berlebihan dari para penguasa terhadap masyarakat. Sebagai kasus misalnya, ketika masyarakat atau penduduk sedang mengerjakan lahan pertanian untuk kebutuhan hidupnya dalam kerangka ekonomi subsistensi, namun kemudian ada perintah kepala desa untuk bekerja di lahan tanaman ekspor, maka penduduk tidak dapat menolaknya. Begitu pula pada ketika akan memanen, maka penduduk harus menundanya, karena harus mengerjakan tugas pemimpin terlebih dahulu.

Setelah memahami kajian mengenai pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, maka gambaran yang diperoleh mengenai perekonomian Jawa adalah bahwa *sistem ekonomi modern* atau sistem ekonomi uang dan komoditas ekspor, telah mengeksploitasi habis-habisan sistem ekonomi subsistensi yang menjadi basis perekonomian kaum petani. Eksploitasi ekonomi modern melalui penerapan Sistem Tanam Paksa merupakan eksploitasi yang bersifat brutal dan

mengakibatkan para petani Jawa menderita kemiskinan dan kelaparan yang berkepanjangan. Struktur ekonomi masyarakat desa nyaris hancur akibat penerapan sistem ekonomi baru tersebut, yang berdampak pada kemiskinan dan kelaparan yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat petani. Teori *invulusi pertanian* karya Clifford Geertz yang menjelaskan proses kemiskinan struktural di Jawa tampak relevansinya. Pertambahan penduduk Jawa, berkurangnya lahan pertanian, dan perluasan perkebunan Eropa menjadi penyebab utama kemiskinan di Jawa.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kajian ekonomi dan sejarah ekonomi Jawa abad ke-19 oleh Van Niel merupakan hasil karya pemikiran yang sangat penting. Karya tersebut memang memberikan gambaran sejarah yang agak komprehensif yang digali berdasarkan sumber-sumber primer, sehingga praktik dan dampak Sistem Tanam Paksa di Jawa dapat dilihat secara lebih objektif. Karya ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan karya penulis-penulis lain, untuk saling mencari kebenaran sejarah Sistem Tanam Paksa di Indonesia. Penulis dan karya-karya monumental itu antara lain D.H.Burger, *Sejarah Ekonomi-Sosiologis Indonesia* yang ditulis 1957; J.H. Boeke, *The Structure of the Netherlnds Indian Economy* (1942); J.H. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (1944); dan Anne Booth, dkk. (ed), mengenai *Sejarah Ekonomi Indonesia* yang ditulis pada tahun 1988, dan masih banyak lagi karya-karya lain baik asing maupun domestik yang layak untuk dikaji.

Untuk maksud-maksud objektif sekarang, penulisan sejarah Sistem Tanam Paksa dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama mulai sejak tahun-tahun akhir penerapan Sistem, yaitu dari tahun 1850-an dan 1860-an, dan berlanjut sampai permulaan tahun 1920-an. Ini merupakan masa yang amat panjang, yang memperlihatkan berbagai macam tulisan mengenai Sistem itu, tetapi formulasi awal sebagai tahap tunggal, karena tahap ini diresapkan dengan optimisme tentang bagaimana segala sesuatunya dapat dan akan menjadi jauh lebih baik, sekali kesalahan-kesalahan dan kecemasan-kecemasan mengenai Sistem Tanam Paksa disingkirkan dan prinsip ekonomi yang lebih sehat dapat berlaku.

Sebagaimana juga dua tahapan lainnya, tulisan-tulisan itu mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang para penulisnya serta tentang pemahaman dari zaman mereka, daripada tentang Sistem Tanam Paksa itu sendiri. Soest (1869–71) dan Deventer (1865–66) yang menulis pada dasawarsa 1860-

an, menonjolkan kesewenang-wenangan yang dikenakan oleh Sistem Tanam Paksa pada orang Jawa, dan mencari suatu pemulihan prinsip-prinsip ekonomi liberal, mereka juga merasa bahwa mereka juga mengetahui segala-galanya mengenai apa yang harus diketahui tentang Sistem Tanam Paksa, yang sebagian besar adalah buruk. Beberapa penulis liberal seperti Pierson (1877) dan Cornets de Groot (1862) kurang getir dan kurang tegas dalam kutukan mereka, tetapi merasa bahwa sistem itu dalam praktik berjalan salah dan bahwa suatu kebijaksanaan ekonomi yang berjiwa lebih besar yang memajukan perusahaan swasta, akan sangat membantu. Laporan Clive Day yang klasik itu adalah versi bahasa Inggris mengenai pemikiran dan rasa optimisme semacam itu (Day 1904).

Pada awal abad ke-20, para penulis lebih condong mengabaikan seluk-beluk Sistem Tanam Paksa dan mencapnya semata-mata sebagai “eksploitasi”, suatu lembaran hitam dari zaman lampau yang kini telah berubah. Hassleman (1912) dan Stokvi (1922) merupakan contoh-contoh dari aliran ini. Dalam bidang penerbitan kearsipan, usaha-usaha Van Deventer, de Roo dan van der Kemp untuk memperluas publikasi dokumenter dari De Jonge tidak pernah mencapai lebih jauh dari dokumen-dokumen tentang dasawarsa 1820-an (De Jonge 1862–1888; Deventer 1891; Roo 1909; Kemp 1890-1920)’. Sebagai peralihan ke tahap berikutnya ialah van Vollenhoven, yang mengutuk politik Belanda untuk seluruh abad ke-19, terutama dalam dampaknya atas hak-hak pemilikan tanah desa di Jawa (Vollenhoven, 1919). Van Vollenhoven memberikan banyak masukan data baku dan pendirian asasi tahapan kedua.

Tahapan kedua dari penulisan-penulisan mengenai Sistem Tanam Paksa terhitung dari tahun 1920-an sampai akhir kekuasaan kolonial Belanda. Tulisan-tulisan dan polemik-polemik Van Vollenhoven mengenai kebijaksanaan pertanahan tidak saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang segala aspek kebijaksanaan Belanda selama abad sebelumnya, tetapi juga *magnum opus* dari *De Kat Angelino*—menurut semangat filsafat pada waktu itu—memperlihatkan suatu perpaduan dan sikap menjauhkan diri, yang memperlunak hal-hal yang tidak enak dari seluruh dampak Belanda di Jawa, dengan demikian membujuk dengan cara yang hampir tidak sungguh-sungguh (Kat Angelino, 1929–1930).

Usaha untuk mencapai keseimbangan dinyatakan paling baik oleh Furnivall dalam karya klasiknya (1939). Sambil menunjukkan bagaimana Sistem Tanam Paksa mengalihkan dan merongrong kehidupan desa di pulau

Jawa, dia memperlihatkan beberapa perubahan positif yang ditingkatkan oleh sistem itu. Pada saat yang sama, dalam penelaahan-penelaahannya di bidang sejarah sosiologi, Burger mencoba merinci bagaimana ide-ide dan lembaga-lembaga Barat telah memasuki pedalaman pulau Jawa, yang mengakibatkan de-feodalisme dan keterbukaan masyarakat Jawa (Burger 1939). Penelaahan-penelaahan sejarah yang terinci tentang sejarah Indonesia abad ke-19 yang menggunakan bahan-bahan sumber arsip mulai muncul dalam disertasi-disertasi pada Universitas Utrecht yang dipimpin oleh Gerretson (*Utrechtsche Bijdragen* 1932-1950). Di Batavia, karangan-karangan dan selebaran-selebaran statistik Mansvelt mengenai perkembangan ekonomi pada abad ke-19 mulai menimbulkan beberapa persoalan/masalah tentang dampak Sistem tersebut, karena ternyata telah terjadi perubahan ekonomi yang agak positif. Bahan-bahan ini telah dikembangkan dan diterbitkan kembali oleh Creutzberg dalam seri *Changing Economy in Indonesia*. Sejumlah perkembangan dalam arena ekonomi dan politik selama tahun-tahun 1920-an dan 1930-an cenderung membuat rakyat sadar akan dampak kebijaksanaan dan praktik-praktik kolonial atas masyarakat Jawa dan juga lebih menyadari peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dikombinasikan dengan minat yang meningkat pada teori sosio-sejarah, perkembangan ini cenderung mendorong para penulis ke arah pandangan yang campur-aduk tentang Sistem Tanam Paksa.

Dengan mengakui kemajuan-kemajuan yang diperoleh Sistem tersebut dalam pertumbuhan sektor yang “berorientasi pada ekspor”, mereka menjadi lebih pedas dalam kecaman mereka mengenai dampak sistem itu atas masyarakat Jawa dan secara teoritis lebih konsekuen dalam kutukan mereka terhadap imperialisme Eropa. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari penulis-penulis ini yang sampai berbuat sejauh Gerretson (1938), yang dalam usaha untuk mengubah pandangan sebelumnya terhadap Sistem tersebut, ketika ia menulis, bahwa: “Sistem Tanam Paksa adalah kebajikan paling besar yang dianugerahkan negeri Belanda kepada Hindia-Belanda”.

Tahap ketiga dimulai sesudah kemerdekaan Indonesia dan masih berlanjut sampai sekarang. Lebih daripada dalam masa-masa sebelumnya, tahap ini menggambarkan minat yang menjangkau seluruh dunia terhadap studi-studi tentang Indonesia. Selama tahap ini dipertanyakan persoalan-persoalan baru dan makin banyak tersedia bukti-bukti baru tentang sejarah. Baik di negeri Belanda maupun di Indonesia, orang makin lama makin mempergunakan arsip, dan bahan-bahan baru yang dikemukakannya

memungkinkan para sejarawan untuk lebih dalam memasuki cara bekerjanya Sistem Tanam Paksa daripada yang telah dimungkinkan sebelumnya. Perintis jalan pada tahap ketiga ini dalam penulisan mengenai Sistem Tanam Paksa adalah pekerjaan Reinsma (1955) yang mengajukan beberapa gagasan perbaikan yang mengejutkan, terutama yang ada sangkutpautnya dengan kesejahteraan umum di pulau Jawa selama masa Sistem Tanam Paksa. Akan tetapi dalam hal-hal lain, karya Reinsma sangat bertumpu pada gagasan-gagasan dari periode sebelumnya, terutama gagasan-gagasan Van Vollenhoven dan Burger. Pada tahun 1960 hingga 1961, ada suatu penelitian mulai dengan penelitian mengenai tahun-tahun permulaan Sistem Tanam Paksa, dan pada awal tahun 1970-an. Fasseur mulai memeriksa akibat-akibat perekonomian Sistem itu, baik di pulau Jawa maupun di negeri Belanda (Fasseur 1975). Pada waktu itu penulisan tanam masih sangat dipengaruhi oleh penulis-penulis tentang tahap kedua, tetapi muncul bahan-bahan baru untuk dipertanyakan, maka sedikit demi sedikit penulisan mulai menyimpang, makin lama makin jauh dari gagasan-gagasan bermula (Fasseur 2). Pada pertengahan dasawarsa 1970-an, studi mengenai sejarah Indonesia abad ke-19 menjadi semakin populer, terutama di negeri Belanda, di mana sekelompok sarjana-sarjana berusia muda mulai menjelajahi kembali zaman kolonial mereka dahulu. Juga di Australia studi tentang Indonesia dan sejarah ekonomi telah digabungkan dengan cara yang sangat bermanfaat. Studi-studi ini telah berhasil mendapatkan bukti historis pada tingkat setempat dan berhasil mendekati kegiatan yang sesungguhnya dari Sistem itu daripada sebelumnya. Hal ini mengakibatkan maju selangkah lagi pada jajan yang telah dianjurkan pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, begitupun pada arah yang sebelumnya tidak dipertimbangkan (Van Niel 1966). Efek keseluruhan dari tahap ketiga penulisan sejarah ini adalah dimulainya perbaikan kembali yang mantap dari kedua tahapan pertama penulisan mengenai Sistem Tanam Paksa.

Ketiga warisan ekonomi dari Sistem Tanam Paksa di atas, yaitu pembentukan modal, tenaga buruh yang murah dan ekonomi pedesaan, telah dipertimbangkan secara berbeda-beda—atau sama sekali tidak dipertimbangkan—dalam tulisan-tulisan sebelumnya tentang Sistem Tanam Paksa, warisan-warisan lainnya, yang hanya akan singgung sambil lalu, pada waktu-waktu yang lampau dianggap lebih pantas untuk mendapat perhatian, daripada perhatian yang hendak diberikan sekarang.

Sementara pengetahuan kita mengenai peristiwa-peristiwa abad ke-19 bertambah, seiring dengan itu semakin sulit untuk menyamaratakan secara luas mengenai seluruh pulau Jawa atau bahkan di bagian-bagian dari Jawa di mana Sistem Tanam Paksa beroperasi. Sejak mula pertama Sistem Tanam Paksa mengadakan penyesuaian-penyesuaian setempat agar tercapai tujuan yang diinginkan mengenai produk-produk untuk ekspor yang dapat bersaing di pasaran dunia. Sebenarnya kata “Sistem” itu menyesatkan, karena perkataan itu menyiratkan tingkat koordinasi yang lebih tinggi daripada yang memang ada. Tahap-tahap penulisan sejarah mengungkapkan spektrum gagasan mengenai Sistem tersebut mulai dari pengutukan tajam sampai ke kecaman selektif, ke perspektif sosial yang lebih luas, ke kearifan mengenai perubahan-perubahan sosial yang positif, dan akhirnya sampai ke persepsi tentang perkembangan ekonomi di dalam masyarakat Jawa. Tidak ada orang yang bersedia mengatakan bahwa sistem tersebut berjalan tanpa mengakibatkan kesukaran dan perlakuan yang menyakitkan terhadap kaum tani Jawa, tetapi pandangan sejarah makin lama makin mencoba memperlihatkan rangka perubahan sosial-ekonomi yang luas, yang merupakan latar belakang dari keadaan-keadaan yang berlaku.

D. Pembentukan Modal: Sisi Lain Sistem Tanam Paksa

Sebelum Sistem Tanam Paksa diperkenalkan pada tahun 1830, oleh orang-orang Eropa telah diadakan usaha untuk meninggalkan sistem penyerahan hasil bumi secara paksa dan pengeluaran ongkos paksa yang telah merupakan ciri khas dari operasi VOC. Para produsen potensial dari komoditi-komoditi pertanian yang dapat di ekspor, pada tahun-tahun 1830 adalah sebagai berikut.

1. Para penduduk desa bangsa Jawa yang menguasai tanah-tanah yang dibebani pajak sewa tanah.
2. Para pengusaha perkebunan swasta, terutama orang-orang Eropa yang memakai tanah yang “tak berharga atau berlebih”, dengan membayar sewa kepada pemerintah.
3. Para pengusaha perkebunan swasta, terutama orang-orang Eropa yang mengadakan kontrak dengan Pangeran-pangeran Jawa untuk pemakaian hak tunjangan mereka di daerah-daerah Kesultanan.

4. Para pemilik tanah partikelir, terutama orang-orang Eropa yang memiliki hak-hak tuan tanah atas tanah-tanah mereka berikut rakyat di atas tanah-tanah itu.

Masing-masing produsen tersebut di atas mengalami kesukaran besar dalam menarik modal untuk memperluas dan meningkatkan operasinya. Sementara modal dari Eropa, satu-satunya jenis modal yang tersedia waktu itu telah mempunyai berbagai macam pengalaman dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kolonial dan tidak tertarik untuk menanam modal di pulau Jawa karena risikonya besar.

Di antara keempat bentuk pengaturan produksi itu, hanya yang kedua, yaitu para pengusaha perkebunan swasta, yang mengerjakan tanah yang disewa dari pemerintah dan yang membuat peraturan-peraturan perburuhan secara perorangan dengan penduduk setempat, kelihatannya mempunyai potensi untuk menarik serta mendapatkan modal. Desa di Jawa sama sekali diluar jangkauan keterlibatan ekonomi dan tidak menunjukkan melihat pada bidang budi daya, untuk ekspor.

Dibiarkan untuk berbuat sekehendaknya, desa memusatkan perhatiannya pada mata pencahariannya sendiri, menghasilkan beras, kantung, nila, dan produk-produk yang lain untuk kehidupan sehari-hari, lagi pula, karena prosedur resmi yang biasa dipakai di Barat mempunyai pengaruh kecil pada masalah pedesaan, maka tidak ada perlindungan bagi para penanam modal, pengalaman antara tahun 1815 dan 1830 telah memperlihatkan, bahwa di mana hasil budi daya untuk diekspor—seperti perkebunan kopi diserahkan pada pengawasan desa, penanaman-penanaman itu diabaikan atau dibiarkan saja produk-produk untuk ekspor, seperti yang diperoleh selama masa ini, berasal dari para pengusaha perkebunan swasta yang menyewa tanah dari tanah bengkok, atau dari daerah-daerah di mana pelaksanaan serah paksa tetap berlaku (Van Niel, 1981).

Pengusaha-pengusaha perkebunan swasta di atas tanah-tanah yang disewa dari pemerintah tidak dapat banyak menarik modal, oleh karena mereka tidak mempunyai hak milik atas tanah itu. Apa yang dapat dan yang memang mereka lakukan adalah bekerja pada kantor-kantor ekspor/impor (terutama Belanda dan Inggris) di Jawa, dengan memperoleh uang dari kantor-kantor itu sebagai ganti dari panen untuk ekspor yang telah mereka hasilkan. Hal ini bukan saja merupakan kehidupan yang berbahaya, melainkan juga hampir tidak menghasilkan modal yang cukup untuk operasi-operasi yang sedang berjalan,

bahkan tidak memberikan apa apa untuk perluasan dan peningkatan para pengusaha perkebunan swasta di daerah-daerah kesultanan (Daerah Istimewa) pada permulaan abad ini kelihatannya mempunyai potensi yang paling besar untuk pertumbuhan dan perluasan. Karena alasan-alasan yang tidak sepenuhnya jelas, hal ini tidak terjadi.

Barangkali perluasannya dibatasi oleh pengaturan-pengaturan tunjangan dan olah cara yang mereka bebaskan atas tanah dan buruh melalui kewajiban-kewajiban tradisional. Atau mungkin karena mereka telah menjalankan gaya hidup orang-orang Jawa di sekeliling mereka dan telah puas dengan tingkat kegiatan yang telah dicapai. Bagaimanapun juga, secara kasar mereka pada ukuran dan tingkat keuntungan yang telah dicapai menjelang tahun 1830. Akhirnya, para pemilik tanah (perkebunan) swasta rupanya tidak begitu berminat terhadap pengusahaan ekspor atau pada perluasan operasi ekonomi mereka. Tanah-tanah semacam itu makin lama makin merupakan soal gengsi dari pada soal ekonomi, nilai ekonominya yang paling besar adalah sebagai tanah milik. Banyak diantara para pemiliknya telah mengikat bagian terbesar dari penghasilan mereka pada lahan mereka dan tidak mau melibatkan diri dengan kepentingan-kepentingan dari luar. Sebagian kecil dari tanah-tanah ini, seperti yang ada di Karawang, memang memperoleh modal dari luar dan kemudian meluas dan tumbuh. Tetapi hal ini merupakan suatu pengecualian, bagian terbesar dari tanah-tanah swasta ini makin lama menjadi makin tidak cocok dengan keadaan zaman waktu itu, sementara abad berlalu perlahan-lahan.

Sistem Tanam Paksa mempunyai tujuan utama untuk merangsang produksi dan ekspor dari komoditi-komoditi pertanian yang dapat dijual di pasaran dunia. Pemerintah menyadari sejak semula bahwa setiap pengolahan yang diperlukan oleh produk-produk ini, mungkin harus dikembangkan dengan pemasukan-pemasukan modal yang diusahakan oleh pemerintah sendiri untuk melengkapinya. Pemerintah meminjamkan uang kepada orang-orang yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan pabrik/penggilingan untuk pengolahan produk-produk pertanian yang disediakan oleh para penduduk desa.

Peraturan-peraturan kontrak semacam itu dicoba dilaksanakan untuk berbagi hasil panen, tetapi hanya di bidang pembuatan gula peraturan-peraturan itu menjadi faktor yang banyak artinya dalam usaha menghasilkan pertambahan modal. Pada produksi kopi dan nila, dua hasil panen lain untuk

ekspor yang dapat memberi keuntungan, para kontraktor atau tidak digunakan sama sekali atau menjadi berlebihan karena tingkat produksi yang kecil. Tetapi dalam pengolahan gula, sistem yang disponsori oleh pemerintah itu rupanya tepat sekali. Para kontraktor pemerintah bukan saja menerima modal yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas-fasilitasnya, tetapi juga mendapat bantuan pemerintah untuk memperoleh batang tebu mentah (*raw cane*) dan tenaga kerja yang diperlukan. Kontraktor berkewajiban menjual gula yang telah diolah itu kepada pemerintah untuk membayar kembali pinjamannya, tetapi kelebihan jumlah gula yang diperlukan untuk pembayaran kembali pinjaman itu tadi, boleh dijual tersendiri oleh kontraktor demi keuntungannya sendiri. Di sini terdapat peluang untuk menghasilkan uang, dalam jangka waktu beberapa tahun, nilai penjualan-kembali kontrak-kontrak gula ini meningkat pesat.

Lahan-lahan pedesaan yang menyediakan bahan-bahan baku untuk para kontraktor, terletak di daerah-daerah umum yang sama dengan tanah-tanah “tak berharga atau berlebih” dahulu yang dipakai oleh pengusaha-pengusaha perkebunan swasta yang telah menyewa tanah dari pemerintah sebelum tahun 1830. Hal ini dapat dimengerti sebab—karena bergantung pada tenaga buruh yang besar jumlahnya—kedua-duanya memilih tanah di sekitar pemukiman penduduk. Tanah-tanah yang ditanami untuk perusahaan pemerintah itu letaknya dekat sekali dengan tanah-tanah para pengusaha perkebunan swasta. Selama bertahun-tahun, baik para kontraktor maupun para pengusaha perkebunan swasta berhasil baik, dan kedua-duanya berkembang dengan tingkat yang kira-kira sama, dengan para pengusaha swasta mempertahankan rasio yang konstan sebesar kira-kira seperempat luas tanah yang ditanami oleh pemerintah. Sementara para kontraktor bertambah kaya, mereka atau memperluas operasi mereka sebagai pengusaha perkebunan swasta atau membantu anggota keluarga mereka dalam membuka daerah-daerah penanaman baru bagi hasil perkebunan lain.

Peraturan-peraturan pemerintah secara berkala membatasi perluasan oleh pihak swasta dalam bidang penanaman komoditi yang menguntungkan seperti gula, kopi dan nila, sedangkan penanaman-penanaman yang kurang untungnya seperti teh, tembakau, dan nopal (*cochineal*) diserahkan kepada pengusaha perkebunan swasta. Peranan para pengusaha perkebunan swasta dalam perkembangan modal telah diuraikan secara panjang lebar oleh Reinsma (1955), dengan penjelasan dan perbaikan lebih lanjut oleh Fasseur (1975).

Pukulan politik serta modal yang diperlukan bagi perluasan pertanian ini menjamin, bahwa para kontraktor pemerintah, pengusaha perkebunan swasta, kantor impor-ekspor dan pegawai negeri sipil bangsa Belanda di pulau Jawa, menjadi erat hubungannya karena ikatan keluarga.

Selama masa Sistem Tanam Paksa modal dasar sektor ekspor agro-ekonomi jadi berlipat ganda, sebagian besar karena hubungan erat antar-keluarga bangsa Eropa di pulau Jawa (Van Niel 1964*a*). Sebagian besar dari kekesalan terhadap sistem, yang diungkapkan oleh orang-orang Belanda di Eropa sesudah pertengahan abad ke-19, ditujukan pada pemberian jabatan kepada saudara-saudara dan sanak keluarga (*nepotisme*) serta pada pengaruh pribadi yang diadakan dalam memberi kontrak dan hak-hak atas tanah. Orang-orang di luar Jawa melihat sifat sistem yang menguntungkan itu dan ingin turut dalam kegiatan tersebut. Tetapi perkembangan yang telah terjadi, berasal dari pembangunan modal yang dirangsang oleh kekuatan-kekuatan dari luar pulau Jawa.

Sistem Tanam Paksa—melalui suntikan modal dari pemerintah dan melalui meluasnya penanaman produk-produk untuk pasaran dunia—telah mendorong pembentukan modal swasta, yang dalam jumlah-jumlah besar ditanam dalam perluasan lebih lanjut dari sektor komoditi pertanian untuk ekspor. Sukses dari proses ini menimbulkan berbagai masalah. Satu diantaranya telah diketahui, yaitu rasa jengkel akibat pemberian hak istimewa kepada sekelompok orang dalam. Juga di antara para petani Jawa pun terdapat perasaan yang meningkat bahwa mereka dapat berkembang, bahkan lebih pesat dan dapat bekerja lebih efisien lagi, jika pemerintah tidak ikut lagi dalam Sistem Tanam Paksa. Kebijakan tradisional dalam kedua tahap pertama penulisan sejarah menganggap Sistem Tanam Paksa sebagai bertentangan dengan semua perusahaan partikular dan sebagai penghalang dari pembentukan modal.

Telah lama menjadi buah pikiran bahwa modal swasta yang mengalir secara mendadak dari luar ke Pulau Jawa pada dasawarsa 1850-an dan 1860-an memaksa kehancuran sistem tersebut. Hal ini tidaklah benar pada bagiannya yang manapun, sebagaimana ditegaskan oleh Reinsma. Sebagian besar perluasan dilaksanakan di Pulau Jawa, dan hingga dasawarsa 1880-an jumlah modal dari luar pulau Jawa relatif tetap kecil. Persekutuan yang akrab antara para kontraktor pemerintah, pengusaha perkebunan swasta, kantor-kantor impor-ekspor dan pegawai negeri sipil, merupakan inti persoalan. Hal ini

merupakan subjek yang membutuhkan banyak sekali penelitian sejarah, untungnya banyak bukti yang diperlukan itu tersedia. Kita perlu yakin bahwa pengumpulan modal di antara para pengusaha perkebunan dan pedagang Cina juga terjadi pada waktu yang sama.

E. Tenaga Buruh Murah dalam Sistem Tanam Paksa

Dalam budi daya tanam yang berorientasi ekspor, maka keberadaan buruh yang dapat dibayar murah dan efektif pembayarannya merupakan kebutuhan utama. Pengawasan terhadap tenaga buruh pada abad ke-19 merupakan suatu hal yang penting ketimbang pengawasan terhadap tanah. Sistem Tanam Paksa mempekerjakan tenaga buruh dengan menerapkan pola tradisional Jawa yang dapat mengkondisikan tetap eksistensinya keberadaan buruh terutama buruh Jawa. Hal demikian dimaksudkan agar petani Jawa tersebut menyerahkan sebagian hasil perkebunannya kepada pejabat yang lebih tinggi dan selama beberapa waktu setiap tahun mengerjakan tugas-tugas yang ditentukan oleh atasannya (Naessen, 1977). Untuk pekerjaan ini para buruh tidak dibayar, karena pekerjaan tersebut dipandang sebagai suatu pola tata hubungan sosial yang hierarkis. Sebelum diterapkan Sistem Tanam Paksa pada awal abad ke-19, pajak atas sewa tanah yang dikenal sebagai sewa tanah, telah berlangsung dalam masyarakat sebagai pengganti penyerahan hasil perkebunan. Untuk memungut pajak, maka Desa merupakan unit yang ditunjuk untuk mengorganisasikannya, di samping sebagai unit penyedia serta penyalur pelayanan kerja paksa yang tanpa pembayaran. Perubahan-perubahan demikian ditinjau dari sudut pandang sosial, ekonomi maupun politis, menimbulkan kesenjangan dan perpecahan dalam masyarakat Jawa, karena hal-hal demikian telah ditangani secara berbeda-beda pada waktu-waktu sebelumnya.

Sebagaimana VOC sebelumnya, pemerintah kolonial di Hindia Belanda menganggap dirinya sebagai pengganti raja-raja Jawa dan menuntut hak istimewa sebagaimana yang diberikan kepada para pejabat bangsa Jawa yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam hak-hak ini termasuk hak atas pelayanan para buruh, seperti yang sebelumnya terjadi untuk membangun sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan-jalan, benteng, saluran irigasi, dan sarana-sarana umum dimana pemerintah membayarnya dengan upah yang sangat murah. Kerja paksa yang ditujukan untuk para kepala desa dan juga atasan-atasan dari bangsa Jawa juga meningkat drastis, kendatipun pemerintah

berwenang mengawasi apakah terjadi penyalahgunaan wewenang di luar yang ditentukan oleh pemerintah.

Memang sebenarnya keberadaan kepala desa sangat penting dalam rangka menyalurkan tenaga buruh yang tersedia untuk memungut pajak, sehingga dengan demikian pemerintah tidak dapat berbuat banyak tanpa mereka, sehingga tidak dapat serta merta membatasi tugas-tugas mereka. Dengan demikian pola tradisional harus tetap dipertahankan untuk mendapatkan dukungan dari para kepala desa dalam melakukan perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Para petani Jawa bekerja di bawah pemerintah kepala desa, dengan menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai persembahan tradisionalnya kepada pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Bahkan pengusaha-pengusaha perkebunan swasta yang mendapatkan tenaga buruh yang diberi upah, harus mengembalikan nilai kerja rodi buruh tersebut. Ada pula yang mendapatkan buruh dengan membayar pajak sebuah desa, dan dengan demikian mendapatkan hak sebagai Tuan Besar untuk pelayanan buruh.

Dengan demikian kerja wajib adalah isi pokok dari budi daya tanaman yang berorientasi ekspor, maka dengan demikian Sistem Tanam Paksa menambah beberapa masalah baru pada pelaksanaan kerja paksa. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Dasar Pemerintah (*Regeerings Reglement*) tahun 1830, terutama Pasal 80, pelaksanaan kerja wajib di hutan-hutan di Pulau Jawa yang sebelumnya dikenakan oleh pemerintah, baik mengenai upah maupun pengurangan sewa tanah, dilanjutkan atas pertimbangan pemerintah untuk digunakan di areal-areal selain hutan. Sistem Tanam Paksa merencanakan menggunakan seperlima dari tanah pedesaan bagi budi daya tanaman untuk ekspor. Nilai hasil yang tumbuh di atas tanah ini dianggap cukup untuk membayar pajak, di mana sebelumnya telah ditetapkan sebesar dua perlima dari hasil panen utama. Dengan strategi itu, diharapkan bahwa di bawah sistem baru ini desa akan lebih menguntungkan.

Dalam pelaksanaannya, segala sesuatunya tidak berlangsung sebagaimana yang telah ditentukan, melainkan bahwa pemerintah memisahkan suatu jumlah sewajarnya dari pekerjaan petani, yakni seperlima bagian dari setahun atau sekitar 66 hari untuk melayani kepentingan pemerintah, dan pemerintah menetapkan hal tersebut sebagai pelayanan tanpa paksa: pelajanan tanam paksa ini sungguh-sungguh merupakan pengganti sewa tanah (pajak), yang sebelumnya telah merupakan pengganti penyerahan wajib hasil-hasil perkebunan. Pelayanan tanam paksa ini bukan merupakan pengganti

pekerjaan rodi yang dikenakan oleh pemerintah, melainkan merupakan tambahannya. Karena petani atau tentu saja desanya, dibayar untuk panen yang dihasilkan oleh pelayanan tanam paksa betapa pun tidak memadai pembayaran itu-pelayanan tanam paksa selalu dianggap oleh pemerintah sebagai sama sekali terpisah dari pelayanan kerja rodi. Jugat terpisah dari pelayanan perorangan yang diberikan kepada kepala desa dan kalangan atasan di atas tingkat desa (Van Niel 1976). Bagaimanapun juga pekerjaan yang dilakukan pada hasil panen pemerintah, dipaksa oleh pemerintah dengan cara yang sama dengan pelayanan-pelayanan wajib lainnya. Bagi petani Jawa, tidak ada perbedaan jenis kerja paksa, yang ada hanyalah suatu peningkatan jumlah kerja paksa yang menyolok .

Berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk pelaksanaan Sistem Tanam Paksa dari para petani Jawa sulit untuk dijelaskan sejara riil, karena tidak terdapat ketentuan dan peraturan yang berlaku, bahkan untuk mengetahui jumlah riil dari suatu desa sekalipun. Sebelum tahun 1830, pola tradisi pembagian kerja sudah berlangsung baik yang berkaitan dengan pembagian kerja rodi oleh pemerintah kolonial, maupun pola kerja yang bersifat tradisional. Di antara mereka ada yang mengerjakan tanah sebagai kewajiban kepada pemerintah, sementara yang lainnya mengerjakan tanahnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah tahun 1830, baru kemudian ada orang-orang yang bekerja secara tetap di perkebunan-perkebunan milik pemerintah atau pekerjaan-pekerjaan yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Selalu ada orang-orang yang bekerja sebagai buruh harian, atau bahkan sebagai penyewa untuk para penduduk desa lainnya.

Dalam kontrak kerja yang agak sudah tetap demikian, maka sistem upah sudah mulai diterapkan secara teratur. Namun pemberian upah tidak begitu tinggi, melainkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu seseorang atau keluarga masih terikat oleh pola hubungan tradisional yang harus memenuhi segala kewajiban-kewajibannya, meskipun mereka sudah terikat oleh buruh kontrak. Petani Jawa belum terbiasa dengan sistem upah, sehingga kegiatan kerja yang mendapat imbalan upah adalah sistem kerja yang dimaksudkan untuk memenuhi keinginan hidup yang lebih baik. Fenomena ini diakibatkan penduduk sudah terbiasa dengan pola hidup subsistensi yang dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Di luar itu mereka tetap memandang bahwa bekerja tetap terbatas

pada pelayanan wajib kepada penguasa, yang lebih tinggi yang harus dipenuhinya.

Dalam perkembangannya, meningkatnya kebutuhan tenaga buruh, juga diiringi dengan meningkatnya praktik-praktik pemaksaan yang dilakukan oleh para pejabat yang terikat pada pelayanan pemerintah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga tekanan atas tanah-tanah di daerah penanaman pemerintah, maka uang ekstra dari upah makin lama makin penting artinya bagi ketahanan hidup petani yang lebih miskin. Para penulis tahap pertama banyak memanfaatkan kenyataan, bahwa para penguasa perkebunan dan kontraktor sejak dasawarsa tahun 1840-an ke atas mengatakan bahwa buruh upah bekerja lebih baik dan efisien ketimbang buruh-buruh paksa. Hal ini dapat diterima mengingat tanggung jawabnya sebagai buruh harus tetap dijaga agar tetap dipercaya sebagai buruh yang di bayar. Sementara bagi mereka buruh yang tidak dibayar, maka tidak ada ikatan formal, sehingga tidak mengutamakan pelayanan kerja yang baik.

Namun demikian, pada tahun 1850-an, usaha-usaha untuk memasukkan buruh tani ke dalam daerah yang biasanya dikerjakan oleh buruh rodi, harus ditinggalkan, karena tidak ada kaum buruh yang bersedia bekerja dengan tingkat upah yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebagian besar petani Jawa tidak belajar menghargai pekerjaan sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan tetap memandang pekerjaan mereka sebagai beban yang harus dipikul dan menjadi derita kesehariannya. Penambahan jumlah kerja paksa yang sangat memberatkan di seluruh daerah penduduk yang lebih luas, mungkin membuka mata para petani, mengenai teknik dan cara-cara bekerja di suatu perkebunan. Namun demikian kondisi tersebut tetap tidak atau kurang mendorong minat perorangan untuk berkecimpung dalam tanaman ekspor, karena pandangan petani Jawa terhadap pekerjaan tetap tidak berubah.

Pada tahun 1860-an dan 1870-an, para pengusaha perkebunan swasta mulai mengadakan perjanjian perburuhan dan perjanjian tanah dengan perorangan dan desa-desa, sangat nyata bahwa Sistem Tanam Paksa tidak berkontribusi banyak untuk mempersiapkan cara bagi pembentukan pasaran buruh yang bebas dan sukarela. Namun sebaliknya, Sistem Tanam Paksa telah menyebabkan penilaian yang negatif bagi pekerjaan karena memberikan kompensasi atau ganti rugi serendah mungkin.

Dengan meneruskan penggunaan pola-pola kekuasaan tradisional. Sistem Tanam Paksa juga menciptakan kebutuhan akan penghasilan tambahan

di daerah-daerah di mana penanaman ekspor dapat berkembang. Bagi para pengusaha perkebunan swasta, kondisi tersebut dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Keuntungan terletak pada kenyataan akan rendahnya tingkat upah yang sedang berlaku, dan dengan demikian mereka dapat terus bersaing di pasaran dunia. Sementara itu kerugiannya, yang sementara itu lebih besar ketimbang keuntungannya, muncul karena adanya masalah-masalah dalam rangka menarik dan menahan tenaga kerja.

Para pencari tenaga kerja yang diberikan pada otoritas tradisional, yakni para kepala desa dan tokoh-tokoh pengusaha lainnya, mereka memberi uang muka terlebih dahulu untuk menarik tenaga kerja, namun demikian masalah yang muncul adalah buruh seringkali tidak masuk kerja sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja. Dengan demikian, berbagai tekanan terhadap buruh yang dianggap lalai mereka gunakan. Sementara pengadilan resmi berlangsung lambat dan tidak memadai, lebih efektif memanfaatkan orang-orang kuat untuk memaksa para pekerja. Bahkan kadang-kadang para pengusaha perkebunan dapat membujuk para pejabat administrasi untuk membantu dan memaksa.

Menjelang tahun 1880-an, tekanan pertumbuhan penduduk menjadi jelas dalam berkurangnya lahan garapan yang tersedia, dan semakin terbatasnya kemampuan desa untuk menyiapkan kebutuhan pokok mereka, sehingga banyak orang yang harus mencari tambahan penghidupan di luar desa mereka. Pada saat yang sama berjangkitlah hama tebu dan kopi yang mengakibatkan penurunan drastis hasil tanaman ekspor. Padahal penduduk sudah mulai menggantungkan hidupnya di perkebunan-perkebunan tersebut, sehingga dengan berkurangnya produksi kopi dan gula, maka upah yang diterimakan oleh penduduk juga semakin berkurang. Hal itu masih ditambah dengan munculnya gula bit dari Eropa yang berperan dalam menurunkan harga gula di pasaran dunia internasional menurun.

Dampaknya para pengusaha perkebunan menurunkan tingkat upah bagi para buruh, dan mengurangi pula jumlah uang untuk penyewaan tanah. Faktor-faktor yang kompleks tersebut mengakibatkan penurunan jumlah uang yang tersedia bagi masyarakat Jawa, yang harus berdampak pada harusnya kesediaan yang lebih besar dari masyarakat, untuk menerima upah buruh dengan harga dan syarat-syarat yang sebelumnya tidak dapat mereka terima (Elson, 1982). Penelitian-penelitian yang muncul selama ini khususnya tentang kesejahteraan masyarakat pedesaan Jawa cenderung mendukung gagasan

bahwa, di Jawa selama penerapan Sistem Tanam Paksa terdapat lebih banyak kekayaan materi ketimbang dengan tahun-tahun sesudah pembubarannya.

Dalam konsepsi yang lebih khusus, ketetapan hukum mengenai permintaan wajib tanam dari kaum tani tertuang dalam Pasal 80 Peraturan Dasar Pemerintah (*Regeerings Reglement: RR*) 1830 yang dirancang oleh Van Den Bosch dan raja. Berdasarkan pasal tersebut, kegiatan tebang pohon (*blandong*) yang selama itu dilakukan sebagai kerja wajib dengan memperoleh imbalan sekarang digunakan sebagai contoh kerja paksa yang di perluas di bidang penanaman lain.

Peraturan-peraturan dasar pemerintah terdahulu memasukkan kegiatan tebang pohon, pengumpulan sarang burung di lereng terjal, pencetakan garam, penanaman kopi Priangan, dan perkebunan rempah-rempah ke dalam peraturan husus karena pemerintah menganggap kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai nilai penting. Peraturan Dasar Pemerintah 1830 (Pasal 80) menyebut bahwa kegiatan tebang pohon dijalankan atas tanggungan pemerintah dengan membayar upah atau mengurangi sebagian sewa tanah. Selanjutnya disebutkan bahwa aturan semacam itu dapat diberlakukan untuk pelayanan kerja lainnya bagi pemerintah dan untuk penanaman khusus yang dianggap penting.

Berhubungan dengan lamanya pelayanan tanam yang dihitung oleh Van den Bosch adalah 66 hari per tahun untuk setiap orang. Tidak jelas bagaimana Bosch mendapatkan angka tersebut. Suatu interpretasi historis bahwa Bosch menganggap setiap desa harus menanami seperlima dari tanah desa dengan tanaman ekspor yang ditentukan oleh pemerintah, maka logikanya untuk tenaga kerja juga seperlima dari tenaga kerja yang harus disediakan untuk kepentingan pemerintah.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam budi daya tanam tersebut adalah bila pelayanan tanam tersebut dihubungkan dengan kerja rodi (*corvee; herendiensten*) yang sudah ada sejak dulu. Hubungan yang tidak jelas tersebut dibiarkan berlarut-larut dalam peraturan-peraturan pemerintah dalam waktu yang relatif cukup lama, sehingga masalah tersebut menjadi suatu sumber kesimpangsiuran. Baru dengan RR 1854 dilakukan upaya pembenahan untuk menjernihkan persoalan tersebut, namun karena hanya dijelaskan sepotong-sepotong, sehingga membuat kerancuan terus berlanjut hingga awal abad ke-20.

Van den Bosch tampaknya sudah membedakan secara jelas antara *corvee* (kerja rodi) dengan pelayanan kerja lain, dan perbedaan itu didasarkan pada kenyataan sederhana apakah kerja tersebut mendapat imbalan atau tidak. *Corvee* tidak mendapat imbalan, meskipun beberapa orang yang bekerja dalam dinas pemerintahan, mungkin menerima jatah garam dan beras. Sementara kerja lainnya, seperti pelayanan tanam, *blandong*, dan sebagainya mendapat imbalan berupa uang atau pengurangan sewa tanah. Jika masalahnya dilihat secara ini, maka jelas pelayanan tanam berbeda dengan *corvee*. Bila dipandang seperti itu, maka akan menjadi jelas pula mengapa beban kerja yang ditanggung oleh penduduk Jawa meningkat secara tajam sesudah tahun 1830.

Pengerahan tenaga kerja berdasarkan *corvee* tradisional Jawa pada umumnya didasarkan pada hak-hak kepemilikan tanah. Kerja menurut pengaturan semacam itu, dihitung berdasarkan suatu sistem yang dikenal dengan cacah rumah tangga, kepala rumah tangga yang mempunyai hak-hak atas tanah juga diwajibkan melaksanakan *corvee* (tidak menjadi masalah, apakah pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri atau menyuruh seorang anggota keluarga untuk melaksanakannya). Sistem *cacah* masih berlaku pada 1830, dan lambat laun sistem *cacah* dihapus oleh Van den Bosch karena setelah tahun 1838 tidak ada lagi rujukan dengan sistem tersebut. Alasannya cukup jelas, di mana untuk pengadaan tenaga kerja sebanyak-banyaknya maka perlu diterapkan pelayanan kerja berdasarkan perorangan, bukan atas dasar rumah tangga. Dampaknya, banyak orang yang terlibat dalam pelayanan tanam tidak lagi mempunyai hak atas tanah. Banyak desa merasa perlu melakukan penyesuaian dengan menyerahkan hak penggunaan sebidang tanah kepada beberapa orang sehingga tenaga mereka dapat diikutsertakan dalam pengaturan kerja yang dibutuhkan oleh Sistem Tanam Paksa.

F. Perubahan Ekonomi Pedesaan

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa dalam praktiknya mengikuti pola tradisional yang berlaku dalam masyarakat Jawa, sehingga dapat mengerakkan para petani di daerah-daerah tertentu agar mau bekerja dalam menghasilkan tanaman untuk ekspor. Harapan pemerintah adalah dengan menggunakan otoritas kepala desa, maka dapat menggerakkan penduduk untuk mau menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan tanam paksa, dan juga mau bekerja untuk tanaman ekspor. Sikap ini juga dimaksudkan untuk mengondisikan agar masyarakat Jawa tetap statis. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi karena dampak ekonomi sistem tersebut justru telah

menggerakkan perubahan-perubahan dan mempercepat kecenderungan-kecenderungan yang sudah ada. Pola-pola tradisional kalangan atas di tingkat desa sudah kocar-kacir pada permulaan abad ke-19 sehingga Sistem Tanam Paksa hanya dapat menggunakan pola-pola itu dengan cara-cara yang tidak rasional dan alamiah.

Tokoh-tokoh penguasa mengalami tekanan-tekanan yang semakin berat karena tuntutan-tuntutan sistem tersebut terhadap mereka. Di daerah-daerah tempat untuk penanaman ekspor pemerintah dilaksanakan, orang-orang Jawa di atas tingkat desa dipaksa menyesuaikan diri dengan keadaan baru dari sistem tanam paksa, yang lama kelamaan menurunkan popularitas mereka di mata sebagian besar penduduk (Sutherland, 1979, dan Van Niel, 1981). Antara tempat yang satu dengan tempat yang lain berbeda-beda proses perubahannya, sehingga orang tidak dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini telah kehilangan kekuasaan sampai awal abad ke-20. Namun bagaimanapun juga, terdapat perubahan-perubahan, baik dalam tubuh pemerintahan di atas tingkat desa maupun dalam hubungannya dengan desa-desa. Bahkan terdapat beberapa tulisan yang mengatakan bahwa Sistem tanam Paksa telah menghancurkan desa-desa di Jawa.

Sistem Tanam Paksa dianggap telah memaksa mengubah hak-hak pemilikan tanah dari milik perseorangan menjadi milik bersama, yang tentunya telah merusak hak-hak perseorangan atas tanah yang sebelumnya telah ada. Hak-hak pemilikan tanah merupakan kepentingan subjektif bagi kelompok-kelompok pengusaha swasta yang hendak mengganti sistem tersebut dengan bentuk eksploitasi mereka sendiri. Penyelidikan mengenai hak-hak tanah yang dimulai pada dasawarsa 1960-an dimaksudkan untuk memberikan data-data baku yang digunakan untuk mendukung argumentasi seputar kepemilikan tanah secara lebih tajam dengan mengusut evolusi hak-hak tanah asli dan mengungkapkan betapa kebijakan-kebijakan pemerintah suatu kecenderungan evolusioner terhadap hak guna partikular.

Para penulis tahun 1920-an dan 1930-an menggunakan bukti tersebut untuk menerangkan proses disintegrasi ekonomi dan sosial desa menjadi semacam egaliterianisme yang diperlemah, di bawah dampak imperialisme Eropa. Sementara Furnival dan Burger merupakan penulis yang fanatik mendukung kecenderungan tersebut, pembentangan paling jernih dari argumen ini dalam bahasa Inggris didapati pada penelitian Clifford Geertz mengenai involusi pertanian (Geertz, 1963). Dengan memintakan perhatian

terhadap bukti-bukti dan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, dalam menjelaskan perkembangan-perkembangan semenjak diperkenalkannya Sistem Tanam Paksa, mereka mendapati bahwa telah terjadi homogenisasi sosial di desa-desa Jawa yang mengakibatkan “kemiskinan bersama”.

Jauh sebelum Sistem Tanam Paksa dilaksanakan, kaum tani Jawa telah menyesuaikan diri secara fleksibel pada kebutuhan-kebutuhan setempat, tempat di mana mereka berada. Sifat-sifat seperti bersedia bekerja keras, kemampuan perorangan, dan penyesuaian lentur kepada perubahan, banyak serupa dengan apa yang telah dikemukakan oleh Selo Soemardjan pada tahun-tahun 1960-an (Selo Soemardjan, 1968). Para pengusaha di atas tingkat desa mengetahui semuanya itu, lalu mengolahnya secara terinci dengan para kepala cacah mereka, yang oleh Hoadley, yang meneliti wilayah Cirebon dan Priangan, dipandang sebagai abdi-abdi para penguasa yang lebih tinggi. Penyesuaian demikian memungkinkan para kepala di atas tingkat desa memenuhi kebutuhan pemerintah akan hasil-hasil pertanian dan tenaga buruh, sambil juga memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang meningkat akan tenaga butuh, serta akan lahan penanaman yang lebih luas.

Di bawah pengarahan mereka, pemakaian lahan yang tersedia dapat diatur dan penyesuaian-penyesuaian dapat diadakan. Hak-hak milik atau hak-hak pengawasan atas lahan berada di tangan para kepala cacah dan golongan elite lokal lainnya. Tekanan-tekanan baru yang dikenakan pada kaum tani memaksa diadakannya perubahan atau perbaikan hak-hak kaum tani, tetapi tidak banyak pengaruhnya atas hak-hak cacah atau hak-hak kepala pemerintahan di atas tingkat desa. Namun di dalam desa, para penduduk inti tetap memegang pengawasan atas sebagian besar lahan, dan beberapa orang petani kecil-tapi yang mandiri-terus mengendalikan lahan-lahan tradisional mereka. Kekuatan yang sebenarnya di tingkat desa jelas berada di tangan kelompok inti tersebut.

Berdasarkan kenyataan sistem agraris ini, maka Sistem Tanam Paksa diperkenalkan pada tahun 1830. Tujuannya adalah untuk mendapatkan komoditi-komoditi yang akan dapat dijual di pasaran dunia, dan untuk tujuan tersebut Sistem Tanam Paksa memakai lahan dan tenaga kerja dari orang-orang desa di Jawa yang dibujuk atau dipaksa oleh para kepala di atas tingkat desa. Hal tersebut harus dilakukan dalam batas-batas Sistem Sewa Tanah (Van Niel, 1964). Menarik untuk dikaji adalah bahwa an den Bosch masih berbicara

tentang *cacab* barangkali sisa pengalamannya sebelum itu di Jawa pada tahun-tahun pertama abad ke-19, dan ia rupanya sadar bahwa ikatan-ikatan vertikal dalam masyarakat Jawa.

Seperti sudah dinyatakan, Van den Bosch merencanakan untuk mempergunakan hal-hal tersebut, namun ternyata caranya telah diputarbalikan sehingga keluar selama tahun-tahun sistemnya dijalankan. Hubungan dengan cacah berlanjut sampai akhir tahun 1830, setelah mana konsep tersebut ditinggalkan untuk mengutamakan urusan dengan rumah-rumah tangga agar lebih banyak dapat menyerap tenaga kerja. Banyaknya kebutuhan tenaga kerja menjadikan perlunya penerapan suatu sistem yang dapat mengikatnya.

Akhir-akhir ini penelitian sejarah menengahkan informasi mengenai apa yang terjadi di desa-desa sesudah tahun 1830, ketika pemerintah mulai menyusun pola-pola produksi baru, informasi tersebut memberikan interpretasi yang berbeda atas kejadian-kejadian, berbeda dengan apa yang telah dikemukakan dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Bukti-bukti fisik dari Cirebon, Pekalongan, Jepara, dan Pasuruan-semua daerah dimana penanaman untuk pemerintah telah diperkenalkan, dan memperlihatkan bahwa kepemimpinan desa telah berhasil menarik keuntungan dari kebutuhan-kebutuhan pemerintah itu dan memperkuat kekuasaannya dan melakukan pendekatan pribadi di lingkungan struktur pedesaannya (Elson, 1979). Dengan menggunakan hak-hak tanah mereka, baik secara perorangan maupun kolektif resmi, dan terutama dengan menyalahgunakan tenaga kerja paksa yang berada di bawah pengawasan mereka, memungkinkan bagi mereka untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ke dalam. Dengan cara demikian, mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda, yakni memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintah di satu pihak, dan menjadikan dirinya makmur dari hasil pembayaran yang masuk ke desa di lain pihak. Kewenangan pendistribusiannya sangat tergantung dari kehendak para pemimpin tradisional. Selagi sistem tersebut berjalan terus, para pegawai negeri bangsa Belanda tidak henti-hentinya untuk mengatur dan mengawasi keuangan yang masuk ke desa demi keikutsertaan desa dalam sistem. Biasanya usaha-usaha menghadapi siasat yang digunakan para pemimpin desa untuk menguasai sebagian besar dari keuntungan-keuntungan itu tidak berhasil.

Dalam praktiknya, tidak semua desa mengadakan reaksi yang sama, tidak semua peraturan penanaman sama, dan tidak semua perubahan itu terjadi pada waktu yang bersamaan (Fernando, 1982). Jika diamati secara

mendalam, maka penelitian-penelitian yang baru memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih dapat dipahami, ketimbang terhadap pandangan-pandangan lama tentang pengaturan-pengaturan rumah tangga desa di Jawa sekarang. Dengan menggunakan istilah yang lebih sederhana, maka desa-desa di Jawa masa kini menunjukkan perbedaan sosial yang tegas serta riil antara penduduk desa yang kaya dengan penduduk desa yang miskin. Mereka pada umumnya tidak memperlihatkan pemerataan tingkat sosial maupun homogenitas sosial, yang disangka telah disebabkan oleh penerapan Sistem Tanam Paksa, berdasarkan tulus-tulus sejarah sosial sebelumnya. Di samping itu, desa-desa masa kini juga menunjukkan suatu kohesi yang kuat, sesuatu yang biasanya tidak akan dilukiskan sebagai suatu pengaruh disintegrasi yang terasa kemudian.

Apabila suatu pandangan mengenai perbedaan sosial dan kekuatan ketahanan ekonomi desa kedua-duanya ada manfaatnya, maka dua masalah yang berhubungan dengan hal tersebut harus dipertimbangkan. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah hak-hak kepemilikan tanah di dalam suatu desa dan berkesinambungan dengan tradisi-tradisi serta ikatan-ikatan sosial di antara para penduduk desa, dalam menghadapi perbedaan-perbedaan perekonomian yang lebih tajam. Dalam penulisan-penulisan sebelumnya, hak kepemilikan tanah mendapat perhatian besar, meskipun dalam konteks Eropa-centris, dan bukannya Jawa-centris. Masuknya lahan-lahan pedesaan ke dalam kekuasaan bersama, dalam artian bahwa penduduk desa yang jumlahnya semakin bertambah tersebut memiliki hak untuk memiliki dan menggarap sebidang lahan, maka pasti terjadi baik sebelum maupun selama Sistem Tanam Paksa dijalankan.

Oleh sebab itu dikebanyakan bagian di Jawa, hak untuk menggunakan sebidang lahan pedesaan dan kewajiban guna melakukan pelayanan kerja dengan segala variasinya saling terkait, maka pembagian hak yang lebih luas untuk menggarap sebidang lahan, merupakan cara yang wajar untuk memperbesar wadah tenaga kerja, yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja rodi dan pelayanan untuk penanaman. Namun bukti yang menunjukkan bahwa, kerja wajib juga dikenakan kepada orang-orang yang tidak mempunyai hak atas lahan sepanjang abad itu.

Bagi pengamat Barat terutama pada akhir abad ke-19, penguasaan bersama yang semakin meningkat dari pemilikan lahan itu secara sosial merusak ketertiban desa. Kondisi tersebut menimbulkan kesukaran bagi

pengaturan kontrak-kontrak perorangan untuk menyewa tanah atau lahan. Sementara pengaturan penguasaan bersama seringkali tidak meliputi hak penuh atas lahan tersebut, hanya terbatas pada penggunaannya dan juga sama atas hasilnya. Para pemimpin desa, yang hampir tidak pernah secara langsung menggarap lahan, dapat mempertahankan pengawasan sepenuhnya atas sebagian besar lahan-lahan pedesaan tersebut. Pengaturan-pengaturan kontrak dalam berbagai bentuk yang luas, tersedia bagi mereka dalam mempertahankan apa yang telah mereka miliki, sementara membiarkan orang lain menjalankan pekerjaan di ladang atau di mana saja.

Para petani kecil yang mandiri, yang bukan merupakan bagian dari lingkaran dalam desa itu atau yang telah melawan kemauan para pemimpin desa, barangkali telah mengakibatkan hidup mereka tersiksa. Secara ekonomis, orang-orang demikian telah mengalami kerugian bahkan dapat dilakukan pemaksaan untuk meninggalkan lahan dan desa mereka. Sedangkan rumah tangga-rumah tangga dan tenaga kerja yang tidak pernah memiliki tanah, tidak begitu terpengaruh oleh otoritas kepala desa, karena mereka dimanapun selalu bekerja untuk orang lain. Oleh sebab itu penguasaan-penguasaan bersama tersebut tampak seolah-olah menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial di desa, meskipun sebenarnya tidaklah demikian. Begitu juga keadaan tersebut tidak menimbulkan kesulitan yang berarti bagi para pengusaha perkebunan swasta yang ingin menyewa lahan-lahan pedesaan. Dalam hal ini, sekali lagi biasanya kepala desa menguasai keadaan dan sesuatu persetujuan selalu dapat dicapai.

Dalam struktur golongan sosial dan ekonomi desa ini, peralihan tidak secara keseluruhan mengubah ikatan yang menyatukan desa sebagai suatu kesatuan sosial dan sebagai suatu unit yang produktif. Meskipun para penduduk desa memahami perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi, desa juga tetap merupakan pusat sistem penghidupan bagi sebagian besar penduduk. Benar, orang-orang berpindah ke kota dan menjabat pekerjaan bukan jenis pertanian, sedangkan yang lain-lain menggabungkan diri dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspor. Tetapi sebagian besar orang Jawa, tetapi tinggal di desanya.

Bahkan sebagian dari mereka yang tampaknya sama sekali terpisah, memelihara ikatan dengan desanya dalam berbagai cara. Pengaturan yang sedikit banyaknya bersifat ganda ini, ternyata merupakan salah satu batu-batu fondasi dari cara pengaturan tenaga buruh murah yang menguntungkan bagi

sektor ekspor dari perekonomian. Desa, yang mengumpulkan dan mengelola penyediaan tenaga buruh murah ini, harus mempertahankan ikatan-ikatan dan hubungan-hubungan tradisional agar dapat memenuhi fungsi yang tidak dihapuskan ini dengan cara mengubah buruh-paksa menjadi buruh yang diberi upah, sebab tingkat upah yang rendah tergantung pada simbiose yang berkesinambungan antara ekspor swasta dengan ekonomi pedesaan.

Dalam konteks inilah para pemimpin desa harus membangun dan memperluas kekuasaan mereka. Kenyataan-kenyataan itu tidak menyebabkan mereka menjadi petani mandiri yang berorientasi pada pasar, walaupun dalam bidang ini mereka memang melakukan fungsi-fungsi sebagai perantara. Mereka tidak dapat mengabaikan hubungan-hubungan sosial desa, karena desalah satu-satunya yang merupakan tumpuan mereka sebagai basis kelembagaan yang tunggal untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan yang berkesinambungan. Dalam kaitan suatu sistem ekonomi yang padat karya, maka para pemimpin desa, untuk kemajuan ekonomi mereka sendiri baik di desa maupun dengan sektor yang berorientasi pada ekspor, harus mempertahankan ikatan-ikatan tradisional dan kewajiban-kewajiban sosial. Karena dengan dipertahankannya sistem sosial tradisional, maka para pemimpin desa akan mudah memperoleh tenaga kerja baik untuk kepentingannya sendiri, maupun untuk pengabdian atau melayani pemerintah kolonial.

Akhirnya yang menjadi objek pemerasan adalah penduduk, yakni disamping harus memenuhi tuntutan pemerintah kolonial, di lain sisi harus tunduk pada para kepala desa sebagai pemimpin tradisional mereka. Tidak heran apabila ketika terjadi resistensi yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa tertindas, maka yang paling pertama menjadi sasaran adalah para pemimpin tradisional. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat merekalah para pemimpin tradisional yang dirasa secara langsung melakukan politik eksploitasi terhadap rakyat, baik berkenaan dengan masalah tanah, maupun yang berhubungan dengan tenaga kerja. Memang terdapat tesis yang mengatakan bahwa para pemimpin tradisional juga sebenarnya merasa tertekan oleh tindakan pemerintah kolonial, sehingga mereka terpaksa harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak alamiah dan rasional terhadap penduduk.

Tesis tersebut tampaknya tidak dapat seluruhnya dapat digeneralisasikan mengingat banyak penduduk yang hidupnya tertekan di bawah payung birokrat yang selama itu sangat menyengsarakan. Sistem Tanam

Paksa jelas-jelas telah mendatangkan kesengsaraan berkesinambungan terhadap hidup rakyat, meskipun tidak secara menyeluruh seperti halnya yang terjadi di luar Pulau Jawa. Sebagaimana yang telah dibahas dimuka, maka pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Luar Jawa, dampaknya bagi masyarakat tidak separah sebagaimana halnya yang terjadi di Jawa, kalau tidak dikatakan hampir tidak berdampak sama sekali. Hal tersebut dikarenakan di luar Pulau Jawa tanam paksa telah berjalan sebelum di Jawa di berlakukan, dan diterapkan di lahan-lahan tidur yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk. Meskipun dalam hal ikatan tradisional di luar Jawa juga terjadi kerja paksa berdasarkan ikatan-ikatan tradisional, tetapi dampaknya tidak separah di Jawa.

BAB V

DIMENSI-DIMENSI KOLONIALISME DI HINDIA BELANDA

A. Pengaruh Kolonial di Berbagai Daerah

1. Latar Belakang Terjadinya Pengaruh Kekuasaan Kolonial

Kebijakan pemerintah kolonial antar berbagai daerah di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

a. Karena perbedaan alam

Kondisi alam baik geografis, topografis, maupun demografis sangat mempengaruhi pola kebijakan pemerintah kolonial. Untuk daerah pertanian, pemerintah kolonial menerapkan sistem pemerintahan dengan mengutamakan pengembangan hasil-hasil pertanian. Untuk daerah perkebunan, di situlah pemerintah akan menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan perkebunan.

b. Perbedaan letak/nilai strategis

Letak suatu daerah sangat menentukan pengaruh kekuasaan kolonial. Pada dasarnya tidak seluruh daerah Indonesia mampu tersentuh kekuasaan kolonial. Pemerintah kolonial mengutamakan pantai sebagai bandar perdagangan untuk memperlancar arus sirkulasi bahan ekspor.

c. Perbedaan pendekatan kaum kolonial

Setiap wilayah mempunyai reaksi atau tanggapan yang berbeda dengan kedatangan kolonial. Ketika kekuatan kolonial muncul, ada yang langsung menunjukkan sikap kooperatif, ada pula yang langsung menganggapnya sebagai musuh. Kaum kolonial harus melakukan strategi dalam menghadapi berbagai keadaan ini.

d. Kekuasaan/kekuatan politik

Pendekatan kaum kolonial juga berdasarkan oleh kekuatan kekuasaan politik wilayah setempat. Terhadap kerajaan yang masih kuat dan besar, kaum kolonial akan berhati-hati dalam menanamkan pengaruhnya.

2. Perbedaan Pengaruh Antar Daerah di Indonesia

Karena latar belakang di atas, maka terjadi perbedaan pengaruh antar daerah di Indonesia. Pada masa awal, kaum kolonial lebih mudah menanamkan kekuasaan politiknya di daerah Indonesia timur, seperti Maluku dan Sulawesi. Dalam hal politik kaum kolonial diuntungkan oleh persaingan antar kerajaan kecil, sehingga dengan mudah kaum kolonial mampu menanamkan hegemoni.

Wilayah Indonesia bagian timur merupakan daerah perkebunan rempah-rempah, sehingga eksploitasi kaum kolonial-pun dalam komoditas rempah-rempah. Hal demikian juga mirip yang terjadi di daerah Sulawesi dan sekitarnya. Fenomena ini berbeda dengan keadaan di Jawa sebagai daerah agraris pertanian. Belanda-pun melakukan eksploitasi menggunakan lahan pertanian tersebut. Walaupun kemudian pola tersebut berubah, karena Belanda kemudian mengubah pola pertanian pangan menjadi perkebunan. Akibatnya rakyat Jawa sangat menderita.

Eksplorasi sumber daya alam bagi masyarakat Jawa merupakan yang terberat dibanding daerah-daerah lain di luar Jawa. Rakyat Jawa merupakan penduduk yang paling menderita disbanding daerah lain, mengapa? Sebab Jawa adalah wilayah yang paling padat penduduknya, dan sistem politiknya relatif lebih mapan dibandingkan daerah lain. Belanda dengan mudah memanfaatkan sistem administrasi dan politik yang telah ada untuk melakukan eksploitasi.

Jawa juga merupakan pusat politik kekuasaan kolonial Belanda. Pada awalnya, kekuasaan politik dan ekonomi ada di daerah timur (Maluku). Seiring perkembangan politik, Belanda mengalihkan pusat kekuasaan ke Jawa (Batavia). Selain untuk mengamankan daerah barat dari ancaman Portugis di Malaka. Belanda juga memandang bahwa Jawa lebih strategis untuk lalu-lintas perdagangan.

Perluasan penguasaan VOC ke luar Jawa terutama setelah masuknya investasi perkebunan swasta terutama di Sumatera. Keadaan tersebut mendorong Belanda semakin meningkatkan eksploitasi di luar Jawa pada abad XIX. Sebelumnya VOC kurang serius menguasai daerah luar pulau Jawa.

Sangat wajar apabila masyarakat Jawa lebih dahulu hancur dibandingkan daerah luar Jawa. Perluasan penguasaan semakin tegas memasuki abad XX dengan munculnya politik etnis. Kebijakan ini telah membuka pintu semakin lebar dalam mengeksploitasi daerah luar Jawa. Apalagi pada awal abad XX seluruh Indonesia telah menjadi kekuasaan Belanda.

B. Perlawanan bangsa Indonesia Terhadap Hindia Belanda Abad XIX

Sebelum masa pemerintahan Hindia Belanda rakyat Indonesia telah melakukan perlawanan di berbagai daerah. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, perlawanan rakyat semakin besar. Berbagai peristiwa perang besar terjadi pada abad XIX. Hal ini tidak lepas dari semakin besarnya napsu Belanda menguasai Indonesia dan semakin beratnya penderitaan bangsa Indonesia.

Hingga akhir abad XVIII, Belanda belum berhasil menguasai Indonesia secara keseluruhan. Masih banyak kerajaan-kerajaan besar yang didukung kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi ancaman Belanda. Perlawanan abad XIX benar-benar membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar. Bahkan beberapa kali Belanda mengalami krisis keuangan karena menghadapi perlawanan-perlawanan tersebut.

1. Perang Saparua di Ambon

Kalian masih ingat dengan kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda 1811–1816? Peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan rakyat, bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan dipimpin *Thomas Matulesi* (Pattimura). *Pattimura* memimpin pemberontakan di Saparua, dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen *van den Berg*. Pemberontakan *Pattimura* dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. *Pattimura* bersama tiga pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung.

2. Perang Paderi di Sumatera Barat (1821–1838)

Minangkabau Sumatra Barat merupakan pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan Wahabiah yang bertujuan memurnikan ajaran Islam dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Malik, dan Haji Piabang. Kelompok pembaharu Islam di Sumatera Barat ini Kaum Padri disebut Kaum Putih, karena selalu mengenakan jubah putih, sedangkan Kaum Adat disebut Kaum Hitam, karena selalu mengenakan jubah hitam. Simbol pakaian ini yang memperuncing

perselisihan. Gerakan Padri menentang perjudian, dan aspek hukum garis keturunan/hukum adat disebut sebagai Kaum Padri.

Ide pembaharuan Kaum Paderi berbenturan dengan kelompok adat/Kaum Penghulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung Kaum Adat yang posisinya sudah terjepit. Pada bulan Februari 1821 Kaum Penghulu (Adat) menandatangani perjanjian yang menyerahkan kekuasaan Minangkabau kepada Belanda sebagai imbalan bantuan Belanda untuk membantu Kaum Adat melawan Kaum Padri.

a. Perlawanan Padri Tahap I (1821–1825)

Perlawanan kaum Padri berubah dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol (M Syahab), Tuanku nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil mendesak benteng-benteng Belanda. Karena di Jawa Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro (1825–1830), Belanda akhirnya melakukan perdamaian di Bonjol tanggal 15 Nopember 1825.

b. Perang Padri Tahap II (1825–1837)

Belanda menitikberatkan menghadapi perlawanan Diponegoro hingga tahun 1830. Setelah itu Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan Padri. Kaum Adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya banyak yang mendukung perjuangan Padri. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung pejuang Padri.

Setelah berhasil memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa, Belanda kembali konsentrasi menghadapi perang Padri. Belanda bahkan berhasil memanfaatkan *Sentot Ali Basyah Prawiryodirjo* salah satu pimpinan pasukan Diponegoro yang telah menyerah kepada Belanda untuk turut memperkuat pasukan Belanda. Kekuatan Belanda benar-benar pulih, apalagi dengan banyaknya tentara sewaan dari orang pribumi.

Belanda menerapkan sistem pertahanan *Benteng Stelsel*. Benteng *Fort de Kock* di Bukittinggi dan Benteng *Fort van der Cappelen* merupakan dua benteng pertahanan. Dengan siasat ini akhirnya Belanda menang ditandai jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun **1837**. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Menado hingga wafat tahun 1864. Berakhirnya Perang Padri, membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin besar. Keadaan ini kemudian mendukung usaha Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera yang lain.

3. Perang Diponegoro di Jawa Tengah (Yogyakarta) 1825–1830

Latar belakang perlawanan Pangeran Diponegoro diawali dari campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta Meninggalnya Hamengkubuwono IV tahun 1822 menimbulkan perselisihan tentang penggantinya. Saat itu putra mahkota baru berumur 3 tahun. Penderitaan rakyat semakin menjadi, terutama kegagalan panen pada tahun 1820-an. Di samping itu, rakyat sudah jenuh dengan perlakuan Belanda yang tidak pernah menghormati hak-hak rakyat.

Belanda membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, dengan memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadi perselisihan saat pengikut Diponegoro Patih Danureja IV mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Tanggal 20 Juli Tegalrejo direbut dan dibakar Belanda.

Diponegoro berhasil meloloskan diri dan segera mengumandangkan **Perang Jawa** (1825–1830). Pemberontakan tersebut menjalar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun pusat perlawanan di kawasan Yogyakarta. Limabelas dari 29 pangeran bergabung mendukung Diponegoro. Belanda benar-benar terjepit. Belanda berusaha membujuk pemberontak dengan memulangkan Hamengkubuwono II dari pengasingannya di Ambon. Tetapi langkah ini gagal. Kemudian Belanda mencoba menerapkan siasat *benteng-stelsel*. Dengan sistem ini Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh.

Pada tahun 1829 Kyai Maja ditangkap Belanda. Kemudian disusul Pangeran Mangkubumi, dan panglima Sentot Ali Basyah Prawiryodirjo. Setelah kekalahan ini, Sentot Ali Basyah terpaksa menjalankan tugas membantu Belanda dalam menumpas perang Padri di Sumatra Barat. Pada bulan Maret 1830 Diponegoro akhirnya mau mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat. Karena kemudian Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makasar hingga wafat tahun 1855. Dengan berakhirnya Perang Jawa (Diponegoro), tidak lagi muncul perlawanan yang lebih berat di Jawa. Perang Diponegoro adalah perlawanan besar. Sebanyak 8000 serdadu Belanda, dan 7000 tentara sewaan Belanda mati. Lebih dari 200.000 penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta tewas. Sehingga penduduk Yogyakarta hanya tinggal setengahnya. Betapa gigihnya bangsa kita untuk menegakan keadilan dan mempertahankan harga diri!

4. Perang Aceh (1873–1904)

Pada tahun 1871 diadakan Traktat London, dimana Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris, dan Belanda mendapat hak di Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh tahun 1873. Saat itu Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baiturrahim sebagai benteng pertahanan Aceh 14 April 1873. Dengan semangat *jihad* (perang membela agama Islam) rakyat mengadakan perlawanan. Jendral Kohler terbunuh. Siasat *konsentrasi stelsel* dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar, dan keuangan terus terkuras.

Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, akhirnya Belanda mengutus *Dr Snouck Hurgronje* yang memakai nama samaran *Abdul Gafar* seorang ahli bahasa, sejarah dan sosial Islam untuk mencari kelemahan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snouck Hurgronje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hurgronje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan *uleebalang* (bangsawan) dengan ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada *uleebalang* yang bersedia damai. Taktik ini berhasil, dimana banyak *uleebalang* yang tertarik pada tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para *Uleebalang* apabila Kaum Ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898 kedudukan Aceh semakin terdesak.

Para tokohnya banyak yang gugur. Teuku Umar gugur di pertempuran Meulaboh 1899. Sultan Aceh Mohammad Daudsyah dapat ditawan tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Panglima Polem Mohammad Daud juga menyerah tahun 1903. Cut Nyak Dien, tokoh pemimpin perempuan ditangkap tahun 1905 kemudian diasingkan ke Sumedang. Gugurnya pahlawan perempuan Cut Meutia tahun 1910, perlawanan Aceh terus menyusut. Hingga tahun 1917 Belanda masih melakukan pengejaran, sebagai tanda bahwa perlawanan Aceh tidak pernah padam. Belanda sendiri telah mengumumkan perang Aceh selesai tahun 1904.

5. Perlawanan Sisingamangaraja Sumatera Utara (1878–1907)

Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan Sisingamangaraja XII. Perlawanan di Sumatera Utara berlangsung selama 24

tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu sebagai pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak (sebutan perang di Sumatera Utara), Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau Patuan Nagari dan Patuan Anggi ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda.

6. Perang Banjar (1858–1866)

Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjid Ullah yang tidak disukai rakyat. Pemberontakan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom tertangkap Belanda. Dengan bantuan pasukan dari Belanda, pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah, dan berakhirilah perlawanan Banjar di pulau Kalimantan. Pemberontakan benar-benar dapat dipadamkan tahun 1866.

7. Perang Jagaraga di Bali (1849–1906)

Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang *hak taman karang*. Hak taman karang berisi bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali merupakan hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh Kerajaan Karangasem.

Setelah berhasil merebut Benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. Dua kerajaan Bali Gianyar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda. Tahun 1906 seluruh kerajaan di Bali jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, yang dikenal dengan *perang puputan*.



Perlawanan Penting hingga awal abad XX

8. Perlawanan Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah gerakan protes berupa perlawanan yang dilakukan oleh petani, gerakan ratu adil, dan gerakan keagamaan atau kepercayaan. Banyak sekali perlawanan yang tidak dilakukan oleh bangsawan/kerajaan terhadap kekuasaan Belanda. *Gerakan petani* biasanya dilakukan oleh petani karena kesewenang-wenangan penguasa. Benturan deengan hukum adat dan masalah upah sebagai penyebab perlawanan petani. Pelopornya biasanya orang yang berpengaruh di lingkungan tersebut. Gerakan ini bersifat sementara, karena biasanya berhenti setelah pemimpinnya menyerah atau mati. Contoh gerakan petani adalah perlawanan petani di Ciomas Jawa Barat tahun 1886, perlawananan Condet (Jakarta) tahun 1916 dipimpin Entong Gendut, dan sebagainya.

Gerakan Ratu Adil adalah gerakan yang muncul sebagai akibat keyakinan akan datangnya ratu adil. Ratu adil dianggap yang akan menyelamatkan rakyat dari belenggu penindasan. Pemimpinnya biasanya mengaku mendapat wahyu untuk menyelamatkan rakyat. *Gerakan keagamaan*, adalah gerakan yang muncul sebagai dasar keagamaan terutama untuk menegakan syari'at yang benar/pembaharuan. Ketiga gerakan sosial ini sangat mempengaruhi perang-perang besar yang terjadi di Indonesia. Di samping itu mereka juga sering melakukan perlawanan-perlawanan kecil, yang biasanya sangat mudah dipatahkan Belanda.

C. Perkembangan Agama-agama pada Masa Kolonial

Sebagaimana sudah disebutkan, salah satu pendorong misi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah Gospel yaitu menyebarkan agama Nasrani.

Secara garis besar, Agama Nasrani dibedakan dalam agama Katholik dan agama Kristen Protestan. Para penyebar agama Katolik disebut misionaris. Para misionaris ini umumnya dibantu oleh para *pastor*, *bruder*, dan *suster*. Sedangkan *zending* adalah sebutan para penyebar agama Kristen Protestan. Zending berasal dari bahasa Belanda yang artinya penyebar.

1. Perkembangan Agama Katolik di Berbagai Daerah Indonesia

Pada akhir abad 13 telah ada beberapa pastor datang ke kawasan Nusantara. Bukti paling awal menunjukkan bahwa pada tahun 1291, Pastor J. de Monte Corvio OFM telah mengunjungi pantai timur Sumatera. Corvio singgah dalam misinya menuju China. Kedatangan Pastor ini kemudian disusul Rohaniawan Fransiskan bernama Odorico de Pordonone. Ia singgah di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa pada tahun 1321.

a. Perkembangan di Maluku

Bukti keberadaan agama Katolik di Maluku paling awal dikaitkan dengan pembangunan Benteng Sao Paulo milik Portugis di Maluku. Pada acara peletakan batu pertama benteng tanggal 24 Juni 1522, banyak orang Maluku yang dipermandikan untuk menjadi Katolik. Proses perkembangan agama Katolik semakin intensif ketika pada tahun 1545–1546 armada Spanyol berlabuh di Maluku. Didalam rombongan tersebut terdapat 4 orang imam dari ordo Santo Augustinus. Keempat imam ini bertemu dengan Pastor Fransiskus Xaverius di Ambon. Fransiskus Xaverius (1546–1547) adalah misionaris yang gigih dalam menyebarkan agama Katolik di Ambon, Ternate, dan Halmahera. Pada saat itu di Ambon telah berhasil didirikan 4 gereja Katolik, dengan pemeluk 16.000 orang. Pada saat itu kerajaan-kerajaan di Maluku seperti Ternate, Tidore, Hitu di Ambon sudah memeluk Islam.

Agama Katolik nampaknya kurang dapat berkembang lebih jauh di Maluku. Hal ini disebabkan panglima Benteng Sao Paulo *Tristao d'Atayde* kurang bisa membina persahabatan dengan penduduk asli. Muncul kemudian kebencian dan pemberontakan kepada Portugis. Kebencian tersebut berpengaruh pada keberadaan agama Katolik. Agama Katolik diidentikkan sebagai agama kaum penjajah. Beberapa orang Portugis mati, dan Pastor Simon vaz dibunuh di Pulau Morotai.

b. Perkembangan di Sumatera

Usaha penyebaran agama Katolik di Aceh dimulai sejak tahun 1600. Penyebaran ini dilakukan oleh Pastor Amaro. Pada tahun 1638 datang gelombang misionaris kedua. Karena pertentangan Aceh dengan Portugis,

para misionaris ikut terbunuh. Usaha penyebaran agama Katolik dilakukan kembali antara tahun 1668–1788. Penyebaran ini dapat dilakukan karena hubungan Aceh Portugis telah membaik. Para misionaris dikirim dari Goa, dan membangun gereja serta pastoran di Aceh. Kegiatan mereka masih terfokus untuk melayani orang-orang Eropa.

c. Perkembangan di Jawa

Antara tahun 1569–1599, para imam Fransiskan berhasil melakukan penyebaran agama Katolik di daerah Blambangan. Keberhasilan ini mendorong para misionaris untuk datang ke Jawa. Pada tahun 1622–1783 para misionaris telah melakukan kunjungan di pantai utara Jawa. Mereka berhasil mendirikan pos-pos misi Katolik di Cirebon, Magelang, Bogor, Malang, dan Madiun.

Pusat misi Katolik di Jawa Tengah adalah Muntilan dan Mendud (Magelang). Salah seorang perintis Gereja Katolik terkenal Jawa Tengah adalah Pastor Fransiskus Van Lith SJ(1863–1926). Ia giat melakukan penyebaran agama Katolik melalui media pendidikan dan sosial. Untuk itu didirikanlah sekolah-sekolah. Pada akhir tahun 1923, telah berdiri kurang lebih 52 sekolah Katolik, dengan 5.840 murid.

d. Perkembangan di Flores

Perkembangan agama Katolik yang tergolong cepat di samping di wilayah Muntilan, Magelang, juga terjadi di wilayah Flores. Antara tahun 1569–1599 agama Katolik telah berkembang di wilayah ini. Tokoh terkenal dalam penyebaran ini adalah Pastor Antonia Taveira. Pada abad XVIII para misionaris hanya memusatkan penyebaran agama Katolik di Dilli, Timor Leste(Timor Loro Sae). Sampai sekitar tahun 1900 jumlah keseluruhan umat Katolik di Indonesia adalah 50.300 orang. Adapun bangunan sekolah Katolik yang didirikan mencapai 69, dengan rincian 12 di Jakarta, 10 di Semarang, 22 di Sulawesi Utara, dan 5 di Flores Timur.

2. Perkembangan Agama Kristen Protestan di Berbagai Daerah Indonesia

Di samping agama Katolik, pada jaman kolonial juga berkembang agama Kristen Protestan. Penyebaran agama Kristen Protestan banyak dilakukan oleh para pendeta Belanda.

a. Perkembangan di Sulawesi

Agama Kristen Protestan masuk ke Minahasa pada tahun 1831. Agama ini disebarkan oleh Zending dibawah pimpinan Pendeta Riedel dan

Schar. Untuk mengintensifkan penyebaran agama Kristen Protestan mereka mendirikan sekolah pendidikan guru (Kweekschool) tahun 1850. Kemudian pada tahun 1868 didirikanlah Sekolah Guru Injil di Tomohon. Penyebaran agama Kristen Protestan ini dapat berjalan baik karena mendapat sponsor dari *Nederlandsch Zendelings Genootschap* (NZG) yang berkedudukan di Rotterdam.

b. Maluku

Penyebar agama Kristen Protestan di Maluku yang terkenal adalah Joseph Kam. Di Maluku ia aktif menyebarkan agama Kristen Protestan. Untuk memperlancar dan mengefektifkan penyebaran agama ia mendirikan kegiatan pendidikan untuk pribumi.

c. Jawa

Antara abad ke-17 dan ke-18 kurang lebih terdapat 154 pendeta yang aktif dalam penyebaran agama Kristen di Jawa. Pada masa Inggris, untuk menyebarkan agama Kristen Protestan *Nederlandsch Zendelings Genootschap* (NZG) bekerja sama dengan London Mission Society. Dengan kerjasama ini penyebaran agama menjadi lebih efektif.

Perkembangan Kristen di Jawa semakin pesat. Hal ini ditandai dengan berdirinya Sinode GKJ (Gereja Kristen Jawa). Untuk memperingati berdirinya Sinode GKJ tanggal 17 Februari dijadikan sebagai hari lahir Sinode GKJ. Untuk wilayah Jawa Barat dan Jakarta didirikan GKP (Gereja Kristen Pasundan). Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Nopember 1934 berdiri.

d. Sumatera

Penyebaran agama Kristen Protestan di Sumatera dipelopori oleh Dr Nomensen. Penyebaran itu terjadi kurang lebih pada tahun 1860. Saat itu tanah Batak dipimpin Sisingamangaraja XI. Penyebaran agama Kristen Protestan di wilayah ini memang cukup berhasil. Dalam perkembangan selanjutnya, agama Kristen menjadi salah satu agama yang banyak dianut masyarakat di Sumatera Utara. Dalam penyebaran agama Kristen Protestan wilayah ini memang memegang peranan yang penting. Dari daerah ini agama Kristen selanjutnya disebarkan ke daerah Kalimantan bagian barat.

3. Perkembangan Agama Islam di berbagai daerah Indonesia pada Masa Kolonial

Tujuan misionaris dengan tujuan ekonomi dan politik bangsa-bangsa Barat ke Indonesia berbeda. Namun karena keberadaan mereka yang beriringan baik waktu datang maupun tempat tinggal yang mereka tempati, sering menyebabkan persepsi sebagian masyarakat Indonesia pada saat itu

bahwa misionaris identik dengan penjajahan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan politik yang ada diantara keduanya.

Peristiwa yang menjadi momentum berubahnya peta Islamisasi di Indonesia, adalah kejatuhan Malaka tahun 1511, dan Ternate 1522 oleh Portugis. Pada saat itu Malaka dan Maluku merupakan pusat-pusat persebaran Islam di Nusantara. Dampak *negatif* yang timbul adalah bahwa pintu masuk Islamisasi melalui selat Malaka terhambat oleh kekuasaan Portugis (Daulay, 2021: 49). Selain itu, bahwa kekuasaan politik Islam mulai terancam oleh keberadaan Portugis. Namun demikian, penguasaan Malaka juga memberikan dampak positif bagi perkembangan Islam di Nusantara.

- a. Dengan jatuhnya Malaka, para saudagar dan penyebar agama Islam mencari jalan lain, yakni pantai barat Sumatera, sehingga Islam semakin merasuk di wilayah Nusantara. Setelah Malaka jatuh, maka saudagar-saudagar Islam memusatkan perhatian pada pusat-pusat perdagangan di Aceh, Sumatera Utara, Banten, Demak, melalui selat Sunda. Dari lokasi tersebut mereka terus melakukan perjalanan ke timur hingga Borneo dan Maluku.
- b. Tumbuhnya Islam sebagai kekuatan politik di wilayah Nusantara. Pada masa awal kedatangan bangsa Barat, Islam telah tumbuh dengan suburnya di Nusantara. Perkembangan pendidikan, pusat perdagangan dan politik yang kuat. Pada abad XVI, di Jawa tumbuh dua kerajaan besar dan kuat, yakni Mataram dan Banten. Demikian juga dengan daerah-daerah lain seperti Aceh, Padang, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan-kerajaan Islam inilah yang pada masa penjajahan berikutnya banyak berperan dalam mengusir penjajah.

Perkembangan agama lain selain Islam dan Kristen di Indonesia tidaklah terlalu menonjol. Agama Hindu dan Buddha telah mengalami kemunduran sejak berkembangnya agama Islam dan munculnya Islam sebagai kekuatan politik. Hanya pulau Bali dan Jawa bagian timur yang masih besar penganut Hindu dan Buddha. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda mulai awal abad XIX, bangsa Indonesia tidak semakin berkurang penderitannya. Bahkan Pemerintah Belanda semakin luas menguasai wilayah Indonesia. Berbagai kerajaan Islam yang telah lama berkembang mulai runtuh atau semakin berkurang kekuasaannya. Kondisi ini menyebabkan berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah.

Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dipimpin oleh para tokoh kerajaan didukung sebagian besar masyarakat. Perang Padri di Sumatera Barat, Perang Diponegoro di Yogyakarta dan Jawa Tengah, perang Aceh, adalah contoh perlawanan terbesar yang menyaingi kekuatan Belanda. Dengan berbagai tipu muslihat, akhirnya Belanda mampu mematahkan berbagai perlawanan tersebut. Pelajaran berharga dari kegagalan perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah untuk mengusir Belanda adalah perlawanan yang sendiri-sendiri. Dengan perlawanan sendiri-sendiri, Belanda lebih mudah mematahkan, apalagi dengan strategi adu domba. Akhirnya pada akhir abad XIX sebagian besar wilayah Indonesia telah berhasil dikuasai Belanda.

Akibat kolonialisme Belanda di Indonesia, penderitaan rakyat semakin bertambah. Kondisi sosial dan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Secara politik, kerajaan-kerajaan di Indonesia telah berada di bawah kendali Belanda. Masuknya budaya Barat ke Indonesia merupakan dampak lain seperti dalam berpakaian, bergaul, dan sistem ekonomi. Di sisi lain, perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Kristen dan Katholik di tanah air. Penyebaran agama Kristen dan Katholik tidak identik dengan penjajahan. Sebab misionaris yang datang ke Indonesia memiliki tujuan khusus dalam menyebarkan agama.

BAB VI

KONSEP NASIONALISME DALAM MASYARAKAT PRIMITIF

A. Kepemimpinan Masyarakat Kesukuan

Jika membahas perkembangan negara dari suatu organisasi yang sangat sederhana sampai yang modern, pada umumnya ahli-ahli ilmu politik selalu berpijak dalam bidang antropologi. Dua bidang antropologi ini dalam hubungannya dengan negara membahas organisasi, pemimpin, tradisi, dan kebudayaan. Oleh karena itu bidang antropologi politik sebagai pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegaraan, tidak terlepas dari kerangka politik yang mendukungnya.

Ada satu buku yang berjudul *Antropologi Sosial: Sebuah Pengantar*, karangan Huizinga, salah satu babnya membahas bentuk-bentuk negara yang primitif. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa bentuk yang paling umum dari sistem politik di antara masyarakat-masyarakat yang dipelajari oleh ahli antropologi ternyata masyarakat tersebut sudah dapat dinamakan *state*, meskipun masyarakat tersebut tergolong primitif yang tinggal secara terisolasi di pedalaman. Masyarakat kesukuan atau primitif ini oleh ahli antropologi di namakan *tribe*. Dari pendekatan antropologi sosial dan politik *tribe* sudah mempunyai sistem politik. Masyarakat kesukuan berdasarkan kajian antropologi mempunyai ciri-ciri: (1) jumlah penduduk biasanya sedikit dibandingkan dengan masyarakat modern ini, hanya ada beberapa keluarga yang mendiami wilayah-wilayah kesukuan; (2) masyarakat kesukuan sangat tergantung pada alam, bahkan masyarakat tersebut mengisolasi di alam.

Berdasarkan teori antropologi, yang dibangun oleh para ahli antropologi Eropa Barat yang mempelajari masalah masyarakat di Asia sebagai tanah koloni, antara lain dijelaskan bahwa masyarakat-masyarakat kesukuan

sebenarnya merupakan masyarakat yang sudah mempunyai sistem kekuasaan, dan hal ini dapat dilihat dari pemimpin-pemimpin sukunya. Adapun ciri-ciri pemimpin atau kepala masyarakat kesukuan antara lain: (1) mempunyai kelebihan dari kemampuan rata-rata anggota suku, misalnya keberanian, melindungi warga suku dari suku lain, yang oleh ahli antropologi disebut "*primus inter pares*", yang artinya satu-satunya *primus inter clas*; (2) mempunyai pengetahuan dalam hal adat-istiadat, memimpin ritual, dan penyerbuan; (3) seorang pemimpin kesukuan mampu menciptakan suasana kekerabatan yang baik, sehingga unsur-unsur dendam dapat dihilangkan. Oleh karena itu pemimpin kesukuan harus kerja sama dalam warga kesukuan.

Masyarakat kesukuan yang primitif termasuk budayanya mencakup tahap ontologi, yaitu tahap dimana hakikat dasar hidupnya sangat tergantung pada alam. Tahap ini diperkuat dengan tahap mistis, yaitu tahap memitoskan alam dengan berbagai ritual seperti upacara. Sedangkan dalam masyarakat modern, tahapannya sudah memasuki tahap fungsional, di mana logika, nalar, pikiran, mulai digunakan untuk menguasai alam, dan tidak tergantung pada alam. Tetapi dalam beberapa kasus masyarakat modern seringkali lari pada tahap mistis.

Terbentuknya kepemimpinan masyarakat kesukuan, dapat dimulai dari Indonesia dan membandingkannya dengan suku lain di dunia terutama Afrika dan Amerika Latin. Untuk Indonesia dapat dipilih tentang masyarakat kesukuan yang ada di Irian Jaya. Adapun alasannya adalah: (1) di Irian Jaya hingga saat ini, masyarakat kesukuan masih dapat dilacak ciri-ciri aslinya; (2) Ada sebagian masyarakat kesukuan di Irian Jaya, misalnya di Jaya Wijaya yang merupakan wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, yang meninggalkan zaman neolitikum baru sekitar dua dekade atau 20 tahun. Ini berarti bahwa masyarakat kesukuan dapat direkam ciri-ciri kepemimpinan kesukuan yang dalam beberapa literatur disebut *primus inter pares*, yaitu satu-satunya tokoh dari sekian banyak orang.

Salah satu buku yang menjelaskan *primus inter pares* dalam masyarakat internasional adalah *Indonesian Sociological Studies*, karangan B.Schrieke terbitan tahun 1960 Sumur Bandung, Bandung. Dalam konsep *primus inter pares* ini, maka membahas masyarakat kesukuan ini, masih sangat relevan. Dan pada umumnya konsep kepemimpinan *primus inter pares* tidak dianut dalam masyarakat demokratis dan masyarakat modern. (3) Suku-suku Irian Jaya, dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia masih dapat menunjukkan

hubungan yang erat dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tahap pemikirannya dapat dimasukkan dalam tahap mistis dan ontologis. Sedangkan suku bangsa lainnya yang sudah modern, dapat digolongkan dalam tahap fungsional.

Buku yang merupakan sumber informasi tentang Irian Jaya telah banyak ditulis oleh para ahli antropologi dan sosiologi. Profesor Koentjaraningrat 1964, menerbitkan buku tebal tentang *Penduduk Irian Jaya*, di samping artikel-artikel kecil tentang Irian Jaya yang sangat bermanfaat untuk ditelaah lebih lanjut. Di samping itu banyak pula sarjana-sarjana asing menulis tentang Irian Jaya. Dari sejumlah karangan itu, dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri masyarakat kesukuan, yakni: (1) masyarakat sangat terikat pada lingkungan sekitarnya, karena berada pada tahap mistis dan ontologis; (2) orientasi pada nenek moyang. Kebiasaan menghiasi badan sebagai bagian dari ritualistik kepercayaan. Banyak yang menghias badannya dengan kayu, daun, dan beberapa anggota tubuh hewan. Biasanya ritualistik ini dibedakan menjadi tiga bagian yaitu untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Hiasan ini membedakan ritual status sosial yang dijalankan oleh kelompok masyarakat kesukuan.

B. *Tribe Communities dan Feudal Society*

Perkembangan negara dilihat dari keanekaragaman perkembangan masyarakat kesukuan "*tribe communities*" dan "*feudal society*", nampaknya agak sulit untuk melangkah suatu hubungan linear bahwa masyarakat feodal merupakan perkembangan dari "*tribe communities*". Dalam kenyataannya, ada "*tribe communities*" yang selamanya menjadi komunitas kesukuan. Tetapi di beberapa masyarakat di dunia, masyarakat kesukuan berkembang menjadi masyarakat kerajaan, misalnya masyarakat kesukuan di Benua Afrika.

Di Indonesia, pengertian masyarakat kerajaan bukan merupakan perkembangan langsung dari masyarakat kesukuan, misalnya pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan bergeser ke Jawa Timur, tidak dapat disebut sebagai perkembangan masyarakat kesukuan. Hingga saat ini keragaman suku di Irian Jaya, meskipun dalam era modern, tidak membentuk masyarakat kerajaan. Berpuluh-puluh suku di Irian Jaya, dengan bahasa lokalnya yang berbeda-beda tetap menjadi masyarakat kesukuan dengan ciri-cirinya berburu, beternak, dan sebagian ada yang berpindah-pindah. Itulah sebabnya diperlukan teori-teori secara empiris

tentang munculnya masyarakat feodal, yang dinamikanya ada di dalam birokrasi kerajaan.

Ada sebuah buku yang berjudul *social society*, karangan March Block Vol. I, Chaniago, The University of Chaniago Press, 1961. Buku tersebut aslinya dalam bahasa Perancis, kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris. Buku tersebut banyak membahas perkembangan masyarakat feodal di Eropa. Perkembangan feodal di Eropa sebagai masyarakat negara, berbeda dengan perkembangan masyarakat kerajaan di Asia. Mungkin March Block kekurangan informasi tentang feodalisme di Asia, sehingga pembahasannya tidak secara mendalam tentang feodalisme Asia. Ia hanya sekedar membandingkan lahirnya masyarakat feodal di Timur Tengah dan Eropa Barat, atau lahirnya feodalisme dalam masyarakat Islam dan Kristiani. Ia menggunakan pendekatan ikatan ketergantungan.

Dari pendekatan itulah Block menggunakan pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Ini berarti bahwa dalam masyarakat Islam dan Eropa Barat, ada kelompok sosial yang dikuasai. Di Eropa Barat kelompok yang dikuasai adalah rakyat yang dalam ikatan khusus adalah para petani. Sedangkan penguasa adalah tuan-tuan tanah. Di Inggris, tuan-tuan tanah ini biasa melakukan pertemuan-pertemuan, dan mengangkat tuan tanah senior yang kemudian menjadi raja. Proses itu berlangsung sejak masa sebelum masehi hingga lahirnya kerajaan-kerajaan di Inggris.

Di Afrika, berbeda halnya dengan di Inggris, masyarakat suku yang beraneka ragam, kemudian mengembangkan dirinya dengan suatu birokrasi dengan kriteria persamaan suku, adat-istiadat, yang akhirnya menjadi komunitas kerajaan kecil. Komunitas ini saling melakukan invasi, penyerangan, penguasaan, sehingga ada komunitas-komunitas yang dikuasai. Komunitas-komunitas yang dikuasai ini adalah raja-raja kecil yang oleh Block disebut *homage*, yaitu rasa hormat yang disertai dengan pemberian upeti kepada komunitas kerajaan.

Di Indonesia, pengertian masyarakat feodal agak lain dengan di Eropa. Jika mendasarkan pada sumber-sumber arkeologi, sangat jelas bahwa masyarakat kerajaan muncul begitu saja dari tingkat komunitas yang kecil dan dibimbing oleh seorang raja, dan kemudian berkembang secara invasi ke daerah-daerah dan para pegawainya digaji dengan tanah. Dalam perkembangannya yang terakhir dari masyarakat kerajaan di Jawa, pegawai kerajaan yang mendapat gaji itu menggunakan sistem *apanage*. Ada sebuah

buku yang merupakan hasil studi ilmiah berjudul *Vorstenlanden* karangan G.P. Rouffaer yang sangat khas membicarakan dan membahas struktur birokrasi kerajaan Jawa dengan sistem apanage. Makin tinggi jabatan seseorang dalam birokrasi tersebut, maka gaji yang berupa tanah akan semakin luas. Tanah ini dikerjakan oleh petani dengan sistem pengabdian sosial. Lihat D.H. Burger dalam buku *Sejarah Sosiologis Ekonomis Indonesia* terbitan tahun 1960.

Di Jawa, para raja untuk mengokohkan dirinya secara hukum dan secara religius, maka raja-raja itu banyak melakukan upacara-upacara keagamaan. Sistem upacara yang mereka jalankan adalah sistem kebudayaan Hindu dan Budha. Upacara itu tampaknya merupakan gejala umum di Asia Tenggara. Lihat G.Goedes dalam buku *Indianized States of Southeast Asia* terbitan tahun 1970. Upacara-upacara dikemas menurut aturan-aturan agama Hindu dan Budha sehingga raja sebagai penguasa dianggap bukan orang biasa oleh rakyat. Rakyat menganggap bahwa mereka adalah utusan para dewa, untuk memerintah di bumi, sehingga muncul konsep *dewa raja*. Ini berarti berbeda dengan di Eropa, dimana pemahaman agama-agama lebih bersifat birokratis (Kloss, 2021: 395-398). Pada abad pertengahan misalnya, pendeta nasrani lebih merupakan figur birokratis-politis, karena ia bersama-sama raja selalu membuat keputusan-keputusan politik, sehingga keputusan atau kekuatan gereja sangat disegani oleh rakyat. Gereja juga memiliki wilayah administrasi, penduduk, dan aspek sosial ekonomi yang lain. Bahkan gereja memiliki keputusan politik di samping birokrasi Baru pada abad ke-17 dimulai gerakan pemisahan antara birokrasi gereja dan birokrasi negara.

C. Patronase dan Paternalistik Masyarakat Kesukuan di Afrika

Paternalistik dan patronase masyarakat kesukuan di Afrika, memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Keterbelakangan masyarakat Afrika sebagai benua, berlangsung sampai akhir abad ke-19. Dalam konsepsi ini, orang Barat memberinya predikat sebagai *The Dark Continent*, suatu sebutan yang cukup menyakitkan bagi orang-orang Afrika. Mereka menyebut sebagai benua gelap karena Afrika secara keseluruhan baru mengenal tulisan pada akhir abad ke-19. Padahal jika mengkaji sejarah Afrika Utara, maka disitu terdapat Mesir yang pada abad 5000 tahun Sebelum Masehi sudah mengenal tulisan. Itu artinya ada suatu kekecualian bahwa Mesir sudah memasuki jaman sejarah sejak Sebelum Masehi. Bahkan pada jaman tersebut Mesir sudah dapat dikatakan sebagai *state*.

Ada sebuah buku yang berjudul *Inside Africa* karangan John Gunther tahun 1955 terbitan Hamiston Hamilton, London yang cukup menarik untuk dijadikan referensi. Dalam buku tersebut, penulis telah mengumpulkan data sejarah dan antropologi masyarakat Benua Afrika pada akhir tahun 1920-an hingga tahun 1930-an. Gunther telah menggunakan lebih dari 100 sampel yang terdiri atas wilayah dan kota yang dikunjunginya di benua tersebut. Menurut dia, keunikan Afrika bersumber dari keadaan sosiologis, historis, antropologis, dan geografisnya. Dari segi itu ternyata masyarakat-masyarakat Afrika pedalaman, tumbuh dan berkembang dari kelompok-kelompok kesukuan dan sub-kesukuan. Itulah sebabnya ketika terjadi kolonialisme Afrika seperti Perancis, Inggris, Belanda, Belgia mulai mengeksploitasi ekonomi Afrika, mereka kebanyakan sembari mengumpulkan informasi historis-antropologis masyarakat kesukuan tersebut. Dari kajian historis-antropologis itu, ditemukan unsur budaya dari masyarakat primitif hingga masyarakat modern. Dalam masyarakat Afrika, ternyata yang masih tetap kuat adalah unsur *patronase* dan *paternalistik*.

Afrika juga mempunyai keunikan dari sudut geografi, yang menempatkan Afrika sebagai benua sendiri di dunia. Keunikan itu adalah terbentuknya gurun pasir yang oleh para pakar Barat disebut ***Laut Patih***. Sedangkan di pedalaman Afrika, diwarnai dengan kekayaan flora dan fauna yang memberikan sumbangan besar terhadap kajian antropologi, sejarah, dan akhir-akhir ini kajian mengenai lingkungan hidup.

Kedua keunikan itulah yang membentuk masyarakat Afrika secara khusus, dan penting untuk dikaji secara ilmiah. Tentang pentingnya Afrika sebagai kajian ilmiah, ternyata berdasarkan pada jurnal-jurnal ilmiah yang terbit selama beberapa dekade, dan oleh karenanya kajian Afrika di mata sarjana Barat telah melahirkan *Africa Studies*. Jurnal ilmiah yang paling banyak adalah bidang antropologi tentang Afrika. Secara khusus ada universitas di Inggris, yang dinamakan “Universitas Bidang Ketimuran” yang mempelajari tentang Asia dan Afrika.

Munculnya kajian Afrika di universitas-universitas Eropa Barat dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi yaitu: pertama, didorong oleh kebijakan-kebijakan kolonial ketika Afrika menjadi tanah koloni Afrika Barat. Atas dasar ini, maka kajian Afrika telah dimulai sejak Afrika menjadi tanah koloni. Kedua, kajian Afrika didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa Barat sejak revolusi industri di Inggris, yang menempatkan bidang

ilmu dan teknologi prioritas utama untuk kemajuan industri. Setelah Perang Dunia II, kajian Afrika semakin berkembang pesat, terutama di kampus-kampus Eropa Barat. Perkembangan yang pesat ini karena dorongan perkembangan teori dan metodologi ilmu sosial yang menempatkan cara-cara kualitatif yang diagungkan tahun 1930-an. Dalam pada itu Amerika Serikat menjadi pelopor perkembangan secara kualitatif dalam ilmu sosial. Dilihat dari segi pembagian wilayah kajian, meskipun pembagian itu semu, tampaknya Perguruan Tinggi di Eropa Barat lebih memusatkan kajiannya pada wilayah-wilayah Afrika, sedangkan Amerika Serikat lebih memusatkan pada kajian Asia Tenggara, *Southeast Asian Programs*.

D. Patron-Client

Membahas *patron-client* berarti membahas dua bidang yaitu: (1) membahas teori Barat yang berhubungan dengan *patron-client*, (2) membahas pengalaman masyarakat dalam mengembangkan kebudayaannya, sehingga terbentuk struktur masyarakat. Dari segi teori-teori Barat, hubungan *patron-client*, berarti membahas teori-teori kepemimpinan R. Bendix dan Max Weber. Bendix adalah seorang pemikir Italia, yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat dunia selalu terdiri atas pemimpin dan orang yang dipimpin. Yang dipimpin adalah rakyat yang selalu didominasi oleh para kaum kolonial. Itulah sebabnya Bendix menyebut istilah *sub-ordinasi*, yaitu sebagai masyarakat yang dikuasai. Oleh karena itu menurut Bendix, pemimpin selalu mempunyai dua hal yaitu *power* dan *authority*. Dalam kajiannya, Bendix lebih banyak menjelaskan *power* dan *authority* masyarakat feodal di Eropa.

Kemudian Weber pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, juga menjelaskan hubungan *patron-client* melalui teorinya yaitu: (1) teori yang tradisional, (2) kharismatik, dan (3) rasional. Pada hubungan yang tradisional, seorang *patron* memperoleh kedudukannya melalui secara turun temurun. Kekuasaan yang diperoleh secara turun temurun ini dibahas oleh Bendix tetapi kurang membahas tentang *patron-client* pada kepemimpinan rasional. Ia sedikit menyinggung kharismatik seorang penguasa. Pada hubungan kharismatik, seorang *patron* mempunyai *client* yang banyak, diikuti oleh rakyat banyak karena kharismanya, misalnya tokoh-tokoh keagamaan, pendeta, pastor, dan kiai. Pembahasan Weber mengenai kharismatik ini merupakan pembahasan argumentatif-komparatif yaitu pengalaman masyarakat keagamaan di dunia.

Pada abad Tengah di Eropa Barat yang dimulai pada abad ke-13, hingga menjelang revolusi industri, ternyata para pendeta sangat mempunyai kewibawaan dalam agama, sosial, politik, ekonomi, sehingga membentuk nilai kharisma. Di Indonesia pada abad ke-19, kharisma tokoh-tokoh agama Islam yaitu para kiai menduduki kepemimpinan yang kharismatik. Ada dua hal yang mendorong yaitu: *pertama*, kiai-kiai mengembangkan pesantren-pesantren seperti tampak di Jawa sebagai akibat dari modernisasi Barat dan masuknya ekonomi uang. Maka cara melawannya adalah dengan mendirikan pesantren-pesanteren. Jika mempelajari sejarah pesantren atau tradisi pesantren, tampak bahwa seorang kiai mempunyai kharisma yang sangat dikagumi oleh para santri pondok serta alumninya. Itulah sebabnya para kiai mempunyai hubungan *patront-klient* yang kharismatik hingga saat ini telah banyak kajian studi tentang pesantren di Indonesia. Jika dipelajari hubungan kiai dengan para santrinya menunjukkan corak yang kharismatik. Ada teori yang menyatakan bahwa perkembangan Islam diikuti ajaran *sufisme* yaitu gerakan yang dipimpin oleh para sufi/kiai yang mempelajari *tasawuf*. Dalam konsep yang sufistik, ada hubungan *patront-client* yang kharismatik.

Kedua adalah kebijakan kolonial yang berupa pemberian tugas kepada aparat birokrasi kolonial untuk mengawasi kegiatan-kegiatan orang Islam, dan harus memberikan laporan, dan atas dasar itulah maka para kiai sangat dipatuhi oleh pengikutnya sebagai *patront*. Dalam konsep tradisi kiai sebagai *patront* mempunyai kewajiban: (1) membimbing para santri untuk dapat menjalankan syariat Islam secara baik; (2) melindungi para santri dari ancaman-ancaman baik yang bersifat fisik maupun non-fisik sehingga ajaran seorang kiai pada suatu pesantren sangat dipatuhi sebagai benteng untuk melawan segalanya. Di sini biasanya seorang kiai mengembangkan tarekat atau tasawuf dengan aliran masing-masing (Fionna, 2021: 82).

Pemimpin yang rasional menurut Weber, berdasarkan *patront-client* di mana ukurannya adalah prestasi, sehingga mengembangkan "*merit sistem*", yaitu sistem jabatan berdasarkan keahlian, sehingga lebih mengembangkan rasio atau nalar. Kebudayaan Barat sejak abad ke-16 mulai dengan "*merit sistem*" terutama di Inggris meskipun di Inggris pada abad ke-15, feodalisme masih kuat. Setelah revolusi industri abad ke-18, sistem keahlian berkembang pesat, sehingga dunia perdagangan, birokrasi, ekonomi, politik, industri berkembang pesat karena dorongan *merit sistem* (keahlian atau prestasi).

Kebudayaan Islam di Indonesia yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-17 ketika ada potensi ekonomi yang luar biasa di bidang perdagangan, ternyata hubungan *patront-client* mulai berubah ke arah yang egalitarian yang kemudian disebut demokrasi, menurut konsep masyarakat modern. Abad ke-17 adalah abad Islam dalam sejarah Indonesia, karena potensi ekonomi perdagangannya. Hubungan *patront-client*, dalam hal ini dapat diambil contoh kerajaan Aceh. Di Aceh, kerajaan Aceh mempunyai dua kitab undang-undang yaitu *Tajusalatin* dan *Bustanu Salatin*. Dua buku ini merupakan dua sumber untuk menatur masyarakat Islam Aceh dalam hal hubungan antara raja dengan rakyat (*patront-client*). Ada perbedaan raja sebagai *patront* antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu. Dalam kebudayaan Islam *patront* adalah: (1) raja dalam konsep Islam dianggap sebagai orang biasa yang mempunyai kelebihan; (2) dalam kebudayaan Islam, *patront* atau raja, sultan, harus mampu mengemban keadilan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, menurut adat Aceh, seperti yang terungkap dalam dua kitab tersebut, raja dituntut oleh *client*-nya: (a) bertindak adil pada orang yang mencuri, memberikan hukuman berat pada orang yang mencuri; (b) raja harus menghidupkan yang mati, dan mematikan yang hidup. Artinya yang salah harus dihukum dan yang benar harus dibebaskan; (c) raja-raja Islam Aceh, dituntut oleh *client* untuk memberikan sebagian hartanya pada rakyat (Kadi, 2021: 311).

Sedangkan dalam kebudayaan Hindu, *patront* dituntut bahwa: (a) raja sebagai *patront* dianggap sebagai orang yang luar biasa, karena ia mengandung unsur *magis* dan *sakral*. Dunia giri raja sebagai *patront*, digambarkan sebagai mikrokosmos, di mana *client*/rakyat beranggapan dan percaya bahwa hubungan *mikrokosmos*/alam raya harus serasi dan seimbang. Jika terganggu akan menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Untuk itu *patront* harus disakralkan dengan berbagai upacara dan ritual. (b) pada masa kejayaan Majapahit, kepala perang daerah, pada waktu upacara bulan purnama setahun sekali harus menghadap raja bersama upetinya berupa emas dan hasil bumi. Karena raja dianggap sebagai sakral, maka mekanisme ini tidak mengalami kesulitan.

E. Tumbuhnya Nasionalisme dan Negara Bangsa

Selain sebagai makhluk Tuhan dan makhluk individu, manusia juga memiliki kodrati sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sejak dahulu

manusia selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti: mencari makan, menghadapi masalah, mengatasi gangguan dan ancaman, serta melanjutkan keturunan (Suhady, 2001: 3). Semula kelompok manusia itu hidup berpindah-pindah tempat, kemudian karena perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu misalnya untuk beternak dan bercocok tanam.

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya pada tempat tinggal tertentu yang dianggap baik sebagai sumber penghidupan bagi kelompoknya, diperlukan seorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Dalam pada itu, pemimpin kelompok diberi kekuasaan dan kewenangan tertentu dan anggota kelompok diwajibkan untuk menaati peraturan atau perintah dari pemimpinnya. Dengan demikian, maka timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan “pemerintahan yang sangat sederhana” (Kansil: 1978). Setiap anggota kelompok itu dengan sadar mengetahui atau mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemimpin mereka. Tata dan peraturan hidup tertentu itu mula-mula tidak tertulis yang batasan-batasannya tidak jelas dan merupakan adat kebiasaan saja. Namun demikian, lambat laun peraturan itu mereka tuliskan dan menjadi peraturan-peraturan tertulis yang dilaksanakan dan ditaati.

Berkaitan dengan bertambah luasnya kepentingan sekelompok-sekelompok itu dan untuk mengatasi segala kesulitan yang timbul baik internal maupun eksternal, maka dianggap perlu dibentuk suatu organisasi yang lebih teratur dan memiliki legitimasi kekuasaan yang memadai. Organisasi itu sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan secara tertib. Organisasi yang memiliki legitimasi kekuasaan itulah yang kemudian dinamakan *Negara*.

Secara etimologis, konsep “negara” muncul dari terjemahan bahasa asing *Staat* (Jerman dan Belanda) dan *State* (bahasa Inggris). Dua konsep itu, baik *Staat* maupun *State* berakar dari bahasa Latin, yaitu *statum* atau *status*, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata *status* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap.

Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh J.H.H. Logemaan dalam buku *Over De Theorie Van Een Stelling Staadrecht*, yakni bahwa

keberadaan negara bertujuan untuk menyelenggarakan dan mengatur masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Definisi itu menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan (Budiyanto, 1997). Terminologi seperti itu kemudian diikuti oleh Harold J. Laski, Max Weber, dan Leon Duguit.

Dalam konsepsi itu, Kansil (1978) menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari pada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian luas, negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Dalam konsep negara sebagai organisasi kekuasaan, di dalam negara terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia atau rakyat agar berdaulat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara. Untuk dapat mengatur rakyatnya, maka negara diberi kekuasaan (*authority*) yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, di sisi lain negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi maupun oleh negara itu sendiri.

Ketika di dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal satu pengertian tentang negara, maka tidak demikian halnya dalam sejarah bernegara di Eropa. Analisis ini diperlukan agar kita tidak tergelincir ke pengertian negara yang tidak sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia. Semenjak bangsa-bangsa di Eropa sudah menetap dan tidak mengembara (*nomaden*) lagi, maka bernegara pada umumnya diartikan memiliki atau menguasai sebidang tanah atau wilayah tertentu (Padmo Wahyono, 1992: 92). Dengan lain kata, penguasaan atas tanah yang menumbuhkan kewenangan kenegaraan (*teori patrimonial*) di mana struktur sosial yang di hasilkan disebut *feodalisme* atau *landlordisme*. Negara dalam keadaan demikian disebut sebagai tanah (*land*) dan hal ini nampak pada sebutan *England*, *Holland*, dan lain sebagainya.

Definisi tersebut kemudian berkembang, yaitu bahwa tanah tersebut mendatangkan kemakmuran atau kekayaan (*reichrijckdom*), di mana negara kemudian diartikan sebagai *rijck* (Belanda) atau *reich* (Jerman) yang artinya kekayaan kelompok manusia (dinasti) misalnya *frankrijck*, *Oostenrijck* dan sebagainya. Kondisi pra-liberal ini berakhir dengan tumbuhnya teori liberalisme yang dipelopori oleh John Locke, Thomas Hobbes dan Jean Jaque Rousseau. Dalam konsepsi itu, negara tidak lagi diartikan sebagai tanah maupun kekayaan (*land atau reich*) melainkan sebagai suatu status hukum (*state-staat*), suatu masyarakat hukum (*legal society*) sebagai hasil dari suatu perjanjian bermasyarakat (*social contract*). Jadi negara merupakan hasil perjanjian bermasyarakat (*ver trag-ver drag*) dari pada individu-individu yang bebas, sehingga hak-hak orang seorang (hak asasi) adalah lebih tinggi kedudukannya ketimbang negara yang merupakan hasil bentukan individu-individu bebas tersebut.

Cara pandang individualistik ini sebagaimana dijelaskan oleh Soepomo di dalam rapat BPUPKI, tidak kita pilih atau kita ikuti, sekalipun di dalam lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia masih di “indoktrinasikan”. Fahaman individualistik ini mendapat pertentangan dalam sejarah kenegaraan di Eropa dari kelompok sosialis-komunis yang dipelopori oleh Marx, Engels, Lenin yang beranggapan berdasarkan teori kelas bahwa negara adalah alat dari mereka yang ekonominya kuat untuk menindas yang lemah. Cara pandang seperti itu juga bukan cara pandang bangsa Indonesia tentang negara (Ruhlessin dan Parihala, 2021: 7).

Selain kedua cara pandang tersebut, Soepomo menguraikan adanya cara pandang yang ketiga yang dikenal sebagai cara pandang integralistik, yang melihat negara sebagai suatu kesatuan organis, seperti yang dikemukakan oleh Hegel, Adam Muller, dan Spinoza. Fahaman integralistik ini berbeda dengan cara pandang individualistik dari Rousseau dan kolektivisme Rusia. Dalam pada itu, Hatta menentang fahaman integralistik Jerman ini, karena dianggap dapat menumbuhkan negara kekuasaan, sekalipun ada kemiripan dengan cara pandang Indonesia tentang satunya makro dan mikrokosmos. Hatta mengusulkan dilengkapinya cara pandang integralistik tersebut dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dengan diterimanya usul Muhammad Hatta, maka terbentuklah integralistik Indonesia yang berbeda dengan cara pandang integralistik Jerman (Padmo Wahyono, 1992: 94). Dapat diidentifikasi bahwa di dalam individualisme Rousseau,

individu lebih diutamakan ketimbang masyarakat. Sedangkan di dalam integralistik Jerman, masyarakat lebih diutamakan ketimbang individu, dan di dalam integralistik Indonesia, kemakmuran masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.

Oleh karena itu cara pandang Indonesia, tidak sekedar melihat negara secara organis, melainkan sebagaimana disepakati yang kemudian dirumuskan dalam alinea ketiga UUD 1945, yaitu bahwa negara adalah suatu keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia yang atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Dengan demikian sekalipun semenjak Rousseau, analisa bernegara berkisar pada masalah hukum, yaitu pembentukan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun analisa tersebut di Indonesia harus tetap didasarkan pada cara pandang integralistik.

E. Terjadinya Negara Nasional, Tujuan dan Fungsi

1. Terjadinya Negara

Suatu negara tidak serta-merta begitu saja muncul, tetapi ada latarbelakang pendorongnya. Terdapat beberapa teori tentang terjadinya suatu negara, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teori Kenyataan

Dalam teori ini, terjadinya suatu negara adalah suatu kenyataan. Ketika unsur-unsur negara (pemerintahan yang berdaulat, bangsa dan wilayah) ada, maka pada saat itu juga suatu negara sudah menjadi kenyataan.

2. Teori Ketuhanan

Terjadinya suatu negara adalah kehendak Tuhan. Menurut teori ini segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak menghendaknya. Kalimat-kalimat seperti “Atas Berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa”...” *by the grace of God...*” menunjuk ke arah teori ini.

3. Teori Perjanjian

Berdasarkan teori ini, terjadinya negara dikarenakan oleh adanya perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diselenggarakan agar kepentingan bersama terpelihara dan terjamin, agar orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain (*homo homini lupus*, menurut Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat (*social contract* menurut

ajaran Rousseau). Dapat pula terjadi suatu perjanjian antara daerah jajahan, misalnya kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.

4. Teori Penaklukan

Berdasarkan teori ini, terjadinya negara disebabkan oleh sekelompok manusia menaklukan daerah kelomok lain. Agar daerah itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara. Selain itu terjadinya negara dapat pula disebabkan oleh adanya:

- a. Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajah, seperti: Amerika Serikat terhadap Inggris pada tahun 1776–1783.
- b. Peleburan (*fusi*) antara beberapa negara menjadi satu negara baru, misalnya: Jerman bersatu pada tahun 1871.
- c. Suatu daerah yang belum ada rakyatnya atau pemerintahannya diduduki/dikuasai oleh bangsa/negara lain.
- d. Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara baru (misalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945).

Secara teoritis, suatu negara dianggap ada apabila telah dipenuhi ketiga unsur negara yaitu: pemerintahan yang berdaulat, bangsa, dan wilayah. Konsepsi seperti ini mempengaruhi pula perdebatan di dalam PPKI, baik di dalam membahas wilayah negara maupun di dalam merumuskan Pembukaan yang sebenarnya direncanakan sebagai naskah Proklamasi. Suatu kenyataan pula bahwa tidak satupun warga negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa terjadinya NKRI adalah pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945, sekalipun ada pihak-pihak (terutama luar negeri) yang beranggapan berbeda dengan dalih teori yang universal. Oleh karena itu sekalipun pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum dasarnya pun belum disahkan, tetapi bangsa Indonesia beranggapan bahwa NKRI sudah ada semenjak di Proklamasikan. Bahkan apabila kita kaji rumusan pada alinea ke dua Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Adapun rincian tersebut adalah: (1) perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia; (2) proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan, dan (3) keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam menterjemahkan perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya NKRI sangat terperinci.

Hal ini dapat kita amati tentang unsur terjadinya NKRI adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya negara merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi, melainkan bahwa perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khususnya dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
- b. Setelah Proklamasi barulah “mengantarkan bangsa Indonesia” ke depan pintu gerbang kemerdekaan, jadi tidak berarti bahwa dengan proklamasi telah selesai kita bernegara
- c. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekedar adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
- d. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, dan bukan sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan yang ekonomi lemah untuk menentang yang ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.
- e. Unsur religiusitas dalam terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Unsur terakhir inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam pembukaan bahwa: Indonesia bernegara mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang di dasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

2. Tujuan dan Fungsi Negara

Dalam sistem feodal, tujuan negara adalah penguasaan atas tanah. Oleh karena itu, pemupukan kekayaan oleh penguasa menjadi tujuan utama dan kekayaan yang melimpah pada penguasa (negara) akan “tertumpah” pada rakyatnya. Rakyat cukup menyerahkan diri pada penguasa apabila ingin makmur. Itulah tujuan bernegara yang feodalistik atau yang sering kali terjelma pula dalam sistem perekonomian “merkantilistik” bahkan etatisme. Secara kiasan sering diungkapkan bahwa rakyat harus menunggu “membesarnya kue” yang akan dibagi.

Cara pandang demokrasi modern semenjak Rousseau maka tujuan bernegara adalah persamaan dan kebebasan (*man are born free and equal*).

Gagasan ini bahkan menjadi mitos di Eropa dengan nuansa penekanan yang berbeda-beda. Misalnya di Eropa Barat orang mengutamakan kebebasannya sedangkan persamaannya cukup dalam hukum, sedangkan di Eropa Timur (menurut Eropa Barat) yang diutamakan persamaan materinya, sedangkan kebebasannya dinomorduakan. Mitos persamaan dan kebebasan ini kemudian dituangkan ke dalam konsep negara hukum yang demokratis dengan pelbagai variasinya, sehingga oleh Carl Schmitt disimpulkan bahwa *Ide al Begriff derverfassung* atau pengertian ideal di dalam konstitusi adalah *Demokratischen Rechtsstaat*. Mitos ini pernah diterapkan pula di dalam konstitusi RIS dan UUD S 1950 dengan rumusan negara hukum yang demokratis. Di negara-negara Anglo Saxon kita kenal konsep *Rule of Law and not of men*, sedangkan negara-negara Eropa Timur cenderung pada konsep *Socialist Legality*.

Kemudian bagaimana tujuan bernegara Indonesia. Sesungguhnya merupakan konsep yang lebih tua dari pada negara hukum (*modern*) ialah bahwa konsep negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau *res publica*. Ini dibakukan dalam konsep negara Republik, sehingga asumsinya setiap negara yang berbentuk Republik, adalah untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan dinasti (*monarchie*) atau untuk kepentingan golongan (*aristokrasi*).

Konsep kepentingan umum menurut bangsa Indonesia secara ketatanegaraan, sering kali diungkapkan sebagai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dirumuskan unsur-unsur masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila tersebut secara dinamis dan tidak terminal utopistis. Unsur-unsur tersebut adalah: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Dengan demikian konsepsi masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah secara ketatanegaraan tidak lain yakni terselenggaranya keempat unsur tersebut secara dinamis berkesinambungan.

Operasionalisasinya pencapaian tujuan bernegara menurut penjelasan UUD 1945, maka pertama di-"ciptakan" pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan ini ke dalam pasal-pasal sebagai instruksi bagi penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Penjabaran ini lebih lanjut ialah ke dalam undang-undang,

demikianlah sistem undang-undang dasar kita. Penciptaan ke dalam pasal-pasal adalah dalam bentuk ke dalam tatanan-tatanan kehidupan yang dijabarkan nilai-nilai dasarnya.

Sedangkan mengenai fungsi negara, mengisyaratkan bahwa setiap negara menyelenggarakan fungsinya sebagai negara. Adapun fungsi negara adalah sebagai berikut: (1) melaksanakan penertiban dan keamanan negara, dimana untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa maka negara harus berperan melaksanakan penertiban; (2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (3) pertahanan; dan (4) menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan peradilan. Menurut Mac Iver, fungsi negara dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: (1) ketertiban, (2) perlindungan, dan (3) pemeliharaan dan perkembangan.

F. Bentuk dan Unsur Negara

1. Bentuk Negara

Bentuk negara adalah penjelmaan dari pada organisasi negara secara nyata di masyarakat. Ia mencerminkan suatu pola tertentu atau dengan orientasi sistemik, merupakan suatu sistem berorganisasi atau puncaknya manusia dalam kehidupan berkelompok. Berdasarkan teori-teori modern, bentuk negara yang terpenting adalah Negara Kesatuan (*Unitarisme*) dan Negara Serikat (*Federasi*). Di lihat dari segi ini maka bentuk organisasi negara bukan lagi masalah republik atau monarki, aristokrasi, melainkan *negara kesatuan* dan *negara serikat*.

1. *Negara Kesatuan* adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana diseluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah dalam wilayah negara. Dalam negara kesatuan pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan sistem *sentralisasi* dan *desentralisasi*. Pertama, *sistem sentralisasi* adalah segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kedua, *sistem desentralisasi* di mana kepada daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (*otonomi daerah*) yang dinamakan *daerah otonom*. Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai sifat-sifat seperti: (1) kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat; (2) negara

hanya mempunyai satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu Dewan Perwakilan Rakyat; (3) hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

2. *Negara Sereikat (Federasi)* adalah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dan negara serikat itu. Negara-negara bagian itu semula merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dengan negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu dan kemudian menjadi negara bagian, melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (*limitatif*), dan hanya kekuasaan yang disebutkan itulah yang diserahkan kepada negara serikat (*delegated powers*). Kekuasaan asli ada pada negara bagian, dan negara itu berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan dari negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara serikat ialah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos dan telekomunikasi.

2. Unsur Negara

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa suatu negara itu harus memenuhi syarat-syarat : (1) rakyat yang bersatu, (2) daerah atau wilayah, (3) pemerintah yang berdaulat, dan mendapat pengakuan dari negara lain (Budiyanto, 1997). *Konvensi Montevideo* pada tahun 1933 menyebutkan unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat, wilayah yang tetap, dan pemerintah yang mampu mengadakan hubungan internasional. Dari pendapat tersebut, unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsur *konstitutif* karena keberadaannya mutlak harus ada. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat formalitas, karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional. Kansil (1978) menyatakan bahwa pada umumnya negara itu harus memenuhi unsur-unsur atau syarat: (a) harus ada wilayahnya; (b) harus ada rakyatnya; (c) harus ada pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan rakyatnya, dan (d) harus ada tujuannya.

BAB VII

TUMBUHNYA NASIONALISME MODERN

A. Kajian Nasionalisme

Membahas sejarah nasionalisme baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Sedangkan wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik. Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya, sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep sejarah tata negara. Oleh karena itu dalam pembahasannya, sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan suatu terminologi yang lebih multidimensional dalam pendekatannya.

Pertama sejarah politik. Dari segi ehistomologis sejak Thucydides menulis Perang Peloponesianya sebagai sejarah politik, tradisi sejarah sangat didominasi oleh sejarah politik. Lebih-lebih dalam abad ke-19 sebagai abad nasionalisme dan formasi negara nasional di Eropa Barat, sejarah politik-lah yang sangat menonjol. Dalam konsep itu, sejarah diplomasi dan perang sangat menonjol di suatu pihak, dan di lain pihak peranan para raja, panglima perang, dan negarawan memegang peranan sentral. Fenomena ini masih kuat pengaruhnya sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa jalannya sejarah ditentukan oleh kejadian politik, diplomasi, perang, dan aktivitas militer. Di samping itu ada pula teori orang besar, yang mengatakan bahwa orang besarlah yang menentukan jalannya sejarah. Fenomena ini terbukti dari banyaknya karya biografi tokoh-tokoh sampai pada Perang Dunia II. Perkembangan itu sejajar dengan berkembangnya sejarah nasional yang pada masa tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang pesat.

Mempelajari sejarah politik, tidak dapat dilepaskan dari sejarah sosial. Tulisan dengan dimensi itu dapat dilihat pada tulisan Akira Nagazumi,

"*Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*" dalam edisi bahasa Indonesia. Demikian pula sebaliknya, sejarah sosial tidak dapat dilepaskan dengan sejarah politik. Lihat tulisan Sartono Kartodirdjo, 1966, *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Kemudian apakah yang dibahas oleh sejarah politik. Secara konvensional, sejarah politik membahas sejarah perang, sejarah parlementer, sejarah kerajaan; dan sejarah modern dalam arti teori dan metodologisnya sejarah politik membahas tema-tema yang luas misalnya biografi politik, partai politik, birokrasi, struktur politik suatu masyarakat atau negara, pemberontakan, hubungan sivil-militer dan lain sebagainya. Sejarah modern tersebut lebih bersifat tematis sehingga temanya sangat luas. Di Indonesia ada dua contoh tentang biografi politik yang dikemas menjadi sejarah politik misalnya tulisan L.D.Legge dan Dahm yang sama-sama menulis *Tentang Soekarno*. Oleh karena itu, membicarakan biografi politik sebagai tema mikro, dapat dimasukkan sebagai bagian dari sejarah tata negara.

Kedua sosiologi politik, yang merupakan interdisiplin sosiologi yang pernah dikembangkan secara metodologis oleh Max Weber abad ke-19. Sosiologi politik dapat membicarakan tipe kepemimpinan yang menurut teori Weber ada tiga yaitu: (1) otoritas tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun temurun; (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya. Di negara-negara berkembang, tipe kepemimpinan rasional dan kharismatik sering digabungkan menjadi satu. Contohnya sebagai refleksi, dalam diskusi mengenai korupsi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Nasional tahun 2000 antara lain dibahas mengenai "*Merit Sistem*", yang artinya bahwa kedudukan atau jabatan harus didasarkan pada prestasi, sehingga praktik KKN tidak terjadi. Ini berarti bahwa *Merit Sistem* didasarkan pada tipe kepemimpinan rasional. Di samping itu sosiologi politik, selain membahas tipe kepemimpinan baik formal maupun in formal, juga membahas struktur politik, partai politik, partisipasi politik, hubungan sivil-militer, tokoh politik, dan peranan serta fungsi kelembagaan politik.

Adapun perbedaan antara pemimpin formal dan informal adalah pada otoritas yang dimilikinya. Pemimpin tipe formal memperoleh kekuasaan dari jabatan atau pemimpin formal, sedangkan tipe informal adalah pemimpin informal, dan pada dia ada kekuasaan karismatis. Dalam konteks Indonesia, tipe formal pada umumnya juga memiliki otoritas tradisional, ialah golongan

aristokrasi yang masih mempunyai hak mewariskan jabatan, terutama yang memangku jabatan pamong praja. Pada umumnya pelbagai tipe kepemimpinan menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasi nilai yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula reaksinya terhadap inovasi, yaitu penolakan, adaptasi, dan asimilasi. Konflik politik dapat dikembalikan kepada faktor sosiokultural dengan kepentingan ideologi atau nilai tertentu.

Dalam konsepsi ini, ahli ilmu sosiologi politik telah mengambil sistem kategorisasi jenis sistem politiknya sekaligus merupakan studi perbandingan. Analisis strukturalnya membahas status dan peranan perbagai elite, hubungan dan perbandingan kekuasaan antara mereka, kesemuanya dalam kerangka hirarkis suatu sistem feodal. Struktur kekuasaan sangat menentukan struktur sosial dengan kedudukan birokrasi yang sangat sentral fungsinya. Dalam hubungan ini sangatlah relevan menelaah kehidupan sosial antara golongan sosial, terutama dalam konteks kepentingan, status sosial, ideologi, serta sistem nilai-nilainya. Tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa tindakan dan interaksi politik tidak dapat berjalan di luar kerangka kebudayaan politik (*political culture*). Di sini tindakan, kelakuan, serta sikap perlu dilembagakan.

Suatu determinisme sosial sudah barang tentu berpendapat bahwa seluruh peranan seorang tokoh ditentukan oleh struktur masyarakat, atau paling tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas itu, khususnya berkaitan dengan pandangan dunia. Sebaliknya, perlu diakui bahwa tokoh sejarah acapkali lebih jauh memandang ke depan atau berperan sebagai perintis atau protagonis. Protagonisme atau inovasi sering menuntut perubahan evolusioner sehingga pelaksanaannya menuntut kepribadian atau kepemimpinan yang kuat. Tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa tokoh menjadi orang marginal dan pencipta sub-kultur, akhirnya dapat menciptakan kultur dominan dalam kajian sosiologi politik.

Ketiga antropologi politik. Pada awalnya, antropologi politik membicarakan perkembangan masyarakat kesukuan, hal ini karena antropologi lebih menekankan pada sistem kekerabatan. Kemudian antropologi politik berkembang pengkajiannya pada simbol-simbol politik, satrategi politik, hubungan kebudayaan politik, serta adat-istiadat setempat dalam hubungannya dengan politik. Antropologi politik, sangat erat hubungannya dengan antropologi sosial. Sebagai permisalan, kolusi dan korupsi yang terjadi dalam pemerintah politik, akan lebih tajam pembahasannya jika dikaji dengan

antropologi politik. Hal ini karena menyangkut masalah kebudayaan politik dalam hubungannya dengan korupsi.

Untuk membahas kerajaan tradisional, sebagai contoh lain, tepatlah kiranya analisis antropologi politik dipakai untuk mengupas sistem politiknya, yang mencakup otoritas kharismatis atau tradisional, patrimonialisme, feodalisme, birokrasi tradisional, dan lain sebagainya. Banyak antropolog semacam itu misalnya Cunningham, Schorl, dan Schulte-Nordholt. Pada hakikatnya yang mereka hasilkan lebih merupakan sejarah struktural dengan pendekatan sinkronis. Maka dari itu, tepatlah kiranya apabila sejarawan menggarap tema yang sama secara diakronis, meskipun tanpa mengabaikan pendekatan strukturalnya.

Keempat ilmu politik. Dalam studi ilmu politik, bidang ketatanegaraan konsentrasinya hanya negara-negara modern, yaitu negara-negara yang muncul menjelang Perang Dunia I terutama kerajaan-kerajaan yang mulai meninggalkan tradisi monarkhi, dan pembahasannya diteruskan pada negara-negara setelah Perang Dunia II. Dalam hubungan ini, skenario politik baik di tingkat makro maupun mikro, dapat digambarkan secara rinci berdasarkan analisis ilmu sosial sedemikian rupa, sehingga dapat diekstrapolasikan, antara lain, (1) gejala atau pola umum perjuangan politik, (2) kecenderungan dalam proses politik yang menunjukkan keteraturan (*regularities*). Kedua gejala ini akan menambah makna kejadian-kejadian serta memberi kemungkinan untuk membuat suatu perbandingan serta generalisasi.

Dimensi sosial dari proses politik mencakup status dan peranan elite politik: bangsawan, aristokrasi, birokrat, kaum intelegensia, elite religius, meritokrasi, teknokrasi, elite desa, dan lain sebagainya. Otoritas yang mereka miliki antara lain otoritas karismatis, termasuk pula yang sudah mengalami rutinisasi, otoritas tradisional, otoritas legal dan rasional. Bagaimana interaksi dalam proses perjuangan kekuasaan, terutama dalam periode transisi (abad ke-19 dan ke-20) sewaktu orientasi nilai-nilai bergeser sebagai dampak proses penetrasi pengaruh Barat dan modernisasi. Posisi sosial kultural elite masing-masing menimbulkan konflik, yang menimbulkan fenomena yang bernuansa dari proses sosial dan politik yang selalu berkesinambungan. Lebih jauh hal ini akan di bahas pada bab-bab berikutnya dari kajian sejarah tata negara ini.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kajian ilmu politik, berarti memasuki wilayah kekuasaan. Karena dalam hal ini, ilmu politik berarti ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan baik

dalam konsep yang bersahaja maupun modern, dan bagaimana cara-cara untuk mempertahankannya. Konsep ini tampak sederhana, tetapi setelah memasuki wilayah kajiannya, maka akan ditemukan fenomena-fenomena yang sangat kompleks, yang mewarnai kajian ilmu politik, dan memperkaya kajian sejarah ketatanegaraan yang akan dibahas dalam buku ini.

B. Pembentukan Kesadaran Sejarah

Apabila suatu kepribadian turut membentuk identitas seorang individu atau suatu komunitas, kiranya tidak sulit dipahami bahwa kepribadian berakar pada sejarah pertumbuhannya. Di sini, kesadaran sejarah amat esensial bagi pembentukan kepribadian. Analog dengan sosiogenesis individu, kepribadian bangsa juga secara inheren memuat kesadaran sejarah itu. Implikasi hal tersebut di atas bagi *national building* ialah tak lain bahwa sejarah dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan kesadaran sejarah. Dalam rangka *nation building* pembentukan solidaritas, inspirasi dan aspirasi mengambil peranan yang penting, di satu pihak untuk *system-maintenance* negara nasion, dan dipihak lain memperkuat orientasi atau tujuan negara tersebut. Tanpa kesadaran sejarah, kedua fungsi tersebut sulit kiranya untuk dipacu, dengan perkataan lain semangat nasionalisme tidak dapat ditumbuhkan tanpa kesadaran sejarah (Kartodirdjo, 1993: 53).

Apabila sudah disadari hubungan erat antara sejarah dengan pendidikan, memang belum ada jaminan bahwa makna dasar dari sejarah telah bias diwujudkan untuk menunjang proses pendidikan itu. Masih diperlukan proses aktualisasi nilai-nilai sejarah dalam kehidupan yang nyata. Dengan kata lain, sejarah tidak akan berfungsi bagi proses pendidikan yang menjurus ke arah pertumbuhan dan pengembangan karakter bangsa apabila nilai-nilai sejarah tersebut belum terwujud dalam pola-pola perilaku yang nyata.

Untuk sampai pada taraf wujud perilaku ini, perlu ditumbuhkan kesadaran sejarah sebagaimana dijelaskan oleh Soedjatmoko (1984: 67), bahwa:

“...Suatu orientasi intelektual, suatu sikap jiwa yang perlu memahami secara tepat faham kepribadian nasional. Kesadaran sejarah ini menuntun manusia pada pengertian mengenal diri sendiri sebagai bangsa, kepada *self understanding of nation*, kepada sangkan paran suatu bangsa, kepada persoalan *what we are, what we are what we are...*”

Dengan demikian, kesadaran sejarah tidak lain daripada kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakikat sejarah bagi masa kini dan bagi masa yang akan datang, menyadari dasar pokok bagi berfungsinya makna sejarah dalam proses pendidikan.

Untuk mengembangkan manusia seperti itu, dengan sendirinya diperlukan motivasi yang kuat sebagai factor penggerak dari dalam diri manusia sendiri. Ini tidak lain daripada nilai-nilai, yang kalau dihubungkan dengan sejarah, merupakan nilai-nilai masa lampau yang telah teruji oleh jaman. Di sinilah bertemu antara pendidikan dan sejarah. Sejarah dalam salah satu fungsi utamanya adalah mengabdikan pengalaman-pengalaman masyarakat di waktu yang lampau, yang sewaktu-waktu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat itu dalam memecahkan problema-problema yang dihadapinya. Melalui sejarahlah nilai-nilai masa lampau dapat dipetik dan digunakan untuk menghadapi masa kini. Oleh karena itu, tanpa sejarah orang tidak akan mampu membangun ide-ide tentang konsekuensi dari apa yang dia lakukan dalam realitas kehidupannya pada masa kini dan masa yang akan datang, dalam sebuah *kesadaran historis*. Dalam kaitan ini, Collingwood (1973: 10) sejarawan Inggris menyatakan sebagai berikut: mengenal diri sendiri itu berarti mengenal apa yang dapat seseorang lakukan, dan karena tidak seorang pun mengetahui apa yang bisa dia lakukan sampai dia mencobanya, maka satu-satunya kunci untuk mengetahui apa yang dia bisa perbuat seseorang adalah apa yang telah diperbuat. Dengan demikian, nilai dari sejarah adalah bahwa sejarah telah mengjarkan tentang apa yang telah manusia kerjakan, dan selanjutnya apa sebenarnya manusia itu.

Menurut Suyatno Kartodirdjo (1989:1-7), kesadaran sejarah pada manusia sangat penting artinya bagi pembinaan budaya bangsa. Kesadaran sejarah dalam konteks ini bukan hanya sekedar memperluas pengetahuan, melainkan harus diarahkan pula kepada kesadaran penghayatan nilai-nilai budaya yang relevan dengan usaha pengembangan kebudayaan itu sendiri. Kesadaran sejarah dalam konteks pembinaan budaya bangsa dalam pembangkitan kesadaran bahwa bangsa itu merupakan suatu kesatuan sosial yang terwujud melalui suatu proses sejarah, yang akhirnya mempersatukan sejumlah nasion kecil dalam suatu nasion besar yaitu bangsa. Dengan demikian indikator-indikator kesadaran sejarah tersebut dapat dirumuskan mencakup: menghayati makna dan hakikat sejarah bagi masa kini dan masa yang akan

datang; mengenal diri sendiri dan bangsanya; membudayakan sejarah bagi pembinaan budaya bangsa; dan menjaga peninggalan sejarah bangsa.

C. Substansi Nasionalisme

Dalam pembelajaran sejarah, nasionalisme merupakan tujuan pembelajaran yang sangat penting dalam rangka membangun karakter bangsa. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, mata pelajaran sejarah telah diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian integral dari mata pelajaran IPS, sedangkan pada tingkat pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Mata pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi sejarah mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik; memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan; menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa; sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; dan berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Nasionalisme dalam dimensi historisitas dan normativitas, merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling kurang dalam dasawarsa seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini. Tanpa ideologi nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya Perang Dingin dan semakin merebaknya konsepsi dan arus globalisme (*internasionalisme*) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat, tidak dengan serta-merta membawa keruntuhan bagi nasionalisme. Sebaliknya, medan-medan ekspresi konsepsi nasionalisme menjadi semakin intensif dalam berbagai interaksi dan komunikasi sosial, politik, kultur, dan bahkan ekonomi internasional, baik di

kalangan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis, maupun di kalangan negara Dunia Ketiga, seperti India, China, Malaysia, dan Indonesia. Nasionalisme tetap menjadi payung social-kultur negara-negara manapun untuk mengukuhkan integritasnya.

Sebagai suatu faham kebangsaan, nasionalisme merupakan “ruh” social-kultur untuk membentuk dan memperkokoh identitas nasional sebagai jati diri bangsa yang telah memiliki martabat kemerdekaan. Meskipun telah sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen, maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif.

Nasionalisme sebagai gejala historis memiliki peranan *urgent* pada abad XX dalam proses *nation formation* negara-negara nasional modern di Asia dan Afrika. Ideologi kolektif nasionalisme tersebut memiliki fungsi teleologis serta memberi orientasi bagi suatu masyarakat sehingga terbentuk solidaritas yang menjadi landasan bagi proses pengintegrasian sebagai nasion atau komunitas politik. Sebagai ideologi kebangsaan, nasionalisme terbentuk *counter-ideology* terhadap kolonialisme dan imperialisme yang sanggup menawarkan realitas tandingan serta menyajikan orientasi tujuan bagi gerakan politik yang berjuang untuk mewujudkan realitas substantive tersebut. Dalam konsepsi ini, pengalaman kolektif yang serba destruktif masa penjajahan menawarkan fungsi sejati nasionalisme sebagai penyatu solidaritas baru, yang jauh melampaui fungsi ikatan primordialnya. Nasionalisme adalah tawaran, sekaligus harapan bagi bangsa yang menghendaki kokohnya bangunan integrasi dan kedaulatan di atas fondasi moral humanistik.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah panjang bangsa teridentifikasi bahwa cita-cita kolektif kebangsaan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Sebenarnya kesadaran kolektif nasionalisme tersebut merupakan perwujudan bangunan konsep persatuan Indonesia, sebagaimana amanat sila ketiga Pancasila, tempat kebersamaan segenap bangsa Indonesia dengan asal-usul bangsa atau ras, agama, etnik, adapt-istiadat, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi politiknya yang pluralistik. Asas *pluralism* yang

dahulu menjadi sumber kekuatan hebat masa kolonialisme dan imperialisme, ruhnya perjuangan merebut kemerdekaan, ternyata pada saat bangsa ini dihadapkan pada degradasi kebangsaan, tak urung asas pluralisme tersebut menjadi medan ekspresi kekecewaan dan sumber kerawanan konflik.

Nasionalisme dalam konsepsi sosial-kultural, kelahirannya tidak muncul begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media bahasa. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata *nationalism* dan *nation* dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik Guido Zernatto, (1944) dalam Sulfikar Amir (2007), kata *nation* tersebut berasal dari kata Latin *natio* yang berakar pada kata *nascor* yang bermakna ‘saya lahir’, atau dari kata *natus sum*, yang berarti ‘saya dilahirkan’. Selama Kekaisaran Romawi, kata *natio* secara peyoratif dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Beberapa ratus tahun kemudian pada Abad Pertengahan, kata *nation* digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di universitas-universitas (seperti Permias untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sekarang) (Sulfikar Amir, 2007). Kata *renaisans* dalam bahasa Italia, *renaissance*, juga berasal dari akar kata latin yang sama, yakni dari *renascor* atau *renatus sum*, yang berarti saya lahir kembali dan saya dilahirkan kembali (A. Daliman, 2006: 56).

Konsep *nation* mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis. Ketika itu Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai *assemblee nationale* yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum kelas elite dalam berpolitik. Jika pada masa Abad Pertengahan (Abadke-5-15), kebebasan individu dan kebebasan berpikir banyak didominasi oleh kekuasaan dan otoritas agama (gereja), maka sesudah renaissans timbullah cita-cita kemerdekaan, lepas dari segala bentuk dominasi, dan pula dari dominasi dogma agama (A. Daliman, 2006: 57). Dari sinilah makna kata *nation* menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.

Dinamika nasionalisme sebagai sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah politik, bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya. Begitu rumitnya pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Max Weber pun nyaris frustrasi manakala harus memberikan terminologi sosiologis tentang makna nasionalisme. Pada sebuah artikel singkat yang ditulis Weber pada 1948,

menunjukkan adanya sikap pesimistis bahwa sebuah teori yang konsisten tentang konsepsi nasionalisme dapat dibangun. Tidak tersedianya rujukan mapan yang dapat dijadikan dasar dan pegangan dalam memahami nasionalisme hanya akan menghasilkan persepsi yang dangkal. Bagaimanapun bentuk penjelasan tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai kultur, menurut Weber, hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan universal. Termasuk dua bapak ilmu sosial Karl Marx dan Emile Durkheim pun tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena nasionalisme (Sulfikar Amir, 2007). Tetapi, itu tak berarti nasionalisme harus disikapi secara *taken for granted* dan diletakkan jauh-jauh dari telaah teoretis. Besarnya implikasi nasionalisme dalam berbagai dimensi sosial mengundang para sarjana mencoba memahami dan sekaligus mencermati secara kritis konsep bangsa dan kebangsaan (nasionalisme), seberapa pun besarnya paradoks dan ambivalensi yang dikandungnya. Tentu saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisme tidak mudah mengingat, seperti yang dikatakan Weber, begitu beragam faktor yang membentuk bangunan nasionalisme, sehingga indikatornya tidak dapat diidentifikasi secara pasti.

Hans Kohn, seorang sejarawan yang cukup terkenal dan paling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, memberikan terminologi yang sampai saat ini masih tetap digunakan secara relevan dalam pembelajaran di sekolah, yakni: "*nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state*". Bahwa nasionalisme merupakan suatu faham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Hans Kohn, 1965: 9). Konsep nasionalisme tersebut menunjukkan bahwa selama berabad-abad silam kesetiaan orang tidak ditujukan kepada *nation state* atau negara kebangsaan, melainkan kepada pelbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja feodal, suku, negara kota, kerajaan dinasti, golongan keagamaan atau gereja.

Menurut Muhammad Imarah (1998: 281), cinta tanah air atau nasionalisme adalah fitrah asli manusia dan sama dengan kehidupan, sedangkan kehilangan rasa cinta tanah air sama dengan kematian. Hasan al-Banna (1906-1949) dalam Imarah (1998: 282–283), berbicara tentang

nasionalisme serta kedudukannya pada kebangkitan Islam modern mengemukakan:

“...sesungguhnya Ikhwanul Muslimin mencintai negeri mereka; menginginkan persatuan dan kesatuan; tidak menghalangi sispapun untuk loyal kepada negerinya, lebur dalam cita-cita bangsanya, dan mengharapkan kemakmuran dan kejayaan negerinya. Kita bersama para pendukung nasionalisme, bahkan juga bersama mereka yang berhaluan nasionalis ekstrim sejauh menyangkut kemaslahatan bagi negeri ini dan rakyatnya...”

Pandangan Hasan al-Banna tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya substansi nasionalisme itu sama meskipun dengan kriteria yang berbeda seperti aqidah, batas-batas peta bumi, dan letak geografis. Pendapat ini menetralsir pertentangan konsepsi nasionalisme Islam dan Barat dalam konsepsi yang lebih substantif. Tentunya gagasan ini tidak sependapat dengan pandangan A. Hassan (1984: 42–46) mengenai cinta bangsa dan tanah air.

Sedangkan dalam konsepsi politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. Dengan demikian pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan solidaritas melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi (Sartono Kartodirdjo, 1994: 4). Hal ini sejalan dengan konsepsi Wikipedia Bahasa Melayu dalam Ensiklopedi Bebas yang mengidentifikasi bahwa nasionalisme merupakan suatu ideologi yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sesebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan suatu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia (<http://ms.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2007).

D. Hubungan Nasionalisme dan *Nation State*

Hubungan antara nasionalisme dan *nation state*, sangat erat tidak dipisahkan satu sama lain. Nasionalisme merupakan semangat, kesadaran, dan kesetiaan bahwa suatu bangsa itu adalah suatu keluarga dan atas dasar rasa sebagai suatu keluarga bangsa, dan oleh karena itu dibentuklah negara. Dalam konsepsi ini berarti negara merupakan nasionalisme yang melembaga. Oleh karena itu pada dasarnya nasionalisme merupakan dasar universal bagi setiap

negara. Bangsa lebih menunjuk pada penduduk suatu negeri yang dipersatukan di bawah suatu pemerintahan tunggal yang disebut negara. Sedang negara lebih menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat atau atau bangsa yang menempati wilayah tertentu yang terorganisir secara politis di bawah suatu pemerintah yang berdaulat, dan atau tidak tunduk kepada kekuasaan dari luar (A. Daliman, 2006: 59; Louis L Snyder, 1954: 17–18).

Nasionalisme sebagai sebuah produk modernitas, perkembangannya berada di titik persinggungan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Tetapi nasionalisme tidak sekedar dilihat sebagai sebuah proses dari atas ke bawah di mana kelas dominan memiliki peranan lebih penting dalam pembentukan nasionalisme daripada kelas yang terdominasi. Ini berarti bahwa pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dapat dilakukan tentunya juga dengan melihat apa yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut meresap dan berakar secara kuat (Sulfikar Amir, 2007). Pada tingkat inilah elemen-elemen sosial seperti bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme.

Benedict Anderson (1991) memandang nasionalisme sebagai sebuah ide atas komunitas yang dibayangkan, *imagined communities*. Dibayangkan karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut. Nasionalisme hidup dari bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. Pandangan konstruktivis yang dianut Anderson menarik karena meletakkan nasionalisme sebagai sebuah hasil imajinasi kolektif dalam membangun batas antara kita dan mereka, sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya melalui kapitalisme percetakan, bukan semata-mata fabrikasi ideologis dari kelompok dominan (Sulfikar Amir, 2007).

Konsep Anderson sangat unik dan selanjutnya dapat ditarik lebih jauh untuk menjelaskan kemunculan nasionalisme di negara-negara pascakolonial. Tidaklah suatu hal yang kebetulan apabila konsep Anderson sebagian besar didasarkan atas pengamatan terhadap dinamika sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Namun demikian, karya Anderson yang dapat menjadi sumber kritik orientalisme seperti yang ditengarai oleh

Edward Said terhadap cara pandang ilmuwan Barat dalam merepresentasikan masyarakat non-Barat (Sulfikar Amir, 2007). Dalam bukunya, *Imagined Communities*, Anderson berpendapat bahwa nasionalisme masyarakat pascakolonial di Asia dan Afrika merupakan hasil emulasi dari apa yang telah disediakan oleh sejarah nasionalisme di Eropa. Para elite nasionalis di masyarakat pascakolonial hanya mengimpor bentuk modular nasionalisme bangsa Eropa. Di sini letak problematika dari pandangan Anderson karena menafikan proses-proses apropriasi dan imajinasi itu sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pascakolonial dalam menciptakan bangunan nasionalisme yang berbeda dengan Eropa.

Anderson juga mengikuti perkembangan nasionalisme pasca Perang Dunia II yang melanda negara-negara jajahan di Asia dan Afrika, yang karakternya ditandai oleh penyebaran nasionalisme melalui bahasa penjajah baik di sekolah-sekolah, media massa, maupun birokrasi yang menghasilkan golongan terpelajar putera, kesatuan administrasi pemerintahan; dan karena kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi membentuk kecenderungan sentralisasi pada pemerintahan pusat di ibukota, yang sedang berkembang menjadi metropolitan (Benedict Anderson, 1983: 49). Berdasarkan hal itu dapat ditiesiskan bahwa nasionalisme merupakan penemuan bangsa Eropa yang diciptakan untuk mengantisipasi keterasingan yang merajalela dalam masyarakat modern. Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme memiliki kapasitas memobilisasi massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakan teleologi modernitas. Kondisi-kondisi yang terbentuk ini tak lepas dari Revolusi Industri ketika urbanisasi dalam skala besar memaksa masyarakat pada saat itu untuk membentuk sebuah identitas bersama. Dengan kata lain, nasionalisme dibentuk oleh kematerian industrialisme yang membawa perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Dari sudut pandang deterministik ini Gellner sampai pada satu argumen bahwa nasionalisme melahirkan bangsa, bukan sebaliknya (Sulfikar Amir, 2007).

E. Perkembangan Nasionalisme

Nasionalisme merupakan sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya (Widodo Dwi Putra dalam Kompas Rabu, 11 Juni 2003). Tetapi secara empiris, nasionalisme tidak sesederhana definisi itu, melainkan selalu dialektis dan interpretatif, karena nasionalisme bukan pembawaan manusia sejak lahir, melainkan sebagai hasil peradaban manusia dalam menjawab

tantangan hidupnya. Dalam sejarah Indonesia dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme didaur ulang kembali oleh para generasi muda, karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya. Dalam konsepsi ini, paling kurang ada lima fase pertumbuhan nasionalisme di Indonesia yakni sebagai berikut.

Pertama gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali oleh Boedi Oetomo di tahun 1908, dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priyayi Jawa, di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Mengenai tahun dan nama organisasi sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia, masih menjadi obyek perdebatan para ahli sejarah, karena Boedi Oetomo, tidaklah menasional organisasinya, tetapi hanya melingkupi Jawa saja. Jadi patut dipertanyakan sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia (A. Fanar Syukri, dalam <http://ppi-jepang.org/article.php?id=1>, diakses tanggal 2 Agustus 2007).

Kemudian pasca Perang Dunia I, filsafat nasionalisme abad pertengahan mulai merambat ke negara-negara jajahan melalui para mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negara penjajah. Filsafat nasionalisme itu banyak memengaruhi kalangan terpelajar Indonesia, misalnya, Soepomo ketika merumuskan konsep negara integralistik banyak menyerap pikiran Hegel. Bahkan, Soepomo terang-terangan mengutip beberapa pemikiran Hegel tentang prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya. Begitu pula pada masa kini banyak diciptakan lagu-lagu kebangsaan yang sarat dengan muatan semangat nasionalisme seperti Indonesia Raya, Dari Sabang Sampai Merauke, Padamu Negeri, dan sebagainya (A. Fanar Syukri, dalam <http://ppi-jepang.org/article.php?id=1>, diakses tanggal 2 Agustus 2007).

Tokoh nasional lain selain Soepomo, Hatta, Sutan Syahrir pun sudah aktif berdiskusi tentang masa depan negaranya, ketika mereka masih belajar di benua Eropa, atas beasiswa *politic-etis* balas budinya penjajah Belanda. Setelah selesai di PHS selesai 1921, kemudian Hatta meneruskan studi ke Belanda, masuk *Handels Hooge School* (Sekolah Tinggi Ekonomi) Refterdam. Selama di Belanda inilah Bung Hatta memegang peranan vital dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Masuknya Bung Hatta ke dalam perhimpunan Indonesia menjadikan organisasi ini semakin kuat pengaruhnya dan semakin radikal. Bung Hatta dan mereka yang menempuh pendidikan Barat inilah di masa pra & pascakemerdekaan yang nantinya banyak aktif berkiprah menentukan arah

masa depan Indonesia (Aman, 2006). Sementara Bung Karno sejak remaja, masa mahasiswa bahkan setelah tamat studinya, terus aktif menyerukan tuntutan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi-organisasi yang tumbuh pada awal abad ke-20 (Aman, 2006).

Kedua kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera dan lain sebagainya, kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemoeda di tahun 1928.

Ketiga masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan, nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas-Dengklok agar segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan *nation state* yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Hasrat dan cita-cita mengisi kemerdekaan yang sudah banyak didiskusikan oleh Soekarno, Hatta, Soepomo, Syahrir, dan lain sebagainya sejak mereka masih berstatus mahasiswa, harus mengalami pembelokan implementasi di lapangan, karena Soekarno yang semakin otoriter dan keras kepala dengan cita-cita dan cara yang diyakininya. Akhirnya Soekarno banyak ditinggalkan teman-teman seperjuangan yang masih memegang idealismenya, dan mencapai puncaknya ketika Hatta, sebagai salah seorang proklamator, harus mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, karena tidak kuat menahan diri untuk terus menyetujui sikap dan kebijakan Presiden Soekarno yang semakin otoriter.

Keempat, perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapu dan eksesnya. Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa orde-lama Soekarno. Tetapi sayang, penguasa Orde Baru mencampakan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut dideskreditkan, dan bahkan sejak akhir tahun 1970-an para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikungkung ke dalam ruang-ruang kuliah di kampus. Sementara para tentara diguritkan ke dalam tatanan masyarakat sipil lewat dwifungsi

ABRI. *Kelima* perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang.

BAB VIII

PENUTUP

Dalam pembangunan ekonomi dewasa ini, kita tampaknya perlu menimba pengalaman-pengalaman masa lampau, misalnya, bagaimana sistem ekonomi modern mempunyai dampak baik positif maupun negatif terhadap sistem ekonomi subsistensi. Sumbangan pemikiran sejarah dalam kajian ekonomi Indonesia abad ke-19 dapat memberikan sebagian jawaban untuk kepentingan yang berarti pada masa sekarang. Demikianlah, sejarah akan menemukan kegunaannya melalui tiga dimensi waktu yakni masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Konsepsi ini sangat relevan dengan terminologi Allan Nevin yang menegaskan bahwa sejarah adalah jembatan penghubung antara masa lampau, masa sekarang, dan sebagai petunjuk arah ke masa depan. Sejarah dalam bentuknya yang seperti apapun juga, hendaknya janganlah dianggap hanya sebagai kenangan masa lalu yang tiada guna, melainkan menjadikannya suatu peristiwa bermakna bagi kehidupan riil umat manusia.

Tidak salah lagi Sistem Tanam Paksa yang diterapkan di Hindia Belanda telah mendatangkan perubahan sosial masyarakat baik secara makro maupun mikro. Pada pokoknya, Sistem Tanam Paksa merupakan penghisapan dan pemerasan secara brutal yang dikelola oleh orang-orang yang tamak dan haus akan kekuasaan, yang nilai-nilainya dibentuk oleh latarbelakang kebudayaan masing-masing. Sistem Tanam Paksa menjalankan suatu tipu muslihat pada lingkungan sosio-ekonomi secara lebih canggih dan rumit. Dalam membahas Sistem Tanam paksa, akan lebih komprehensif apabila dikaji tidak secara tradisional, agar berbagai aspek yang menyertai dilaksanakannya sistem dapat teungkap. Karena jika tidak, maka gambaran utuh dari sistem ini tidak akan ditemukan. Namun demikian secara riil adalah

tidak dapat diabaikan bahwa pelaksanaan Sistem Tanam Paksa mengondisikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Adanya pembentukan modal. Aspek ini tidak dapat disangkal oleh peneliti manapun bahwa pelaksanaan Sistem Tanam Paksa telah menimbulkan permodalan di Hindia Belanda. Pembentukan modal yang merupakan aspek dari sejarah kolonial yang terutama melibatkan orang-orang Eropa dan Cina, ketimbang bangsa Indonesia sendiri, bahwa modal perusahaan di Eropalah yang menyebabkan terpecah-pecahnya Sistem Tanam Paksa yang diawasi oleh pemerintah itu. Pembentukan modal yang utama, yang berdampak pada meluasnya tanam paksa di Jawa, terjadi di Jawa sendiri, dan kondisi tersebut terjadi selama berjalannya Sistem Tanam Paksa dan merupakan bagian dari Sistem Tanam Paksa tersebut.

Kontraktor-kontraktor gula pemerintah merupakan pemimpin-pemimpin dalam pembentukan modal tersebut, namun demikian kantor-kantor perwakilan yang selalu ada di Jawa yang hidup makmur di bawah Sistem Tanam Paksa, juga sanggup bekerja sama dengan para pegawai pemerintah yang telah pensiun, melebarkan sayapnya ke dalam daerah-daerah di mana pemerintah bersama perwakilan resminya, yaitu "*The Netherlands Trading Company*" (*Nederlandsche Handel Maatschappij*) tidak berhasil memperoleh keuntungan. Sistem Tanam Paksa melalui semacam oerasi *bootstrap* yang dibenarkan serta ditunjang oleh pemerintah, berhasil mendapatkan modal yang dahulunya tidak ada, atau ada tepi masih terbatas. Para kontrolir modal ini (dan ada beberapa injeksi swasta dari Eropa) akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan itu secara lebih baik dengan menuruti peraturan-peraturan swasta yang liberal, ketimbang dengan bekerja melalui sistem pemerintah yang berbelit-belit dan untuk hal tersebut mereka memperoleh dukungan dalam Parlemen di Negeri Belanda.

Masukan-masukan modal yang besar dari Eropa ke Jawa hanya terjadi sesudah tahun 1880, ketika Sistem tanam Paksa benar-benar sudah dalam proses pembubaran secara resmi. Dengan demikian tentunya pembentukan modal secara besar-besaran lebih kentara ketika Sistem Liberal mulai diterapkan. Namun demikian ini bukan berarti bahwa pada masa penerapan Sistem Tanam Paksa tidak terdapat pembentukan modal, namun dalam skala yang tidak terlalu besar seperti pada masa Sistem Liberal.

Dengan demikian bagaimana dampak pembentukan modal pada Sistem Tanam Paksa terhadap perkembangan ekonomi Jawa selanjutnya.

Dengan realitas bahwa pembentukan modal lebih banyak terjadi pada sesudah tahun 1880, maka pertanyaan yang sederhana adalah apa yang telah dilakukan oleh Sistem Tanam Paksa adalah memperlihatkan secara jelas, bahwa Jawa dapat menghasilkan komoditas ekspor dengan cara-cara yang sangat murah untuk dapat bersaing di pasaran dunia. Begitu Jawa maupun luar Jawa menampakkan hasil komoditi yang menjanjikan, maka Indonesia menjadi lahan yang menarik bagi penanaman modal. Namun demikian para pengusaha yang berada di Pulau Jawa-lah yang paling pertama mengetahui hal tersebut, dan mengetahui bagaimana cara-cara yang dipakai oleh pemerintah kolonial untuk memungkinkannya.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau pertumbuhan penanaman modal dalam bidang pertanian di Jawa berasal dari antara kelompok pengusaha yang hubungannya satu sama lain sangat erat, para pegawai dan kantor-kantor perwakilan yang ada dan bekerja di Jawa. Jalan yang dirintis oleh mereka pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 meluas menjadi jalan besar untuk penanaman modal seluruh dunia di Jawa dan kemudian di bagian-bagian lainnya dari Kepulauan Nusantara. Dengan pembentukan modal tersebut, kedudukan Jawa menjadi semakin penting bagi komoditas ekspor dunia, terutama bagi pemerintah kolonialisme Belanda maupun pengusaha-pengusaha swasta Eropa.

Kedua adanya tenaga buruh yang murah yang menandai kehidupan di Jawa yang telah lama berlangsung jauh sebelum Sistem Tanam Paksa diterapkan. Rakyat kelas bawah sudah menjadi tradisi bekerja wajib untuk para pemimpin tradisional yang memiliki otoritas tradisional sebagai pemimpin dalam masyarakatnya. Hubungan-hubungan ketergantungan di samping adanya perbudakan dalam kebanyakan hal, merupakan kunci yang menentukan dari perbedaan-perbedaan sosial dalam masyarakat. Ketika Belanda menguasai Pantai Utara Jawa pada abad ke-18, maka Belanda merasa beruntung karena dapat memakai tenaga-tenaga buruh yang sangat murah, dan menerima penyerahan-penyERAHAN produk tanpa pembayaran atau dengan pembayaran yang jauh dari biaya yang dikeluarkannya.

Hal demikian tentunya adalah hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh para petani Jawa untuk para atasan dengan biaya yang sangat murah sekali, dan produk-produk yang dihasilkan tentu didapatkan tanpa pembayaran upah dalam bentuk uang. Masyarakat Jawa kelas menengah dan tinggi sebenarnya tahu cara-cara kolonial dalam mengeksploitasi masyarakat Jawa, namun dalam

hal tersebut tidak dapat berbuat banyak. Karena tidak ada peraturan-peraturan yang mantap mengenai tenaga buruh, maka tidaklah mungkin untuk memprediksikan jumlah hari kerja wajib yang harus dijalankan, namun demikian diperkirakan jumlah tersebut terus meningkat selama penerapan Sistem Tanam Paksa.

Pada awal abad ke-19, terdapat beberapa orang yang selama setengah tahun mempekerjakan buruh yang diperuntukan bagi mereka sendiri dan orang-orang lain dengan tingkat pembayaran yang sangat rendah, tetapi seringkali dengan semacam cara pengaturan mata pencaharian. Petani miskin tidak punya kekuatan untuk melakukan penolakan terhadap kerja wajib meskipun upah yang diberikan tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dikerjakan, namun karena kebutuhan yang mendesak bagi keluarganya, maka mereka tetap menjalankan pekerjaan tersebut. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki lahan garapan, sehingga bekerja pada mereka kelas atas itulah sebagai mata pencahariannya. Sementara pelayanan wajib untuk pemerintah *corvee* sudah lama ada sebelum Sistem Tanam Paksa diperkenalkan, karena orang Eropa yang berkuasa selalu menganggap bahwa mereka memiliki hak paling besar atas buruh yang berada di wilayah-wilayah pengawasan mereka.

Sistem Tanam Paksa mempertahankan *corvee* dan menambahkan padanya sesuatu apa yang disebut *cultivation service* (pelayanan pada tanam paksa) yang merupakan pekerjaan pada tanam paksa untuk pemerintah. Pada dasarnya pelayanan terhadap tanam paksa ini diimbangi dengan bentuk pembayaran hasil panen, namun lebih sering orang-orang yang benar-benar melakukan pekerjaan tersebut tidak mendapat bayaran. Menyangkut golongan-golongan di tingkat rendah ini, mereka menganggap bekerja dalam tanam paksa untuk pemerintah adalah sebagai apa yang mereka kerjakan untuk para pemimpin tradisionalnya. Namun demikian bagi golongan miskin penerapan Sistem tanam paksa ini menjadi lebih tergantung pada penguasaan tradisional, meskipun mereka bekerja dengan upah yang tidak sebanding dengan beban pekerjaannya.

Dengan begitu maka terjadilah apa yang disebut sebagai hubungan simbiosis antara tenaga buruh yang murah dan syarat mata pencaharian pokok untuk membiayai kehidupannya, menjadi semakin kuat, sedangkan konsep bekerja untuk mendapatkan upah yang diperlukan agar dapat bertahan hidup tidak pernah berhasil di antara kaum tani Jawa yang lebih miskin. Ketergantungan penduduk miskin terhadap Sistem Tanam Paksa inilah yang

mengakibatkan tenaga buruh dihargai dengan upah yang sangat rendah, di samping adanya sistem tradisional yang selalu mengkondisikan tenaga buruh yang mau bekerja wajib untuk atasannya.

Ketiga ekonomi pedesaan yang berubah selama penerapan Sistem Tanam Paksa dan sesudahnya. Struktur politik dan ekonomi pedesaan yang selama abad ke-19 menunjukkan kenyataan-kenyataan sosial-ekonomi dari kehidupan orang-orang Jawa, dengan mengubah hasil panen dan tenaga buruh yang murah menjadi pengaturan fungsional. Desa-desanya merupakan sumber dari mana tenaga buruh dan hasil pertanian ditarik, walaupun hanya dari beberapa penduduk desa. Pada awal abad ke-19, golongan atas di pedesaan Jawa menjadi lebih kuat karena penunjukkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan baru yang memungkinkan para kepala desa dan para kroninya yang memiliki otoritas atas pengawasan lahan, tenaga buruh dan hasil pertanian sampai ke tingkat yang lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah kolonial semakin banyak berhubungan dengan para pemimpin tradisional Jawa untuk mencapai sasaran produksi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, otoritas golongan atas desa semakin besar dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Namun di luar itu golongan rendah tetap miskin dan semakin bertambah tertindas karena harus melayani padagolongan atas desa dan pemerintah kolonial dengan tingkat kesejahteraan yang tetap rendah. Dengan demikian Sistem tanam Paksa melanjutkan proses untuk membuat desa di Jawa menjadi unit paling rendah dalam suatu sistem organisasi terpusat; di mana proses ini masih ditambah pula dengan menjadikan desa sebagai basis produksi dan unit mata pencaharian yang utama dari masuknya Jawa ke dalam perekonomian pasaran dunia. Fungsi tersebut terus berlanjut setelah Sistem Tanam Paksa tersebut memudar dan tetap merupakan dasar kehidupan ekonomi di Jawa selama masa kolonial. Jawa tetap dijadikan sumber eksploitasi oleh pemerintah kolonial sampai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda yang kemudian digantikan oleh pendudukan Jepang.

Semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: 1) kesatuan (*unity*), dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan *policy* kebudayaan; 2) kebebasan (*liberty, freedom, independence*), dalam beragama,

berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; 3) kesamaan (*equality*), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban; 4) kepribadian (*personality*) dan identitas (*identity*), yaitu memiliki harga diri (*self esteem*), rasa bangga (*pride*) dan rasa sayang (*deposition*) terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya; 5) prestasi (*achievement*), yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) serta kebesaran dan kemanusiaan (*the greatness and the glorification*) dari bangsanya. Dengan demikian, sikap nasionalisme dapat dirumuskan melalui sikap dan perilaku sebagai berikut: bangga sebagai bangsa Indonesia; cinta tanah air dan bangsa; rela berkorban demi bangsa; menerima kemajemukan; bangga pada budaya yang beraneka ragam; menghargai jasa para pahlawan; dan mengutamakan kepentingan umum.

KEPUSTAKAAN

- A. Fanar Syukri, (2007). *Peran Pemuda dalam 20 Tahunan Siklus Nasionalisme Indonesia (Refleksi 75 tahun Soempah Pemoeda, 1928-2003)*. Dalam <http://ppi-jepang.org/article.php?id=1>. Diakses tanggal 2 Agustus 2007.
- Ahmad Syafii Maarif. (1985). *Masalah Kenegaraan*. Jakarta : LP3ES.
- Ahmad Syafii Maarif. (2002). *Refleksi 50 tahun Indonesia Merdeka*. Yogyakarta : UNY.
- Alfian. (1971). *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat*.
- Amin, SM. (1967). *Indonesia di bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Anderson, B. (1998). *Revolusi Pemuda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aman. (2006). "Pemikiran Hatta tentang Demokrasi, Kebangsaan, dan Hak Asasi Manusia". Dalam *Mozaiik, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Volume 1 Nomor 1, Juli 2006*.
- Anne Booth, William J.O'Malley, Anna Weidemann (ed), (1988). *Sejarah Ekonomis Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Anastasius Daliman. (2006). "Harmonisasi antara Nasionalisme dalam Kehidupan Bernegara dan Beragama", dalam *Kearifan Sang Profesor*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- A. Hassan. (1984). *Islam dan Kebangsaan*. Bangil: Lajnah Penerbitan Pesantren Persis Bangil.
- B. Schrieke. (1964). *Indonesian Sociological Studies*. Bandung: Sumur Bandung.
- Biro Pusat Statistik, (1975). *Statistik Indonesia*. Jakarta : BPS.
- Collingwood, RG., *The Idea of History*. London: Oxford University Press.
- C. Fasseur, (1975). *Kulturstelsel en Koloniale Baten: De Nederlandse Exploitatie Van Java 1840-1860*. Leiden: University Press.
- Dahm, B. (1969). *Sukarno and the Struggle for Indonesia Independence*. Ithaca and London : Cornell University Press.
- Daulay, S. (2021). PERGUMULAN ISLAM DAN KOLONIALISME ABAD KE 18 DAN 19. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1).
- Depdiknas. (2003). *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : Depdiknas.

- de Zwart, P. (2021). Globalisation, Inequality and Institutions in West Sumatra and West Java, 1800–1940. *Journal of Contemporary Asia*, 51(4).
- de Zwart, P. (2022). Inequality in late colonial Indonesia: new evidence on regional differences. *Chimetrica*, 16(1).
- Fajariah, M., & Suryo, D. (2020). Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760-1830. *HISTORLA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 8(1).
- Feith, Herbert. (1964). *The Deline of Conctitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca : University Press
- Feith, Herbert. (1970). *Indonesia Political Thinking :1945-196*. Ithaca and London : Cornell University Press.
- Fionna, U. (2021). Genesis of Modern Political Organisation in Indonesia. In *The Institutionalisation of Political Parties in Post-authoritarian Indonesia*.
- Gelman Taylor, J. (2020). The global corporation comes to Indonesia: the VOC. In *Global Indonesia*.
- Hummel, M., & dos Santos Lopes, C. (2020). Address in Portuguese and Spanish: Studies in diachrony and diachronic reconstruction. In *Address in Portuguese and Spanish: Studies in Diachrony and Diachronic Reconstruction*.
- Hutagalung, B.R., *Batig Sloop dari Cultuurstelsel. Monopoli Perdagangan Opium oleh Pemerintah India-Belanda*.
- Hatta, Moh. (1974). *Detik-Detik Sekitar Proklamasi 1945*. Jakarta: Yaperna.
- Jalil, L. A. (2020). Pembangunan Benteng Nostra Senora Del Rosario (*The Establishment of Nostra Senora Del Rosario Fort*). *Kindai Etam: Jurnal Penelitian Arkeologi*, 5(1).
- Joeniarso. (2000). *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kadi, İ. H. (2021). An Old Ally Revisited: Diplomatic Interactions Between the Ottoman Empire and the Sultanate of Aceh in the Face of Dutch Colonial Expansion. *International History Review*, 43(5).
- Kahin, G.McT. (1963). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York : Cornell University Press.
- Kloos, D. (2021). Dis/connection: Violence, Religion, and Geographic Imaginings in Aceh and Colonial Indonesia, 1890s-1920s. *Itinerario*, 45(3).
- Leirisa, R.Z. (1986). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Depdikbud
- Magnusson, L. (2022). Freedom and Capitalism in Early Modern Europe: Mercantilism and the Making of the Modern Economic Mind. *History of Political Economy*, 54(2).
- March Block. (1961). *Social Society*. Chicago: University of Chicago.
- Meng, L. Y., & Silva, M. de. (2022). The Roots and Evolution of Nationalism in Indonesia. *Akademika*, 91(3), 93–104.

- Muhammad Imarah. (1998). *Perang Terminologi Islam Versus Barat*. Jakarta: Robbani Press.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. (1990). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Moedjanto, G. (1989). *Indonesia Abad ke 20 1 dan 2*. Yogyakarta : Kanisius.
- Nasution, AH. (1963). *Menuju Tentara Rakyat*. Jakarta : Yayasan Penerbit Minang.
- Nessel, C. (2021). Colonialism in its modern dress: post-colonial narratives in Europe-Indonesia relations. *Asia Europe Journal*, 19(1).
- Pora, S., Kuswanjono, A., & Hadi, H. (2020). Epistemological implications of maluku spices against european minds in xiv-xvii century. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4).
- Rochadi, A. S. (2021). Racialized capitalism and anti-chinese among indonesian workers. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(2).
- Robert Van Niel, (1992). *Java Under the Cultivation System: Collected Writings*. Leiden: KITLV Press.
- R.E. Elson, (1978). *The Cultivation System and 'Agricultural Involution'*. Melbourne: Monash University.
- Reid, Anthony. (1974). *The Indonesian National Revolution 1945-1950*. Hawthorn Victoria : Longman.
- Ricklef, M.C. (1993). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ruhlessin, J. C., & Parihala, Y. (2021). Being an indonesian christian: Exploration of a theology of nationalism in the history of the proclamation of indonesian independence on 17 august 1945. *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 77(4).
- Sartono Kartodirdjo. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono Kartodirdjo. (1989). "Fungsi Sejarah dalam Pembangunan Nasional", dalam *Historika No.1 Tahun I*. Surakarta: Program Pasca Sarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta KPK Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sartono Kartodirdjo. (1966). *The Peasants, Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijgoft.
- Sartono Kartodirdjo. (1999). *Multi Dimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono Kartodirdjo. (1990). *Pembangunan Bangsa, Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

- Sartono Kartodirdjo. (1977). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1-6*. Jakarta : Gramedia
- Sellars, J. (2020). Renaissance Humanism and Philosophy As A Way of Life. *Metaphilosophy*, 51(2–3).
- Siegel, J.T. (2000). *A New Criminal Type in Jakarta : Counter Revolution Today*, Alih Bahasa Noor Cholis. Yogyakarta : LKS.
- Slamet Mulyana. (1986). *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soedjatmoko. (1984). *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Soekarno. (1960). *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*, Jakarta PP dan K.
- Sulfikar Amir. (2007). *Efistomologi Nasionalisme*. Diambil pada pada <http://kompas.com/kompas-cetak/0411/03/Bentara/1363295.htm> Diakses tanggal 2 Agustus 2007.
- Suyatno Kartodirdjo. (2000). “Teori dan Metodologi Sejarah dalam Aplikasinya”, dalam *Historika, No.11 Tahun XII*. Surakarta: Program Pasca Sarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta KPK Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tampubolon, M., Tobing, G. L., & Wahyuningtyas, W. (2022). Human Enslavement: Indonesians’ Encounter During Dutch Colonization. *Asian Journal of Research in Education and Social Sciences*, 4(1).
Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
- W.F.Wertheim. (1956). *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Bandung: Sumur Bandung.
- Yahya Muhaimin. (1971). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zahra, Y. (2020). Antara Otoritas Agama dengan Kebebasan Berpikir Galileo Galilei. *'ADALAH*, 4(4).
- Zainol Hasan, & Mahyudi, M. (2020). Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1).
(<http://ms.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2008).
- (A. Fanar Syukri, dalam <http://ppi-jepang.org/article.php?id=1>. Diakses tanggal 2 Agustus 2007).

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. Aman, M.Pd. Lahir di Brebes, 15 Oktober 1974. Menamatkan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Sejarah FIS Universitas Negeri Yogyakarta lulus tahun 1999, menamatkan program magister pada Program Studi Pendidikan Sejarah PPS Universitas Negeri Jakarta lulus tahun 2002, dan menamatkan Program Doktorat pada Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Konsentrasi Metodologi Evaluasi pada Program Doktorat PPS Universitas Negeri Yogyakarta lulus tahun 2010.

Pengalaman mengajar menjadi guru di SMA Negeri I Salem Brebes tahun 2002–2004, menjadi Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap tahun 2002–2005, menjadi dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2003–sekarang, dan menjadi Dosen Luar Biasa pada Fakultas Saintek UIN Kalijaga Yogyakarta tahun 2007–2009. Banyak karya penelitian, artikel, dan buku yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir seperti artikel Kendala-kendala Reformasi Pengajaran Sejarah dalam Jurnal Socia tahun 2005, Di Seputar Pengajaran Sejarah dalam Jurnal Istoria tahun 2006, Tumbuhnya Nation State: Sebuah Kajian Awal dalam jurnal Istoria Tahun 2006, Kendala-kendala Pembelajaran IPS Materi Sejarah dalam Jurnal Informasi 2010, serta buku referensi: Brebes Bergerak: Revolusi dalam Revolusi diterbitkan oleh The Continuum Press Yogyakarta tahun 2009, Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah yang diterbitkan Ombak Press tahun 2010, Sejarah Ketatanegaraan yang diterbitkan oleh Ombak Press tahun 2019. Aktif Juga dalam berbagai kegiatan profesi seperti menjadi pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Yogyakarta dan P3SI.

Prof. Dr. Aman, M.Pd.

INDONESIA *dari* KOLONIALISME *Sampai* NASIONALISME

Perjalanan sejarah Indonesia dari kolonialisme hingga nasionalisme dihadapkan pada berbagai dinamika yang kompleks, menampilkan berbagai warna peristiwa yang penuh makna bagi tumbuh dan berkembangnya negara bangsa Indonesia. Kehadiran buku ini sangat penting mengingat referensi yang membahas seputar permasalahan ini sangat terbatas, terutama bagi kalangan mahasiswa di perguruan tinggi.

Sejarah Indonesia masa kolonial hingga munculnya berbagai pergerakan nasional, merupakan bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang panjang. Kedaulatan Indonesia bukan semata-mata lahir secara instan tahun 1945, atau hanya sekedar peluang ketemu momentum, melainkan sebuah proses kompleks yang mencerminkan berbagai perjuangan anak bangsa untuk meraih kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Pertumbuhan nasionalisme berkembang dari nasionalisme primitif dalam bentuk *tribe community*, hingga nasionalisme modern pada tahun 1908. Nasionalisme modern itu tidak lain dan tidak bukan lahir karena dominasi kolonialisme yang kuat, memberikan banyak kesengsaraan rakyat, keterbelakangan mental, dan berbagai dampak destruktif bagi bangsa yang belum menjadi negara. Bangsa sudah ada dan sangat heterogen, tetapi negara berdaulat belum terbentuk. Sumpah pemuda tahun 1928 mencerminkan hal demikian, di mana bangsa sudah terbentuk yakni bangsa Indonesia, tetapi negara belum terbentuk masih memerlukan perjuangan yang panjang hingga 18 Agustus 1945 secara *defacto* dan *deyure* negara bangsa Indonesia sudah terbentuk.

Buku karangan Prof. Dr. Aman, M.Pd yang berjudul "Indonesia dari Kolonialisme Sampai Kolonialisme" ini menguraikan secara runtut tematis peristiwa seputar kolonialisme Indonesia sampai munculnya nasionalisme modern. Perhatian penulis tidak hanya pada peristiwa yang terjadi, melainkan pihak-pihak yang terlibat dan sebab akibat peristiwa seputar itu juga diuraikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Buku menjadi merupakan pilihan yang tepat bagi para dosen, guru, mahasiswa, siswa sekolah menengah, dan masyarakat secara luas yang ingin menambah wawasannya terkait dengan sejarah Indonesia seputar kolonialisme dan nasionalisme.



ISBN : 978-602-498-495-3



9 786024 984953

unypress©2023

UNY Press

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274 - 589346

E-Mail: unypenerbitan@uny.ac.id

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)